

P

Majalah

Parlementaria



USUT TUNTAS SP3 KARHUTLA

GRATIS
TIDAK DIPERJUALBELIKAN

ADA PERUSAHAAN
FIKTIF TERIMA SP3
KASUS KARHUTLA

8

PRESIDEN HARUS
KONSISTEN TINDAK TEGAS
PENJAHAT LINGKUNGAN

18



PENGAWAS UMUM

Pimpinan DPR-RI

PENANGGUNG JAWAB/KETUA PENGARAH

Dr. Winantuningtyas Titi Swasanany, M.Si.
(Sekretaris Jenderal DPR-RI)

WAKIL KETUA PENGARAH

Dra. Damayanti, M.Si,
(Deputi Persidangan)

PIMPINAN PELAKSANA

Drs. Suratna, M.Si
(Karo Pemberitaan Parlemen)

PIMPINAN REDAKSI

Drs. Mohammad Djazuli, M.Si
(Kabag Media Cetak)

WK. PIMPINAN REDAKSI

Dra. Tri Hastuti
(Kasubag Media Cetak)
Insan Abdirrohman, SH
(Kasubag Media Sosial)
Ahyar Tibi, SH
(Kasubag Analisis Media)

REDAKTUR

Mastur Prantono, Nita Juwita, S.Sos

SEKRETARIS REDAKSI

Suciati, S.Sos, Bagus Mudjiharjanto

ANGGOTA REDAKSI

Agung Sulistiono, SH, Rahayu Setiowati,
Muhammad Husen, Sofyan Efendi,
Virgianne Meiske Patuli, Devi Iriandi,
Hendra Sunandar, Surahmat Eko, Ria Nur Mega

REDAKTUR FOTO

Eka Hindra Sasmita, Iwan Armanias

FOTOGRAFER

Rizka Arinindya, Naefuroji, M. Andri Nurdiansyah,
Andi M. Ilham, Jaka Nugraha, Runi Sari Budiati,
Jayadi Maulana, Arief Rachman,
R. Kresno P. D Moempoeni, Azka Restu Fadilah

ADMINISTRASI FOTO

Hasri Mentari

ALAMAT REDAKSI/TATA USAHA

Bagian Media Cetak & Media Sosial DPR RI
Gedung Nusantara II Lt. 3
Jl. Jend. Gatot Soebroto-Senayan, Jakarta
Telp. (021) 5715348, 5715350
Fax. (021) 5715341,
e-mail: dpr.pemberitaan@gmail.com.
www.dpr.go.id/berita



PENERBITAN & DISTRIBUSI

PIMPINAN PENERBITAN

Djustiawan Widjaya, S.Sos. M.AP
(Kabag Penerbitan)

WK. PIMPINAN PENERBITAN

Mediantoro, SE
(Kasubag Produksi),
Pesta Evaria Simbolon, SE. M.Si
(Kasubag Distribusi)

STAF PRODUKSI

Eko Murdiyanto, Farid, SE, Barliansyah, Fathurahman,
Mujiono, Abdul Kahfi, S.Kom

SIRKULASI

Siti Rondiyah, Oji, Remon, Ifan
Telp: 021-571 5697, Fax: 021-571 5421
Email: penerbitandpr@gmail.com

HUBUNGI BAGIAN PENERBITAN UNTUK PERMINTAAN
HASIL CETAK DAN DISTRIBUSI (GRATIS)

ISI BERITA DAN MATERI FOTO
DILUAR TANGGUNGJAWAB BAGIAN PENERBITAN

PENGANTAR REDAKSI

Kebakaran hutan yang terjadi setiap tahun di Indonesia menimbulkan keprihatinan mendalam. Akibat kasus itu, tidak saja mengganggu aktivitas perekonomian namun juga mengganggu hubungan Indonesia dengan negara tetangga yang merasakan dampak asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan.

Berdasarkan catatan Walhi, tahun 2015 pembakaran hutan dan lahan menimbulkan titik api sebanyak 129.000 di seluruh Indonesia, merampas kemerdekaan 40 juta penduduk atas udara yang bersih, mengakibatkan kematian 21 orang dan menghentikan aktivitas ekonomi sosial setidaknya 9 provinsi.

Namun di tengah keprihatinan itu, kita dikejutkan dengan diterbitkannya Surat Perintah Penghentian Perkara (SP3) kasus tersangka 15 korporasi di Riau. Bagi Benny K. Harman Wakil Ketua Komisi III DPR RI, penghentian kasus hukum para tersangka Karhutla menjadi sebuah masalah serius. Hal ini tidak hanya terkait masalah lingkungan, melainkan juga kejelasan soal kejahatan lingkungan.

“Ini masalah yang sangat serius. Kepolisian telah menetapkan sejumlah perusahaan menjadi tersangka. Namun secepat halilintar, Polda di sejumlah daerah menerbitkan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) terhadap sejumlah perusahaan yang sudah menjadi tersangka itu,” tegasnya.

Hal yang sama dikatakan Arsul Sani, Anggota Komisi III DPR RI yang juga sebagai Ketua Panja Karhutla, bahwa ada yang janggal dalam penerbitan SP3 terhadap 15 perusahaan di Riau dan penyidik belum optimal dalam mencari alat bukti kasus tersebut.

DPR RI sesuai tugas dan fungsinya melakukan pengawasan, akan mencari, dan mengusut kebenaran dari penerbitan SP3 tersebut. Panja Karhutla akan mendalami masalah tersebut, terutama yang berkaitan dengan dikeluarkannya SP3 tersebut oleh Polda Riau. Kemudian mengupayakan solusi agar ke depan tindakan semacam ini tidak terjadi lagi, sekaligus memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus ini dapat berjalan dengan lancar sesuai perundang-undangan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun. ■

IKUTI AKUN MEDIA SOSIAL DPR RI
Follow, Like & Subscribe

Facebook: DPR RI | Twitter: @DPR_RI | Instagram: @DPR_RI | YouTube: DPR RI

medsos@dpr.go.id | www.dpr.go.id

DAFTAR ISI

ASPIRASI	4
PROLOG	
Usut Tuntas SP3 Karhutla	6
LAPORAN UTAMA	
Ada Perusahaan Fiktif Terima SP3 Kasus Karhutla	8
SP3 Yang Menuai Berbagai Kritikan	10
Kapolri Larang Polda, Polres Dan Polsek Keluarkan SP3	12
Pemerintah Gagal Atasi Kebakaran Hutan	14
Diduga Ada Kepentingan Pribadi Dalam Kebakaran Hutan	15
SP3 15 Perusahaan adalah Bukti	
Pemerintah Tidak Fokus Tangani Karhutla	16
Presiden Harus Konsisten Tindak Tegas Penjahat Lingkungan	18
Jadikan Masyarakat Adat Sebagai	
Garda Terdepan Atasi Karhutla	20
SUMBANG SARAN	
Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan	22
PENGAWASAN	
Penyelenggaraan Ibadah Haji Lebih Baik dan Perlu Terus Ditingkatkan	24
Keselamatan Penumpang Tidak Boleh Main-main	26
ANGGARAN	
Soal Pemotongan Anggaran: Salah Prosedur vs Domain Pemerintah	30
DAPIL	32
LEGISLASI	
Melalui RUU Larangan Monopoli, DPR RI Dorong KPPU Diperkuat	38
PROFIL	
Dodi Reza Alex Noerdin	
Intelektual Muda di Panggung Politik	40
FOTO BERITA	43
KIAT SEHAT	
Ada Apa dengan Zika?	54
KUNKER	56
SOROTAN	
Kewarganegaraan Ganda Perlu Kajian Mendalam	66
LIPUTAN KHUSUS	68
SELEBRITI	72
PERNIK	
"Wayang Golek" Tutup Acara Pesta Rakyat	74
PARLEMEN DUNIA	76
POJOK PARLE	78



8 LAPORAN UTAMA



43 FOTO BERITA



72 SELEBRITI

Pengaduan Perkara Cerai

Saya adalah istri dari Ipda Boyke Barus Sitepu, yang menikah pada tanggal 15 September 2002, di Medan sesuai kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Medan Selayang, Provinsi Sumatera Utara, Nomor 310/23/IX/14423, tanggal 15 September 2002. Dari pernikahan tersebut lahir seorang anak laki-laki yang diberi nama Edric Haggie Gumilang B Sitepu pada tanggal 1 Desember 2003

Pada awalnya perjalanan pernikahan Saya dan suami berjalan lancar, saya bekerja sebagai ibu rumah tangga sekaligus karyawan PT. Serasi Auto Raya namun suami sebagai seorang Anggota Kepolisian melarang saya untuk aktif dalam pertemuan Bhayangkari.

Saya telah banyak berkorban untuk peningkatan karir suami, namun setelah menjadi Perwira, dia menjadi sibuk hingga tidak punya waktu untuk keluarga, dengan alasan tugas luar kota, dan sering tidak pulang ke rumah.

Kemudian saya menemukan *memory card* suami, yang isinya dugaan perselingkuhannya dengan 2 (dua) teman wanitanya, yang menyebabkan, tidak pernah memberi nafkah yang layak kepada saya dan anak.

Bahwa kemudian suami mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama Medan, dan pada tanggal 5 Januari 2016, saya menerima surat panggilan dari Polresta Medan, untuk melakukan mediasi. Saya memohon agar DPR RI membantu menyelesaikan permasalahan dimaksud sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Tri Asri
Medan Selayang, Medan

Minta Keadilan dan Kepastian Hukum

Kami pengacara dari I Gusti Rulesi, berdasarkan surat kuasa khusus, Nomor. 010/KK/PAHAM-JKT/III/2016, tertanggal 08 Maret 2016, ingin menyampaikan sebagai berikut :

Berdasarkan Surat Perintah Penahanan Polsek Metro Tanah Abang No. Sp han/130/XXI/2015, Sektor, tertanggal 13 Desember 2015. dengan surat penahanan tersebut klien kami ditahan oleh Penyidik Kepolisian Sektor Tanah Abang.

Bahwa berkas perkara dari Penyidik No. 172/K/XII/2015/ sektor Tanah Abang, tanggal 13 Desember 2015, klien pengadu dibuatkan berita acara penangkapan, penahanan dan penyidikan, dan berkas perkaranya dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat, karena terbukti melakukan tindakan pidana pencurian, melanggar pasal 363 KUHP dan dikenakan penahanan.

Bahwa dalam surat penahanan tersebut dinyatakan bahwa klien kami ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat, selama 20 (dua puluh) hari, dan masa penahanan tersebut telah lewat (daluarsa). Akibat ketidakjelasan status penahanan tersebut, klien kami dirugikan baik secara materil dan imateril, ditahan dengan tuduhan melawan hukum oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.

Dari fakta diatas harapan kami, ada keadilan dan kepastian hukum bagi kliennya, Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat agar bertindak adil dan benar dalam setiap perkara yang ditangani dan harus disampaikan sesuai peraturan perundang-undangan, serta meminta itikad baik Kepala Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat membebaskan demi hukum klien kami yang ditahan di Rutan Salemba, Jakarta Pusat.

Kami memohon agar Ketua Komisi III DPR RI mengawasi dan memonitor kasus yang telah dilaporkan tersebut.

Sabarrudin
Jaktim, DKI Jakarta

Kejahatan Ekosistem

Saya adalah warga masyarakat Kepulauan Riau, melaporkan dugaan perbuatan pidana luar biasa yang dilakukan oleh PT. BAI, yang secara terang-terangan merusak dan menimbun ekosistem mangrove dan melawan Undang-Undang Nomor. 27 Tahun 2007, tentang Wiayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil.

Bahwa PT. BAI telah melakukan perusakan, penimbunan ekosistem mangrove pada lahan masyarakat di Kampung Galang Batang, Desa Gunung kijang, Kota Bintan Timur tanpa sosialisasi sebelumnya kepada warga pemilik.

Bahwa secara struktur, merupakan pelanggaran

Undang-Undang dan tindakan melawan hukum

Sehubungan dengan hal tersebut, saya berharap surat BPN RI No. 078/5-400-18/III/2016, tertanggal 1 Maret 2016, tidak dijadikan alat intervensi terhadap hak warga secara turun-temurun yang tidak mau diganti rugi, tapi dipaksa dibuatkan izin kawasan untuk PT. Bintan Alumina Indonesia (PT. BAI).

Saya memohon agar Ketua Komisi III DPR RI mengawasi dan memonitor kasus yang telah dilaporkan tersebut.

Rasyid
Bintan, Kepulauan Riau



Penyampaian Bukti Sengketa Lahan Kelompok Tani

Saya adalah Ketua Kelompok Tani Talang Keramat, Kel. Talang Keramat, Kec. Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.

Sampai saat ini belum ada kepastian hukum dan penyelesaian terkait sengketa lahan perkebunan milik masyarakat Kelompok Tani Talang Keramat, yang telah dijual oleh Sdr. M. Hosein Assegaf kepada PT. Perum Perumnas. Berkaitan dengan hal tersebut saya menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

Pertemuan yang diadakan di Pemkab. Banyuasin tidak menghasilkan kesepakatan kedua belah pihak.

Rekonstruksi batas pada tanggal 15 Oktober 2014 hanya dihadiri oleh kelompok Sdr. M. Hosein Assegaf tanpa menghadirkan Kelompok Tani Talang Keramat, pejabat RT setempat, pejabat Kelurahan Talang Keramat dan pejabat Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, sehingga

diduga ada rekayasa yang dilakukan oleh Sdr. M. Hosein Assegaf.

Bahwa kelompok tani Talang Keramat, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin meminta bantuan melalui Kuasa Hukum Sudiatmo, SH MH, dan rekan untuk mengirim surat somasi yang ditujukan kepada Kepala Kantor BPN Kabupaten Banyuasin dengan Nomor. 004/SD-SK/VI/2015, terkait penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang, karena dalam lampiran berita acara hasil rekonstruksi batas, tidak ada satu orangpun yang hadir dari Kelompok Tani Talang Keramat,

Diduga telah terjadi pelanggaran hukum KUHP pasal 418, jo 419 KUHP tentang suap yang dilakukan oleh M. Hosein Assegaf dkk kepada oknum pejabat BPN dan Kepolisian Kabupaten Banyuasin.

**Nirwan Hasan
Banyuasin, Sumatera Selatan**

Masalah Tanah Pekuburan Bukit Sentiong

Saya adalah Ketua Dewan Penasehat LSM-FKMTI Kota Padang, menyampaikan aspirasi Masyarakat Tionghoa Indonesia Kota Padang, terkait tanah pekuburan Masyarakat Tionghoa di Bukit sentiong.

Bahwa sebelumnya saya telah menerima surat dari Kementerian Sekretaris Negara Republik Indonesia, Nomor. B-1253/Kemensetneg/D-2/SR.03/03/2016, tanggal 15 Maret 2016, dengan lampiran surat penjelasan Pemerintah Kota Padang Nomor.469/06.04/DKP-2015, tanggal 27 November 2015.

Terkait dengan masalah tanah pekuburan di Bukit Sentiong tersebut, saya menyampaikan aspirasi masyarakat, sebagai berikut :

Surat Keputusan Walikotamadya Padang, Nomor. 188.45.2.54/SK-H-87, tanggal 1 September 1987, tentang jadwal waktu penutupan dan pemindahan kuburan Tionghoa, ternyata tidak diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang, pada tahun 1987;

Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat, tanggal 13 Oktober 1987, tentang Pengesahan Keputusan Walikotamadya, Kepala Daerah Tingkat II Padang, Nomor.188.45.2.54/SK-H-87, tidak diundangkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat, Tahun 1987;

Kelenteng See Hin Kiong-Padang, merupakan tempat ibadah Umat Kong Hu Cu, tidak dalam kapasitas mewakili masyarakat Tionghoa Indonesia Kota Padang, yang multi agama, jadi kesepakatan antara mantan ketua Kelenteng See Hin Kiong-Padang.;

Mantan Ketua dan Sekretaris Kelenteng See Hin Kiong-Padang, tidak berhak menyerahkan sertifikat tanah kuburan masyarakat Tionghoa di Bukit Sentiong kepada Pemerintah Kota Padang, karena merupakan aset masyarakat Tionghoa Indonesia, Kota Padang, bukan milik pribadi maupun keluarga.

Saya memohon agar aspirasi tersebut mendapat perhatian DPR RI dengan memberikan solusi penyelesaian .

**Valentinus Gunawan
Padang, Sumatera Barat**

Kasus Tanah Bersurat Hijau

Saya Ketua RW. 04, Perak Barat, Surabaya menyampaikan kepada Ketua Komisi II DPR RI terkait permasalahan tanah di Surabaya.

Bahwa Pemkot Surabaya telah memberlakukan sewa tanah sejak 1970 di 86 kelurahan dari sekitar 164 kelurahan di Kota Surabaya, berjumlah 47.000 persil, yang diaku sebagai aset Pemkot tanpa didukung alas hak berupa SHM. Disamping membayar retribusi tanah, warga diwajibkan membayar PBB setiap tahunnya terhadap obyek tanah yang sama.

Bahwa awal pengakuan aset tanah yang dikelola Pemkot Surabaya tersebut berdasarkan hasil kerja Tim Pengkajian dan Perumusan Kebijakan Walikota mengenai status tanah yang dikelola Pemkot Surabaya, yaitu berdasarkan SK Walikota No. 188.45/360/ 402.1.1/2002 yang disosialisasikan kepada DPRD Surabaya dengan pengiriman Peta Aset. Padahal menurut Pengadu hasil kerja Tim tersebut tidak obyektif.

Saya mengharapkan agar tanah ex rumah dinas TNI AL dapat dikembalikan menjadi Tanah Negara, karena pada 1981 tanah tersebut pernah dinyatakan sebagai Tanah Negara, sehingga warga dapat mengurus SHM ke BPN tanpa membayar uang ganti rugi kepada Pemkot Surabaya.

**Subiyanto
Surabaya, Jawa Timur**



USUT TUNTAS SP3 KARHUTLA

Kebakaran hutan di Indonesia seolah menjadi acara rutin yang selalu terjadi di setiap tahunnya. Namun pada tahun 2015 lalu menjadi kebakaran hutan terparah sepanjang sejarah kebakaran di Indonesia dan beberapa negara lain di Asia Tenggara. Lebih dari 100 ribu kebakaran melahap jutaan hektar hutan di Indonesia. Sebagian Indonesia dan negara-negara tetangga diselimuti asap beracun dalam jangka waktu berminggu-minggu. Korban pun terus berjatuhan, anak-anak maupun orang dewasa. Tidak sedikit hewan ternak pun mati akibat asap kebakaran. Akibatnya, status darurat asap pun sempat diberlakukan ketika itu.

Kecurigaan muncul terhadap beberapa perusahaan besar yang diduga sengaja membakar hutan untuk membuka lahan baru guna keperluan bisnis kebun sawit, karet atau berbagai komoditi lainnya. Sejatinya pada era 1980-an negara memberikan hak konsensi kepada perusahaan besar dan petani skala kecil. Pemerintah memperbolehkan membakar hutan untuk membuka lahan pertanian. Akan tetapi selama dua dekade terakhir pembakaran hutan untuk membuka lahan diatur dalam undang-undang. Hanya pembakaran di bawah dua hektar lahan yang diperbolehkan. Hal ini membuka celah bagi perusahaan-perusahaan besar. Mereka diduga membayar petani-petani kecil untuk membuka lahan konsensi hanya dengan upah rokok dan baju.

Deputi III bidang kerusakan lingkungan KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) Arief Yuwono kepada Antara (15/7) sempat mengatakan bahwa KLH mendeteksi ada delapan provinsi yang berpotensi terjadinya kebakaran hutan, yakni Provinsi Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan tengah, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.

Khusus di Provinsi Riau sendiri menurut data yang dihimpun dari Jaringan Kerja Penyelamat Hutan Riau (Jikalahari) atas kematian Prajurit dari kesatuan TNI AD Detasemen Artileri Pertahanan Udara Rudal - 004 Dumai saat bertugas memadamkan api di areal terbakar di Rokan hilir menambah daftar korban akibat Karhutla sejak 2015 lalu yang merenggut lima warga meninggal pada tahun 2015 lalu, yakni sebanyak 97.139 warga terkena ISPA dan kerugian ekonomi senilai 21 Triliun.

Komisi III DPR RI dalam kunjungan kerjanya ke Provinsi Riau pada tanggal 30 September - 2 Agustus menemukan sejumlah fakta bahwa kawasan hutan di provinsi tersebut berjumlah 4,2 juta hektar, sementara perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan

sebanyak kurang lebih 500 perusahaan, yang ada izinnya sebanyak kurang lebih 1,2 juta hektar, tanaman tanpa izin sebanyak 2,3 juta hektar.

Kenyataan yang cukup mengagetkan adalah dari 260 pabrik kelapa sawit, 121 pabrik diantaranya tidak memiliki perkebunan. Dugaan sementara, adanya korelasi antara terjadinya kebakaran hutan yang disebabkan alih fungsi lahan oleh pabrik yang akan membuka lahan untuk perkebunan kelapa sawit. Menebang kawasan hutan oleh perusahaan kelapa sawit yang tidak memiliki perkebunan.



Penghentian penyelidikan kasus hukum para tersangka Karhutla lewat terbitnya SP3 menjadi sebuah masalah serius. Hal ini tidak hanya terkait masalah lingkungan, melainkan juga kejelasan soal kejahatan lingkungan.



Tahun 2015 lalu khusus di Provinsi Riau, Polda Riau menangani 18 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan. Namun, dari jumlah itu, hanya tiga kasus yang dinyatakan lengkap dan layak dilanjutkan ke

proses selanjutnya. Ketiga kasus itu melibatkan tiga korporasi yaitu PT Langgam Inti Hibrindo, PT Palm Lestari Makmur, dan PT Wahana Subur Sawit. Ketiganya sudah diproses di pengadilan. Hanya ada satu putusan berkekuatan hukum tetap dan membebaskan perusahaan, yakni PT Langgam Inti Hibrindo.

Sementara, 15 perusahaan lain penyidikannya dihentikan oleh Polda Riau. Ke 15 perusahaan itu yakni PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, PT Sumatera Riang Lestari, PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam, PT Rimba Lazuardi, PT Langgam Inti Hibrindo, PT Palm Lestari Makmur, dan PT Wahana Subur Sawit.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Komisi III DPR RI selalu bersifat responsif terhadap berbagai permasalahan dalam bidang penegakan hukum, termasuk kasus penerbitan SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidik) terhadap tersangka perusahaan pembakar hutan dan lahan di Provinsi Riau. Terkait hal itu Komisi III DPR RI juga telah membentuk Panja (Panitia Kerja) Kebakaran Hutan dan Lahan yang khusus menyoroti permasalahan penegakan hukumnya.

Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Benny K Harman penghentian penyelidikan kasus hukum para tersangka Karhutla lewat terbitnya SP3 menjadi sebuah masalah serius. Hal ini tidak hanya terkait masalah lingkungan, melainkan juga kejelasan soal kejahatan lingkungan.

Sementara itu Anggota Komisi III DPR RI yang sekaligus Ketua Panja Karhutla Komisi III, Arsul Sani mengatakan bahwa ada yang janggal dalam penerbitan SP3 terhadap 15 perusahaan di Riau. Ia melihat penyidik belum optimal dalam mencari alat bukti kasus tersebut. Oleh karena itu Benny dan Arsul berharap pengusut tuntas terbitnya SP3 terhadap tersangka Kasus Karhutla. ■

Ada Perusahaan Fiktif Terima SP3 Kasus Karhutla

Pembentukan Panja Karhutla Komisi III DPR RI dipandang perlu untuk mendalami masalah tersebut, terutama permasalahan yang berkaitan dengan dikeluarkannya SP3 tersebut oleh Polda Riau. Kemudian mengupayakan solusi agar ke depan tindakan semacam ini tidak terjadi lagi, dan memastikan bahwa proses hukum terhadap kasus ini dapat berjalan dengan lancar sesuai perundang-undangan yang berlaku tanpa ada intervensi dari pihak manapun. Berikut pendapat Wakil Ketua Komisi III, Benny K Harman dan Ketua Panja Karhutla, Arsul Sani :

Benny K Harman, Wakil Ketua Komisi III DPR RI

“Kasus ini Masalah Serius”

Menurut Benny, penghentian kasus hukum para tersangka Karhutla menjadi sebuah masalah serius. Hal ini tidak hanya terkait masalah lingkungan, melainkan juga kejelasan soal kejahatan lingkungan.

“Ini masalah yang sangat serius. Kepolisian telah menetapkan sejumlah perusahaan menjadi tersangka. Namun secepat halilintar, Polda di sejumlah daerah menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan terhadap sejumlah perusahaan yang sudah menjadi tersangka,” kata Benny usai rapat Panja Karhutla di ruang rapat Komisi III, Senayan Jakarta, pertengahan September lalu.

Pihaknya akan mengundang sejumlah pihak, terkait penerbitan SP3 tersebut. Mulai dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kapolda Riau, DPRD Riau serta beberapa daerah lainnya yang memiliki kasus yang serupa seperti Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Papua.

“Terutama kami akan meminta penjelasan dari penegak hukum secara transparan dan akuntabel. Apa sudah melalui proses hukum atau sebenarnya ada proses di luar hukum, misalnya ada

politik yang mengintervensi,” tegasnya.

Ditambahkan Benny, hasil tinjauan lapangan Panja Karhutla ditemukan masalah terkait transparansi alasan hukum dan mekanisme proses penetapan perusahaan tersebut sebagai tersangka.

“Seharusnya memiliki dasar hukum. Berdasarkan KUHP, ada mekanisme dalam penentuan menjadi tersangka harus didahului dengan penerbitan Surat Perintah Dimulai Penyidikan (SPDP),” ujar Benny.

Mekanisme tersebut, seharusnya diketahui dan diawasi oleh Kejaksaan, namun, menurut Benny, dalam proses penetapan tersangka kelima belas perusahaan itu, langkah tersebut tidak ditempuh kepolisian.

Tidak hanya itu, lanjut Benny, ia juga akan meminta penjelasan dari 15 perusahaan di Riau yang diterbitkan SP3. Salah satu hal yang akan ditanyakannya adalah terkait *legal standing* perusahaan tersebut. Konon, menurut Benny diduga ada beberapa perusahaan fiktif yang termasuk dalam 15 perusahaan yang menjadi tersangka. “Bagaimana bisa perusahaan fiktif menjadi tersangka,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini.



Wakil Ketua Komisi III DPR RI
Benny K Harman

foto : Arief/iw

Dalam catatannya, ada PT Dexter Rimba Perkasa (HTI) yang telah dicabut ijin usaha HTI pada tanggal 4 Februari 2015. Sedangkan PT Hutan Sola Lestari (HPH) yang dicabut ijinnya pada 2015 September 2015 lalu (karena terkena sanksi administrasi karena hutan terbakar) juga masuk SP3. Sedangkan PT PAN United dicabut ijinnya pada 26 September 2012 dan PT Siak Timber pada 23 Maret 2013 silam ijin usahanya sudah dicabut, namun nama perusahaan ini masih masuk dalam daftar tersangka yang mendapat SP3.

“Penyidik Belum Optimal Cari Alat Bukti”

Senada dengan Beny, Arsul Sani, Anggota Komisi III DPR RI yang juga sebagai Ketua Panja Karhutla Komisi III mengatakan bahwa ada yang janggal dalam penerbitan SP3 terhadap 15 perusahaan di Riau. Ia melihat penyidik belum optimal dalam mencari alat bukti kasus tersebut.

“Kapolri memang sudah menegaskan bagi pihak yang tidak puas atas penerbitan SP3 kasus Karhutla tersebut bisa ajukan praperadilan, dan pihaknya akan siap dengan hal itu. Tapi itu kan untuk masyarakat atau LSM (lembaga swadaya masyarakat). Kalau kami di DPR RI sesuai tugas dan fungsi kami melakukan pengawasan, kami akan mencari, dan mengusut kebenaran dari penerbitan SP3 tersebut. Seharusnya penegak hukum itu optimal mencari alat bukti. Sebenarnya persoalan seperti ini bukan hanya terjadi saat ini, namun sudah puluhan tahun, tapi tidak ada penyelesaiannya” ujarnya.

Dijelaskan Arsul, panja memang menduga ada perusahaan fiktif alias bodong dari 15 perusahaan yang sempat ditetapkan sebagai tersangka pembakar hutan dan lahan di Riau itu. Kecurigaan ini muncul setelah mengetahui bahwa perusahaan tersebut tidak ada di Riau, namun tetap ditetapkan sebagai tersangka.

“Ini aneh, kok perusahaan yang sudah tidak ada dan tidak beroperasi disana malah ditetapkan sebagai tersangka. Ini maksudnya apa,” ujarnya usai memimpin rapat internal Panja Karhutla, baru-baru ini di ruang rapat komisi III DPR RI, Senayan Jakarta.

Adanya perusahaan fiktif ini malah memunculkan dugaan baru, bahwa perusahaan itu sengaja ditetapkan sebagai tersangka untuk melindungi atau memproteksi perusahaan besar yang sebenarnya menjadi pelaku utama pembakaran hutan dan lahan tersebut.

“Kita semua seolah-olah dibohongi. Ada perusahaan yang ditetapkan

sebagai tersangka tapi ternyata perusahaan itu fiktif alias bodong. Ini kan aneh,” ucap Politisi dari Fraksi PPP ini.

Arsul mengatakan bahwa pihaknya akan mengundang beberapa ahli terkait kasus tersebut, seperti ahli dari Dinas Kehutanan Provinsi Riau, ahli kebakaran hutan, ahli hukum pidana, LSM pemerhati lingkungan serta pakar hukum lingkungan.

Lebih lanjut Arsul juga sempat mengungkapkan bahwa pihaknya juga akan meminta Polri untuk mencari saksi ahli yang akan meneliti dan memberikan keterangan terkait



Ini aneh, kok perusahaan yang sudah tidak ada dan tidak beroperasi disana malah ditetapkan sebagai tersangka. Ini maksudnya apa.



kasus Karhutla tersebut. Keterangan ahli pembanding sejatinya sangat diperlukan agar kebijakan penerbitan SP3 ini memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya inilah yang tidak ia lihat dalam penerbitan SP3 atas 15 perusahaan di Riau.

Dari informasi, data, dan fakta yang di dapat Panja Pengawasan Karhutla inilah kemudian akan dianalisa, dievaluasi dan dikoreksi, untuk kemudian dibuat sebuah rumusan untuk rekomendasi sebagai upaya tegaknya hukum

terhadap pelanggaran hukum atas kasus ini.

Rekomendasi dari Panja ini juga akan diberikan kepada pihak-pihak yang dianggap berkepentingan dalam proses penegakan hukum kasus ini. Sehingga dalam merumuskan kebijakan untuk mengupayakan solusi agar ke depan permasalahan hukum seperti ini tidak terjadi lagi.

Arsul meyakini bahwa Tim Panja Komisi III DPR RI masih terus bekerja dan akan menyelesaikan tugasnya kurang lebih dalam tujuh minggu ke depan, atau sekitar 1,5 bulan yang akan datang. Ke depan sejumlah agenda juga telah disusun untuk melakukan rapat dengar pendapat oleh DPRD Riau, LSM, saksi ahli, pihak Polda, dan 15 perusahaan yang mendapat SP3, mengenai progres kasus tersebut. Bahkan tidak tertutup kemungkinan pihaknya juga akan melakukan pencarian fakta ke lapangan terkait kasus itu.

“Dalam tujuh minggu atau 1,5 bulan Insya Allah panja akan dapat menyelesaikan tugas ini,” pungkasnya.

Hingga berita ini diturunkan Panja Komisi III DPR RI masih terus menggelar rapat internal Panja, RDP (rapat dengar pendapat) dengan sejumlah pihak *plus* mencari informasi dan data di lapangan terkait kasus ini. ■

(ayu)



foto: Arief/iv

Anggota Komisi III DPR RI Arsul Sani

KAPOLRI LARANG POLDA, POLRES DAN POLSEK KELUARKAN SP3

Tampaknya kuping Kapolri, Jenderal Polisi Tito Karnavian, mulai panas mendengar begitu banyak protes atas penerbitan surat penghentian penyidikan perkara (SP3) terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan.

Orang nomor satu di jajaran kepolisian yang baru di lantik Juli itu pun memutuskan, kepolisian di daerah tak boleh lagi mengeluarkan SP3 terkait kasus yang melibatkan perusahaan maupun korporasi.

Tito mengatakan, kasus karhutla terlebih melibatkan perusahaan cukup sensitif. Dia pun memerintahkan kepada kepolisian di daerah baik Polda, Polres maupun Polsek tak boleh alias dilarang mengeluarkan SP3.

“Saya sudah membuat kebijakan, saya sudah perintahkan kepada seluruh jajaran kepolisian, Polda, Polres, Polsek, yang menangani kasus dugaan kebakaran hutan, pembakaran hutan oleh korporasi tak boleh mengeluarkan SP3,” katanya di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (5/9/2016).

Kewenangan SP3, katanya, ada di Mabes Polri. Sebelum itu, gelar perkara juga di Mabes Polri. Gelar perkara pun, kata Tito, akan dilakukan didepan tim gabungan Mabes Polri dari kewilayahan, Bareskrim, Propam, divisi hukum, dan bagian pengawasan umum.

Bila perlu, katanya, dalam gelar perkara itu Mabes Polri akan mengundang tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. “Berikut mungkin masyarakat, pengamat yang merasa mengetahui tentang peristiwa itu,” katanya.

Dengan ada proses itu, dia berharap, SP3 korporasi yang terduga karhutla terbuka dan tak ada dugaan



Komisi III DPR RI berjabat tangan dengan Kapolri

foto : Runi/iw

aneh-aneh. “Ini kebijakan saya ke depan,” tegasnya.

Soal SP3 ini, katanya, Mabes Polri juga sudah evaluasi dengan menurunkan tim ke Riau. “SP3 terjadi Januari-Mei 2016, saya sendiri menjabat Juli 2016. Untuk itu saya evaluasi, sudah mengirimkan tim dari Propam dan Bareskrim menilai tentang SP3,” kata Tito.

Hasilnya, kata Tito, sudah disampaikan dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR RI, antara lain tak terdapat cukup bukti pembakar siapa, dan ada juga api masuk dari luar lahan perusahaan, dan lain-lain.

Dalam kesimpulan rapat kerja Komisi III DPR RI dengan Kapolri di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (5/9/2016), salah satu kesimpulan rapat adalah DPR RI mendorong Kapolri agar mempercepat penyelesaian kasus-kasus yang menarik perhatian masyarakat, salah satunya soal kasus SP3 karhutla di

Riau.

Bahkan khusus untuk kasus SP3 kahurtla di Riau, Komisi III DPR RI dan Kapolri sepakat untuk melakukan evaluasi dan pendalaman melalui Panitia Kerja (Panja) yang dibentuk oleh Komisi III DPR RI.

“Hasilnya sudah saya sampaikan pada saat rapat dengan Komisi III DPR RI, di antaranya tidak cukup bukti pembakar siapa,” kata Tito.

Kendati begitu, Tito menegaskan Polri sangat mendukung Kementerian LHK dalam menangani kebakaran hutan dan lahan, yang di antaranya ada pidana yang terjadi, seperti pembakaran.

“Tahun lalu sudah banyak yang diproses hukum dan diajukan. Itu menunjukkan komitmen dari kepolisian untuk memberantas pembakaran hutan dan lahan yang mengakibatkan dampak yang cukup luas,” tegasnya.

Meskipun begitu, kata Tito, karena SP3 merupakan produk hukum, sesuai

ketentuan, hanya bisa dibuka kalau ada praperadilan. Dia mengatakan, siapapun boleh mengajukan praperadilan.

“Pihak-pihak yang merasa dirugikan, rekan-rekan LSM mungkin? Kalau nanti ada yang diterima praperadilan, tentu kita bisa buka kembali kasus-kasus itu,” ujarnya.

Ia menegaskan SP3 perusahaan diduga pembakar hutan tersebut, dirinya mempersilahkan pihak-pihak yang tidak puas untuk menggugat.

“Kalau ada yang keberatan silakan praperadilan, ada mekanismenya. Saya sudah capek ditanya itu mulu, jadi sekali lagi silahkan kalau mau digugat,” katanya.

Kapolri mengungkapkan, kenapa SP3, karena memang tidak ditemukan cukup bukti. Kemudian ada api dari luar yang disebutnya masuk ke lahan korporasi. Karena sebagian masih sengketa dengan masyarakat.

Namun demikian mantan Kepala BNPT tersebut mengakui masalah tersebut tetap menjadi perhatiannya. “Kemarin saya sudah ke Riau guna membahas dan mendengar penjelasan langsung Kapolda, termasuk lahan perusahaan yang sudah di SP3 namun kembali terbakar,” tandasnya.

Belum usai kasus SP3, beredar foto yang memperlihatkan sejumlah petinggi di Polda Riau sedang berkumpul dengan para bos perusahaan yang diduga bermasalah karena melakukan pembakaran terhadap lahannya.

Foto tersebut memunculkan dugaan bahwa ada permainan antara aparat penegak hukum dengan pihak perusahaan, termasuk penerbitan SP3 terhadap 15 perusahaan di Riau.

Lagi-lagi, Tito Karnavian memberikan klarifikasi terkait foto yang beredar itu. Menurut Tito, dalam foto itu tidak ada pihak perusahaan yang telah diberi SP3 terkait kasus pembakaran lahan.

“Dari semua foto hanya satu saja pengusaha yang memiliki lahan sawit dan pengusaha sawit ini tidak terkait dengan perusahaan yang diberi SP3. Kalau ini dikaitkan juga tidak tepat,”

jelasan saat Rapat Kerja dengan Komisi III DPR RI.

Dalam foto itu terlihat Dir Reskrisus Polda Riau Kombes Rivai Sinambela, Dir Reskrim Polda Riau Kombes Surawan, Kapolresta Pekanbaru Kombes Toni Hermawan dan Kombes Hendra dari Paminal Div Propam Mabes Polri. Dalam foto juga terdapat bos PT Andhika Pratama Sawit Lestari (APSL).

Menurut Tito, pertemuan pejabat Polri yang terlihat dalam foto itu adalah hal yang wajar karena mereka sama-sama satu angkatan di Akademi Kepolisian. Pun, tujuan pertemuan tersebut bukan berbicara soal kebakaran hutan atau SP3 melainkan evaluasi kasus Meranti.

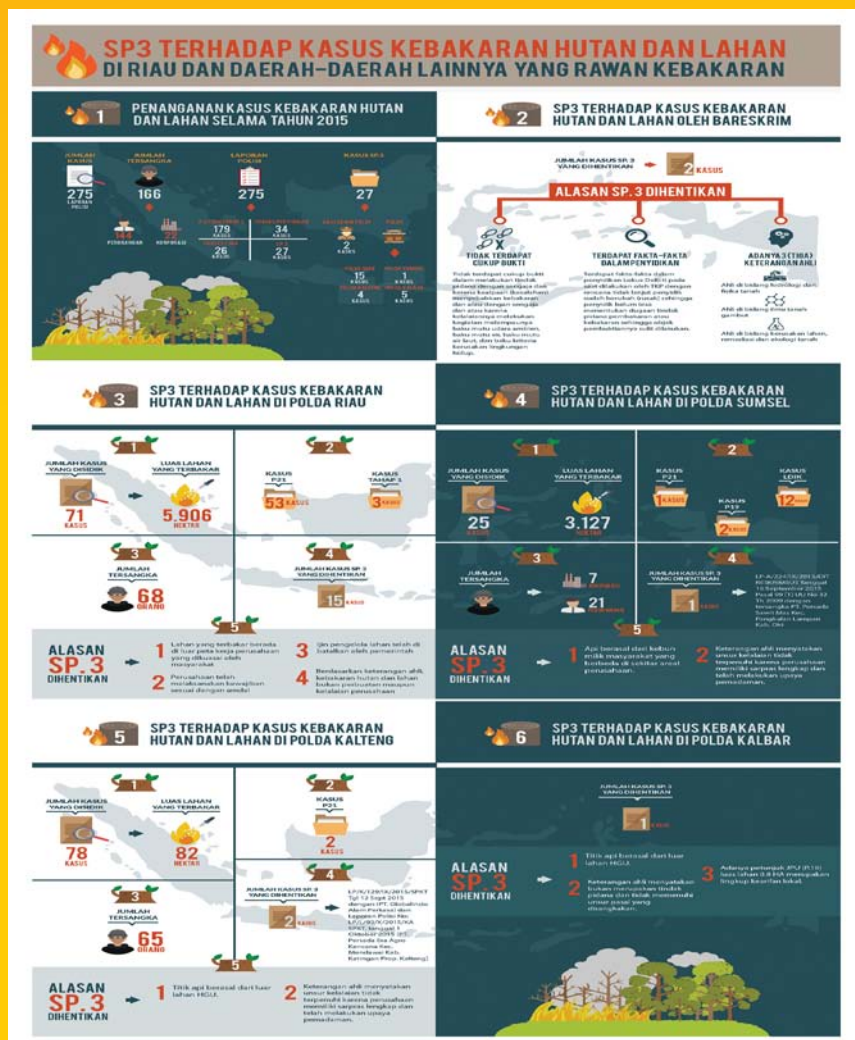
“Di saat itu menangani kasus

Meranti yang menangani kebetulan satu angkatan. Biasanya kalau Akpol datang, satu angkatan ada teman-teman satu letting datang temui dan tanyakan peristiwa Meranti. Saat makan di restoran ketemu pemilik restoran dan pengusaha. Say hello dan foto-foto,” tambah Jenderal bintang empat ini.

Meski demikian, beredarnya foto-foto ini tidak selesai begitu saja. Menurut Tito, telah ada Div Propam Mabes Polri yang turun tangan, mendalami kasus lebih lanjut. Pada pekan ini, pihaknya akan memanggil semua pihak terkait untuk dimintai keterangan.

“Kalau terjadi pelanggaran hukum atau internal, kami juga melakukan langkah-langkah. Hukum harus tegas,” ujar Tito. ■

(nt)



Sumber: Bahan Rapat Kapolri saat Raker dengan Komisi III DPR RI

grafis:tiara medsos



SP3 Yang Menuai Berbagai Kritikan

Kebakaran hutan dan lahan tahun ini kembali melanda empat kabupaten dan kota di Provinsi Riau di antaranya kawasan Teluk Bano Kecamatan Bangko, wilayah Pujud, dan Tanah Putih di kabupaten Rokan Hilir. Titik api juga ditemukan di Kabupaten Bengkalis, Pelalawan dan Kota Dumai. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat ada 173 titik panas di wilayah hutan Sumatera, hingga Senin (8/8). Ini menunjukkan peningkatan, karena sebelumnya hanya 161 titik saja. Dari jumlah titik panas di Sumatera, hot spot paling banyak berada di Provinsi Sumatera Selatan (Sumsel) dengan jumlah 51 titik dan Provinsi Bangka Belitung 40 titik.

Di Provinsi Sumatera Utara ada 30 titik, Lampung 10 titik dan Provinsi Riau 22 titik panas. Sisanya tersebar di empat provinsi lain yakni Bengkulu 4 titik, Jambi 2 titik, Sumatera Barat 10 titik dan Kepri 1 titik. Pada kasus kebakaran hutan selama Januari-Agustus tahun ini jajaran Kepolisian Daerah Riau telah menetapkan 79 tersangka pembakar lahan pada lahan seluas 380,485 hektare yang diduga sengaja dibakar para tersangka.



Anggota Komisi III DPR RI
Supratman Andi Agtas

foto : Jayadi/ww

Namun ditengah penanganan kasus baru tahun ini, terbetik kabar Polda Riau yang menangani kasus 18 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan pada tahun 2015 mengeluarkan Surat Penghentian Penyidikan atau SP3 kepada 15 perusahaan, 4 perusahaan disebabkan surat ijin sudah dicabut sebelum terjadi kebakaran dan 11 perusahaan dinyatakan tidak cukup

bukti karena terdapat area lahan sengketa dan hanya tiga kasus yang dinyatakan lengkap dan layak dilanjutkan ke proses selanjutnya. Dikeluarkannya SP3 menuai berbagai kritikan penggiat penyelamatan hutan, politisi Senayan, bahkan dikabarkan sudah diketahui Presiden Joko Widodo.

Saat rapat kerja dengan Kapolri, Komisi III DPR RI meminta keterangan Kapolri terkait penerbitan SP3 kebakaran hutan di Riau.

Anggota Komisi III dari Fraksi Gerindra Supratman Andi Agtas, berpandangan, SP3 merupakan tindakan hukum yang halal dilakukan Polri. Namun, ia menyarankan ketika mengambil keputusan untuk menghentikan perkara, kepolisian mesti melakukan komunikasi ke masyarakat. Setidaknya, Polda maupun Polri langsung mengeluarkan rilis. Langkah tersebut bakal mengurangi kecurigaan masyarakat ke Polri atas penerbitan SP3 kasus kebakaran hutan dan lahan.

Anggota Komisi III Aboe Bakar Alhabsy menambahkan, terhadap SP3, masyarakat dapat mempersoalkannya dengan menguji ke pengadilan melalui mekanisme praperadilan. Namun



Anggota Komisi III DPR RI
Aboe Bakar Alhabsy



Kepala Kepolisian Republik Indonesia
Jenderal Tito Karnavian

foto : dok

foto : Arief/iw

mestinya Polri dapat mengenakan asas tanggung jawab mutlak terhadap pemilik lahan. Kemudian, penyidik dapat langsung memboyong ke meja hijau. Soal terbuktinya akan menjadi ranah pengadilan.

Sebaliknya, bila membebankan pada ranah praperadilan, sama halnya masyarakat diberikan beban membuktikan di pengadilan. “Apakah ini tepat masyarakat dibebankan pembuktian di pengadilan, dan perusahaan dikasih SP3,” kata politisi PKS itu.

Sepanjang 2016, setidaknya Polri telah menerbitkan 15 SP3 terhadap kasus kebakaran hutan yang melibatkan korporasi. Untuk meminimalisir agar penerbitan SP3 tidak menimbulkan dugaan buruk dari masyarakat, maka sebelum penerbitan SP3 digelar perkara terlebih dahulu di Mabes Polri. “Semua kasus khusus kebakaran hutan dan lahan mau di SP3 harus digelar di mabes polri dahulu,” ujar Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

Menurutnya, Polri di bawah tampuk kepemimpinannya bakal membentuk Satuan Tugas (Satgas) yang tugasnya melakukan pengawasan ketika Polda yang bakal menerbitkan SP3 khusus penanganan kasus kebakaran hutan dan lahan. Satgas nantinya terdiri dari Inspektorat Pengawasan Umum (Itwasum), Divisi

Profesi dan Pengamanan Profesi (Propam) dan Divisi Hukum (Divkum). “Ini masalah nasional, jadi tidak boleh SP3 dilakukan sendiri, tetapi harus digelar dahulu di Mabes Polri terkait masalah korporasi,” ujarnya.

SP3 dalam penanganan kasus kebakaran hutan acapkali diterbitkan masing-masing Polda yang menangani. Penghentian penyidikan memang bukan ‘barang haram’ dalam penegakkan hukum. Sebaliknya, bila tidak ditemukan bukti yang cukup maka penghentian penyidikan harus dilakukan demi kepastian hukum. Hanya saja, kasus kebakaran hutan dan lahan menjadi perhatian masyarakat luas. Bahkan Presiden Jokowi turun

tangan ke lokasi tahun lalu.

Dampak kebakaran hutan cukup luas. Masyarakat tak dapat melaksanakan aktifitasnya akibat terganggu dengan kepulan asap. Kapolri sependapat dengan dampak besar yang diakibatkan kebakaran hutan dan lahan. Namun, berdasarkan keterangan ahli dan tidak ditemukan bukti yang cukup mengharuskan penyidik Polda Riau menghentikan penyidikan terhadap 15 perusahaan yang sudah berstatus di tingkat penyidikan.

Tito menjelaskan, setidaknya sepanjang Januari 2016 hingga Mei 2016, sebanyak 15 perusahaan yang penyidikannya dihentikan. Namun, ia menampik penghentian penyidikan terhadap 15 perusahaan dilakukan dapat satu waktu. “Jadi bukan dihentikan secara serempak. Tetapi dihentikan rentang waktu dari Januari sampai Mei 2016 sebanyak 15 kasus,” katanya.

Alasan dihentikan penyidikan antara lain pembakaran dilakukan di luar peta korporasi yang dilakukan oleh masyarakat. Kemudian, terbakar di areal milik perusahaan, namun perizinannya sudah dicabut. Sehingga tidak lagi menjadi pertanggungjawaban perusahaan. Hal lainnya, unsur kelalaian tidak terpenuhi karena memiliki peralatan pemadaman sendiri. Hal itu pun setelah mendapat keterangan dari ahli dalam penyidikan. ■

(nt)



Kebakaran hutan dan lahan di Riau

foto : antara

Pemerintah Gagal Atasi Kebakaran Hutan

Maraknya kasus kebakaran hutan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini menimbulkan keprihatinan mendalam. Pasalnya, hal tersebut tidak saja mengganggu aktivitas perekonomian namun juga mengganggu hubungan Indonesia dengan negara tetangga yang merasakan dampak asap yang ditimbulkan dari kebakaran hutan.

Menurut catatan Walhi, di tahun 2015 pembakaran hutan dan lahan menimbulkan titik api sebanyak 129.000 di seluruh Indonesia, merampas kemardekaan 40 juta penduduk atas udara yang bersih, mengakibatkan kematian 21 orang dan menghentikan aktivitas ekonomi sosial setidaknya 9 provinsi.

Dalam pandangan Walhi, penegakan hukum menjadi syarat mutlak untuk dapat dilaksanakan pemerintah secara masif, untuk menjalankan kewajibannya memberikan rasa aman dan perlindungan hak dan akses konstituenya terhadap lingkungan yang baik dan sehat.

Hanya saja dalam prosesnya, penterjemahan intruksi Presiden dalam pelaksanaan penegakan hukum masih jauh dari fungsinya sebagai panglima pemenuhan rasa adil bagi rakyat, justru kemudian menjadi bagian yang digunakan oleh korporasi menjalankan skenario penggunaan api untuk menggusur hak dan akses rakyat terhadap ruang dan sumber dayanya, dan menysasar pelaku utamanya adalah masyarakat.

Dari peran dan progres hukum terhadap pelaku kejahatan lingkungan hingga saat ini, Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan, Khalisah Khalid melihat tumpulnya fungsi hukum selain dipengaruhi oleh penyimpangan fungsi dan rendahnya kapasitas pada lembaga penegak hukum, juga dipengaruhi oleh terbentuknya celah penghentian



foto: ist

Kepala Departemen Kampanye dan Perluasan Jaringan WALHI
Khalisah Khalid

proses pada tahapan proses hukum karena proses penyelidikan, penyidikan hingga tuntutan terpisah pada lembaga yang berbeda.

“SP3 kasus tersangka 15 korporasi di Riau menunjukkan melemahnya komitmen negara melawan asap dan menjadi preseden yang buruk terhadap kinerja penegakan hukum untuk menuntaskan persoalan asap yang terjadi selama ini. SP3 kepada korporasi ini menunjukkan penegak hukum takluk kepada pemodal dan di mata publik sekali lagi terbukti bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas,” ujar Khalisah.

Lemahnya sistem, materi dan sumber daya penegakan hukum di Indonesia terhadap *white coral crime* dalam kasus karhutla terlihat gamblang pada arah penegakan hukum yang menysasar masyarakat kecil dan pengaburan proses terhadap korporasi dalam bentuk SP3 kasus kasus pembakaran lahan oleh perusahaan.

Proses SP3 massal oleh Polda Riau terhadap korporasi bukan kali ini saja, tahun 2008 yang lalu, SP3 juga diterbitkan terhadap 14 perusahaan pelaku *Illegal Logging* di Riau, bahkan 3 dari 14 perusahaan tersebut tahun 2015 ini menjadi bagian dari 15 Perusahaan yang mendapat SP3 dalam kasus pembakaran hutan.

“Penegakan hukum kepada korporasi yang sengaja membakar ataupun lahannya terbakar di Kalimantan Barat belum dilakukan dengan serius. Selain persoalan rendahnya kapasitas penegak hukum dalam menemukan alat bukti yang selalu saja menjadi alasan penghentian penyidikan dan penyelidikan kasus karhutla, tidak adanya komitmen penegakan hukum kepada korporasi adalah refleksi dari tidak adanya niat negara untuk memperbaiki tata kelola perkebunan kelapa sawit dan investasi skala besar berbasis hutan dan lahan,” jelas Khalisah.

Khalisah menjelaskan komitmen Presiden untuk *review* perizinan dan penegakan hukum tidak mampu diterjemahkan oleh kementerian terkait, sehingga Walhi mengusulkan penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya yang berkaitan dengan korporasi.

“Komitmen Presiden untuk *review* perizinan, penegakan hukum, pemulihan dan pengakuan wilayah kelola rakyat tidak mampu diterjemahkan secara benar oleh Kementerian dan Lembaga Negara terkait, termasuk aparat penegak hukum dan lembaga peradilan,” papar Khalisah.

“Dengan situasi seperti ini, kami mendesak Presiden memimpin langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya dalam upaya menjerat kejahatan korporasi sesuai dengan komitmennya,” sambungnya

Walhi juga menegaskan diperlukan sebuah terobosan hukum yang dapat menjangkau kejahatan korporasi yang selama ini justru menunggangi kekuasaan atau pengurus negara, termasuk aparat penegak hukum dan pengadilan.

“Hal yang lain, salah satu terobosan hukum antara lain melalui pengadilan lingkungan hidup, sebuah pengadilan yang khusus yang dibentuk dengan aparat penegak hukum dan peradilan yang memiliki perspektif lingkungan hidup dan kapasitas yang mumpuni dalam menangani tindak kejahatan korporasi, khususnya group-group perusahaan perkebunan baik sawit maupun HTI,” tutup Alien, sapaan akrabnya. ■

(hs)

Diduga Ada Kepentingan Pribadi Dalam Kebakaran Hutan

Kebakaran hutan tidak saja merugikan Indonesia secara materil, tetapi juga merugikan Indonesia dalam konteks hubungan internasional. Pasalnya beberapa negara juga mengalami kerugian yang ditimbulkan dari asap kebakaran hutan, seperti di Singapura dan Malaysia.

Pemerintah pun dituntut untuk dapat menyelesaikan persoalan ini dengan cepat, karena kerugiannya tidak saja dirasakan hari ini. Tetapi juga bisa berdampak bagi generasi selanjutnya jika populasi hutan di Indonesia terus berkurang akibat kebakaran.

“Banyak pihak yang perlu disadarkan dari kasus kebakaran hutan ini. Tak hanya masyarakat, pemerintah dan aparat penegak hukum harus dapat bertindak tegas dalam menangani tindak kejahatan kebakaran hutan,” tandas Anggota Komisi VII DPR RI Ari Yusnita, terkait kasus kebakaran hutan yang melanda Indonesia akhir-akhir ini serta penerbitan SP3 kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) oleh Polda Riau kepada Parlemen baru-baru ini.

Bagi Politisi Nasdem tersebut, maraknya kasus kebakaran hutan di Indonesia bukanlah hal yang aneh terjadi, karena sudah berlangsung terus menerus. Ia pun menduga bahwa ada unsur kesengajaan yang dilakukan oknum pemerintah dengan perusahaan tentu untuk kepentingan pribadi dibalik kebakaran hutan tersebut.

“Kebakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia memang bukan hal yang aneh lagi, kadang saya berfikir kalau kebakaran tersebut adalah adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh oknum pemerintah dengan perusahaan tertentu dengan maksud untuk kepentingan pribadi,” jelas Ari Yusnita.

Ketika ditanya mengenai peran pemerintah sejauh ini dalam menangani perkara kebakaran hutan, ia mengatakan, pemerintah sudah memiliki peran yang cukup serius dalam menghadapi masalah ini, hanya saja dirinya menyayangkan adanya



Anggota Komisi VII DPR RI Ari Yusnita

foto : Jaka/iw

oknum yang tidak bertanggung jawab yang melingkari kasus ini.

“Sebenarnya pemerintah cukup serius dalam menanggapi masalah ini, hanya saja kembali lagi dengan adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab dan mampu mematahkan tindakan tegas yang akan dilakukan oleh pihak berwajib,” terangnya.

Ia pun memiliki dugaan kuat ada pihak yang memiliki kuasa hingga akhirnya Polda Riau mengeluarkan SP3 Kahutla. Hal ini menurutnya harus ditindaklanjuti dibalik penerbitan SP3 tersebut, mengingat, kebakaran hutan memiliki dampak buruk terhadap ekosistem, iklim dan lingkungan.

Ia menegaskan jika perkara ini dihentikan maka pembakar hutan tidak merasa jera dan akan berdampak pada terus berulangnya kebakaran hutan di masa mendatang. “Dan jika ini dihentikan akan menyebabkan para pembakar hutan tidak merasa jera dan akan terus dan terus terjadi setiap tahunnya,” sambungnya.

KLHK Segera Atasi

Politisi daerah pemilihan Kalimantan Utara ini menjabarkan, pihaknya melalui Komisi VII DPR RI akan terus mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk segera mengatasi permasalahan hutan yang

selalu menjadi problem di Indonesia. “Komisi VII mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk dapat segera mengatasi permasalahan kebakaran hutan yang kerap terjadi di Indonesia tersebut,” ujarnya.

Dirinya mengusulkan agar KLHK dapat lebih gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak yang ditimbulkan jika kebakaran hutan terus terjadi serta aparat penegak hukum dapat memberikan hukuman yang maksimal agar memiliki dampak jera kepada orang yang melakukan kebakaran hutan tersebut.

“Seperti dengan cara mensosialisasikan kepada masyarakat setempat mengenai dampak yang akan terjadi jika kebakaran hutan terus terjadi dan juga menindak lanjuti untuk diberikan hukuman yang maksimal kepada orang-orang atau badan yang ada dibalik kebakaran hutan tersebut,” terangnya.

Ari menyadari sepenuhnya bahwa sebagai legislator yang berasal dari daerah pemilihan yang dikelilingi hutan dan sering terjadi kebakaran hutan, ia akan terus mencari penyebab dan solusi yang harus dilakukan untuk menghadapi kejahatan kebakaran hutan tersebut.

“Saya sebagai Anggota DPR RI yang mempunyai daerah pemilihan dengan wilayah yang di kelilingi hutan dan sering terjadi kebakaran hutan, akan terus mencari penyebab dan solusi juga hal yang harus dilakukan dalam menangani para penjahat-penjahat pembakar hutan ini yang kemudian akan saya paparkan dalam rapat kerja dengan Kementerian LHK,” terangnya.

Ia pun berharap kejahatan kebakaran ini dapat dihentikan, mengingat ini dapat mengganggu keberlangsungan masa depan Indonesia. Karena jika populasi hutan terus menimpis akan berdampak pada kerusakan lingkungan yang dirasakan langsung seperti hilang dan rusaknya habitat satwa, meningkatkan emisi gas rumah kaca penyebab perubahan iklim, mengganggu kesehatan manusia dan merugikan negara secara ekonomi. ■ (hs/mp)

SP3 15 Perusahaan adalah Bukti Pemerintah Tidak Fokus Tangani Karhutla

Indonesia sebagai negara yang memiliki komposisi hutan yang cukup besar di dunia tentu menjadi satu kelebihan yang tidak dimiliki oleh setiap negara di dunia. Hal ini menjadikan tantangan bagi Indonesia untuk merawat hutan dan melestarikannya agar dapat berkelanjutan di kemudian hari.

Seringnya kasus kebakaran hutan di sejumlah daerah menyisakan beragam pertanyaan terkait peran dan antisipasi pemerintah dalam menangani persoalan hutan ini. Terlebih, Kepolisian Daerah Riau telah mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap 15 perusahaan yang diduga melakukan pembakaran lahan pada 2015.

Seperti diketahui, Kepolisian Daerah Riau menghentikan penyidikan perkara 15 perusahaan yang diduga terlibat pembakaran lahan pada 2015. SP3 diterbitkan dengan alasan penyidik tidak memiliki bukti yang kuat. Yakni lantaran, lokasi kebakaran berada di lahan konsesi perusahaan yang sedang dalam sengketa dengan masyarakat

Adapun 15 perusahaan itu adalah



Anggota Komisi VII DPR RI
Rofi Munawar

foto: Jaka/iw

PT Bina Duta Laksana, PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia, PT Ruas Utama Jaya, PT Suntara Gajah Pati, PT Dexter Perkasa Industri, PT Siak Raya Timber, dan PT Sumatera Riang Lestari. Lainnya adalah PT Bukit Raya Pelalawan, PT Hutani Sola Lestari, KUD Bina Jaya Langgam, PT Rimba Lazuardi, PT Partawira, PT Alam Sari Lestari, PT PAN United, dan PT Riau Jaya Utama.

Anggota Komisi VII DPR RI Rofi Munawar memberikan komentar terkait hal itu. Menurutnya terbitnya SP3 ini menunjukkan Polda Riau adalah bukti bahwa penanganan kebakaran hutan tidak fokus pada pencegahan dan penindakan tetapi lebih karena reaktif situasional.

Selain itu ia pun menyoroti kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) yang belum optimal mengumpulkan bukti-bukti penyebab kebakaran hutan dan memonitoring perkembangan tuntutan terhadap pelaku kebakaran hutan tersebut. “Jika kasus ini dimonitoring dengan baik dan dikumpulkan bukti-bukti yang memadai dalam prosesnya, maka tidak perlu ada keterkejutan dari Pemerintah, Presiden maupun usaha tiba-tiba menemukan proses novum baru dalam penyelidikan,” ujarnya ketika ditemui di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Politisi PKS ini mengatakan masyarakat melihat peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi pada 2015 hanyalah kejadian alam biasa, sehingga tidak perlu mendapatkan perhatian lebih. Padahal kasus tersebut memiliki dampak yang sangat luas. “Namun sayang, publik seakan menafsirkan bahwa peristiwa Karhutla yang berdampak hebat pada tahun 2015 ternyata hanyalah kejadian alam biasa dan bukan tindakan pelanggaran korporasi,” jelas Rofi.

Tak heran jika kebakaran hutan tersebut berdampak pada polusi udara, gangguan penyakit dan asap yang mengudara hingga negara tetangga. “Padahal kejadian kebakaran hutan dan



Jika kasus ini dimonitoring dengan baik dan dikumpulkan bukti-bukti yang memadai dalam prosesnya, maka tidak perlu ada keterkejutan dari Pemerintah, Presiden maupun usaha tiba-tiba menemukan proses novum baru dalam penyelidikan



lahan terjadi di area hutan produksi dan terjadi sangat masif yang berdampak pada polusi udara, gangguan penyakit dan gangguan asap hingga negara lain,” sambung Rofi.

Langkah Hukum Belum Menjadi Perhatian Pemerintah

Legislator dapil Jawa Timur VII ini pun menegaskan pemerintah belum memperhatikan tindakan dan penindakan hukum belum menjadi perhatian utama dalam penanganan kebakaran hutan. “Tindakan Pencegahan dan Penindakan belum menjadi perhatian utama dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan,” jelas Rofi.

Ia pun melihat kini pemerintah lebih terjebak pada pemadaman saat kejadian jika dibandingkan untuk mengusut tuntas kebakaran yang terjadi setiap tahun. “Pemerintah selama ini lebih cenderung terjebak kepada pemadaman saat kejadian dibandingkan mengusut tuntas kebakaran yang kerap terjadi setiap tahun” tutur legislator asal Jawa Timur ini.

Rofi juga menyinggung soal pemberitaan mengenai pertemuan pejabat kepolisian Riau dengan pengusaha hutan. Ia men mengatakan agar hal itu dijadikan pelajaran bagi penegak hukum agar mampu menempatkan diri secara profesional dalam berinteraksi.

“Mengenai pertemuan pejabat Polda Riau dengan pengusaha hutan, sebaiknya hal itu dijadikan pelajaran agar para penegak hukum harus mampu menempatkan diri dengan profesional dan proporsional dalam berinteraksi, terlebih jika pihak-pihak atau perusahaan tersebut ternyata telah ditetapkan melakukan pelanggaran,” jelas Rofi.

Sebagaimana diketahui, kebakaran hutan terjadi di Riau pada Juli tahun lalu. Dalam kebakaran tersebut ditemukan unsur kesengajaan yang akhirnya menyeret 15 perusahaan serta 25 orang ke meja hijau. Namun, polisi menerbitkan SP3 pada Januari 2015 atau tiga bulan setelah penetapan tersangka korporasi.

Perlu Tindakan Preventif Tangani Karhutla

Ia pun meminta pemerintah untuk lebih bertindak tegas agar melakukan tindakan preventif guna mencegah melebarnya kebakaran hutan di kemudian hari. Karena jika berlangsung secara terus-menerus akan merugikan Indonesia untuk waktu jangka panjang.

“Saya meminta pemerintah bertindak segera untuk mencegah melebarnya kebakaran yang terjadi di beberapa daerah di Indonesia.,” tegas Rofi.

Terakhir, pada kebakaran yang terjadi di Provinsi Riau sudah merambah ke Kota Pekanbaru. “Kebakaran terjadi di daerah Air Hitam, Kecamatan Payung Sekaki, Pekanbaru. Daerah yang terbakar tersebut adalah lahan milik warga,” papar Rofi.

Ia pun menegaskan agar mitigasi dini dan respon cepat petugas akan sangat menentukan pencegahan kebakaran hutan. “Mitigasi dini dan respon cepat petugas akan sangat menentukan pencegahan kebakaran hutan serta lahan,” terangnya.

Lulusan LIPIA ini pun meminta kepada aparat keamanan dan Pemda dapat segera melakukan pemadaman kebakaran hutan dengan melakukan

inventarisasi dan mobilisasi sumber daya yang ada jika dikemudian hari terjadi lagi kebakaran hutan. “Saya meminta aparat keamanan dan Pemerintah Daerah (Pemda) berpartisipasi untuk segera melakukan pemadaman kebakaran hutan dengan inventarisasi dan mobilisasi sumber daya yang ada,” tuturnya.

Rofi pun menjelaskan bahwa seringkali penyebab kebakaran hutan adalah faktor manusia. “Seringkali penyebab utama kebakaran hutan adalah faktor manusia, kegiatan perladangan, pembukaan hutan tanaman industri dan perkebunan,” jelasnya.

Dalam kasus kebakaran hutan, Rofi menyoroti Provinsi Riau dan daerah Sumatera yang hampir terjadi kebakaran di setiap tahunnya. Ia pun kembali mendesak agar pemerintah memiliki langkah antisipatif lebih maksimal, mengingat bulan September akan memasuki musim kemarau.

“Provinsi Riau dan beberapa daerah di Sumatera hampir setiap tahun mengalami kebakaran hutan, perlu perhatian yang maksimal dari pemerintah. Terlebih diprediksi pada bulan September akan menjadi puncak kemarau,” pungkas Rofi. ■

(hs)

15 Perusahaan yang Diduga Terlibat Pembakaran Lahan

- PT Bina Duta Laksana**
- PT Perawang Sukses Perkasa Indonesia**
- PT Ruas Utama Jaya**
- PT Suntara Gajah Pati**
- PT Dexter Perkasa Industri**
- PT Siak Raya Timber**
- PT Sumatera Riang Lestari**
- PT Bukit Raya Pelalawan**
- PT Hutani Sola Lestari**
- KUD Bina Jaya Langgam**
- PT Rimba Lazuardi**
- PT Partawira**
- PT Alam Sari Lestari**
- PT PAN United**
- PT Riau Jaya Utama**

Presiden Harus Konsisten Tindak Tegas Penjahat Lingkungan

Pembakaran lahan dan hutan sudah berlangsung hampir setiap tahun selama puluhan tahun, kerugian yang ditimbulkanpun sudah tak terhitung dan masif. Masalah kesehatan masyarakat akibat asap yang menyebar dalam jangka waktu panjang, akan menjadi masalah kesehatan masyarakat yang serius.

Kasus pembakaran lahan ini telah menyebabkan Indonesia kehilangan hutan alam yang sangat luas. Itu berarti kita kehilangan kekayaan plasma nutfah, berbagai jenis flora dan fauna, sumber daya air, dan sumber produksi oksigen.

Padahal ada teknologi untuk membuka hutan tanpa api, meskipun membutuhkan investasi lebih tinggi. Kalaupun menggunakan api, banyak pakar yang tahu bagaimana hal itu dilakukan tanpa menimbulkan asap yang masif, dan api bisa dikendalikan. Teknologi forensik untuk penyidikan kasus pembakaran hutan tampaknya juga berjalan di tempat. SP3 yang dikeluarkan sebagai tanda bahwa tidak ada perubahan yang lebih baik tentang masalah ini di kalangan penyidik.

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin meminta kepada Presiden untuk bersikap tegas terhadap pelaku pembakar hutan dan lahan. Akmal menilai, pihak istana mulai mengendor sikapnya terhadap kasus kebakaran hutan dan lahan, hal itu terlihat dari



Anggota Komisi IV DPR RI
Andi Akmal Pasluddin

polemik kasus karhutla di Riau.

Ia juga mengatakan, beredarnya foto yang menampilkan pamen Polda Riau bersama pengusaha perkebunan sawit telah menimbulkan banyak arti dan penafsiran. Meskipun hal tersebut telah disangkal oleh Divisi Provesi dan Pengamanan (Divpropam) Mabes Polri. Namun berbagai penyangkalan itu terkesan membuat semakin buruknya kinerja pemerintah terhadap penanganan kejahatan lingkungan.

Akmal menyarankan sebaiknya pemerintah segera mengubah sikapnya, karena setiap peristiwa yang terjadi telah terekam secara baik dalam ingatan masyarakat. dengan kemajuan teknologi yang ada, sangat mudah untuk membuka

kembali arsip kejadian masa lalu.

“Saat ini Polri malah mempersilahkan masyarakat untuk mengajukan praperadilan terhadap SP3 perusahaan pembakar hutan dan lahan. Ini merupakan sikap yang buruk dari penegak hukum kita, dimana melempar tanggung jawab yang seharusnya dipikulnya kepada masyarakat,” tandas Akmal.

Kasus SP3 perusahaan pembakar hutan yang mulai mengemuka kembali akan menjadi pertarungan presiden RI, dimana tahun 2015 telah menyatakan ketegasannya untuk memberantas pelaku pembakar hutan dan lahan. Saat ini apabila pihak istana masih berdiam diri terhadap kasus SP3 karhutla tersebut, maka akan menunjukkan kepada masyarakat bahwa presiden mulai tidak konsisten dan terkesan tebang pilih terhadap menghadapi sebuah permasalahan.

Kementerian LHK yang selama ini menjadi mitra kerja Komisi IV DPR RI, lanjut Akmal, sudah melakukan berbagai upaya untuk mengendalikan kebakaran hutan dan lahan. Namun segala upaya yang dilakukan kementerian LHK akan menjadi sia-sia apabila tidak didukung oleh sikap tegas lembaga penegak hukum yang berwenang, apalagi jika Presiden hanya bersikap diam ketika ada masalah yang menyangkut hajat hidup orang banyak.

“Upaya Kepolisian untuk membuat aturan bahwa SP3 hanya dilakukan oleh Mabes Polri dan tidak berlaku di Polda serta Polres sudah sangat bagus, terutama pada kasus-kasus besar yang melibatkan



foto : Hamdi/iw



Saya berharap, keterlibatan KPK untuk ikut turun tangan menangani kasus Karhutla dapat memberikan dampak yang terbaik bagi negara dan masyarakat.



kerugian masyarakat dan negara,” ujarnya.

Kasus kejahatan pembakaran hutan dan lahan ini bukan kejahatan biasa, tegas politisi F-PKS dapil Sulsel II itu. Dampak yang ditimbulkan mampu membunuh makhluk hidup termasuk manusia pada sebuah kawasan. Kerugiannya bukan hanya dirasakan oleh bangsa Indonesia saja, melainkan negara tetangga pun ikut merasakannya, sehingga hal tersebut menjadi bahan cibiran.

Bank Dunia mencatat, bahwa selama tahun 2015, kebakaran hutan dan lahan di Indonesia memberikan kerugian sebesar 221 Triliun rupiah dengan total luas lahan terbakar sekitar 600 ribu hektar. BNPB mencatat, ada 503.874 jiwa menderita ISPA (infeksi saluran pernapasan akut) sejak juli hingga oktober 2015 di 6 propinsi. Di kalimantan Timur saja, dampak kerugian mencapai 37 triliun rupiah.

Padahal sepanjang tahun 2014 dari data yang dihimpun UPTD PKHL, kebakaran hutan dan lahan

terjadi seluas sekitar 40 ribu hektar. Kenaikan hingga 15 kali lipat kebakaran tahun 2015 dibanding 2014 menjadikan Karhutla tahun 2015 merupakan kejadian terburuk sepanjang 20 tahun terakhir.

Saat ini KPK sudah mulai mendeklarasikan akan menangani kasus karhutla, KPK mengklaim hal ini sudah sesuai saran presiden dan sudah mulai konsultasi dengan Kementerian LHK.

“Saya berharap, keterlibatan KPK untuk ikut turun tangan menangani kasus karhutla dapat memberikan dampak yang terbaik bagi negara dan masyarakat. Semoga dengan terlibatnya KPK pada karhutla ini, citra penegak hukum dapat diperbaiki akibat terlanjur buruknya citra kepolisian pada foto bersama aparat dengan penjahat lingkungan”, pungkask Andi Akmal Pasluddin. ■

(dep)



foto : Hamdi/iw

Jadikan Masyarakat Adat Sebagai Garda Terdepan Atasi Karhutla

Kebakaran hutan dan lahan di Indonesia tahun 2015 merupakan salah satu yang terparah sepanjang sejarah, namun hanya dalam hitungan bulan kebakaran hutan kembali terjadi. Antara Juni hingga Oktober 2015, lebih dari 100.000 kebakaran melahap jutaan hektar hutan di Indonesia. Akibat dari kebakaran hutan dan lahan juga telah menyebabkan korban jiwa, dan berdampak ekonomi yang sangat tinggi sekali.

Kebakaran hutan dan lahan seolah-olah menjadi acara tahunan bagi para petani dan perusahaan yang ingin membuka hutan dan lahan gambut demi bubur kayu, minyak sawit, karet, atau peternakan skala kecil.

Tahun lalu, sebagian Indonesia dan sejumlah negara di Asia Tenggara diselimuti asap selama berminggu-minggu. Sebanyak setengah juta orang dirawat di rumah sakit akibat asap kala itu. Diperkirakan pula bahwa selama lima bulan tersebut, sekitar 1,7 miliar

ton karbon dilepaskan ke atmosfer.

Menanggapi permasalahan tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengatakan, Diluar faktor alam, yang paling penting adalah dilapangan banyak fakta yang menjelaskan bahwa kebakaran besar hutan itu terjadi karena ulah perusahaan.

Untuk pemanfaatan hutan yang luas, pemerintah Indonesia memberikan hak konsesi kepada beberapa perusahaan besar dan petani skala kecil. Pada era 1980-an, membakar hutan untuk membuka lahan pertanian diperbolehkan pemerintah, Akan tetapi selama dua dekade terakhir, hanya pembakaran di bawah dua hektar lahan yang diperbolehkan sesuai yang diatur oleh Undang-undang.

Namun seperti tidak kehabisan akal, hal tersebut tetap bisa dijadikan celah bagi perusahaan-perusahaan besar. Mereka diduga membayar petani-petani kecil untuk memanfaatkan lahan konsesi dan memintanya untuk membuka lahan tersebut.

“Menteri LHK harus mempunyai bukti yang kuat, jangan sampai kalah di pengadilan. Tuntutan hukum harus dibuat dengan cermat agar tidak terkesan sembarangan dan menjadi sebuah pencitraan semata. Sanksi administrasi berupa pembekuan hanya bersifat sementara, yang paling tepat adalah cabut izin dan berikan sanksi pidana.” tegas Daniel.

Daniel juga menyatakan, bahwa peraturan perundangan yang mengatur masalah pembukaan lahan hutan dengan cara pembakaran harus di revisi. Sebab seakan-akan petani tradisional yang dijadikan kambing hitam dan dituduh sebagai penyebab terjadinya kebakaran hutan. Padahal kebakaran hutan yang terjadi dalam skala luas itu, diperkirakan sulit kalau hanya dilakukan oleh petani, tetapi lebih dimungkinkan dilakukan oleh suatu perusahaan.

“Peraturan tersebut harus direvisi, sehingga siapapun tidak boleh membuka lahan dengan melakukan

foto : Naefurodji/iw



Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan

Masyarakat adat lah yang paling mengerti kondisi yang terjadi dilapangan. Dengan dilibatkannya peran serta masyarakat adat, maka mereka dapat ikut mengontrol dan mencegah terjadinya pembukaan lahan dengan cara membakar.





foto : lpi.go.id

pembakaran hutan, termasuk juga oleh anggota masyarakat,” ujar politisi F-PKB itu.

Meskipun penerapan sistem hukum yang demikian disadarinya akan berindikasi menimbulkan gejala di masyarakat adat setempat, karena merasa keberatan dengan aturan itu. Masyarakat tradisional merasa berladang dan membuka lahan dengan cara membakar sudah menjadi tradisi turun temurun dan merupakan kearifan lokal bagi mereka.

“Membuka lahan dengan cara tidak membakar hutan, memerlukan biaya yang sangat tinggi, dan masyarakat merasa tidak sanggup. Ada dua alternatif pilihan yang bisa dilakukan, bila pemerintah mencabut peraturan itu, maka pemerintah juga harus memberikan jaminan bantuan kepada para petani tradisional agar tetap bisa membuka lahan dengan biaya murah. Baik berupa bantuan alat, program, atau apapun,” jelasnya.

Tetapi kalau peraturan tersebut tidak dicabut, lanjut daniel, berarti pemerintah harus melibatkan dan memberdayakan masyarakat adat setempat sebagai garda terdepan dalam menjaga hutan dari kebakaran, sekaligus menjaga kelestarian hutan dari pencurian.

“Tidak dibenarkan membuat suatu larangan, tanpa ada solusi dari permasalahannya,” ucapnya.

Menurut Daniel, masyarakat adat lah yang paling mengerti kondisi yang terjadi dilapangan. Dengan dilibatkannya peran serta masyarakat adat, maka mereka dapat ikut mengontrol dan mencegah terjadinya pembukaan lahan dengan cara membakar.

Selain itu, harus ada program pelatihan bagi pemadam kebakaran di tingkat daerah agar dapat lebih mampu bereaksi dengan cepat dalam menangani kebakaran hutan yang terjadi, termasuk juga menyediakan sarana dan prasarana untuk pemadamannya. Sebab kalau jumlah personilnya cukup, tetapi alat untuk pemadamannya tidak tersedia, maka tidak akan terdukung dan sulit mendapatkan hasil yang maksimal.

“Dua hal itu harus didorong, yakni mendekati ahli beserta alat yang diperlukannya di daerah yang rawan mengalami kebakaran,” paparnya.

Komisi IV DPR RI bersikap keras terhadap masalah kebakaran hutan ini, pelaku tindak pidana pembakar hutan harus ditindak secara maksimal. Dewan juga pertanyakan apakah Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK)

serius atau tidak dalam menangani masalah ini, atau Cuma bersifat akal-akalan guna pencitraan saja.

“Hal ini menjadi tugas Menteri Kehutanan sesuai tupoksinya untuk melakukan penuntutan dengan serius dan dikawal dengan baik, serta memiliki bukti-bukti yang kuat. Begitu pula dengan jaksa penuntut umum dan hakim yang menangani perkara harus menguasai tentang masalah itu,” kata Daniel.

Meskipun demikian, Komisi IV tetap bersikap obyektif dalam melihat berbagai kemungkinan yang terjadi, bisa saja memang ada perusahaan yang benar-benar tidak bersalah dan hal itu bisa dimaklumi jika dikeluarkan SP3.

“Menjadi pertanyaan besar bagi Anggota Dewan di Komisi IV, apakah SP3 yang dikeluarkan oleh Polda Riau itu sudah benar-benar melalui penyelidikan serius dan memiliki pembuktian yang akurat?,” tanyanya.

Daniel Johan sepatkat dengan pernyataan, bahwa terbitnya SP3 oleh Polda Riau terhadap 15 perusahaan yang menjadi tersangka pembakar hutan dan lahan pada tahun 2015 lalu, menunjukkan penanganan masalah karhutla tidak fokus pada pencegahan dan penindakan, namun lebih pada reaktif situasional. ■

(dep)

Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan



Humphery Wangke

foto : dokpri

Belum habis keheranan masyarakat dengan keputusan pengadilan tersebut, kini masyarakat dikejutkan lagi dengan keputusan Polda Riau yang mengeluarkan SP3 terhadap 15 perusahaan yang diduga terlibat dalam pembakaran hutan di Provinsi Riau pada bulan Juli tahun 2016 lalu. Dua keputusan ini memperlihatkan bahwa banyak kebijakan pemerintah pusat yang belum didukung sepenuhnya oleh pemerintah daerah maupun oleh aparat penegak hukum.

Apa yang terjadi di Pengadilan Negeri Palembang dan Polda Riau menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah Presiden Joko Widodo. Program ke-6 Nawacita yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia akan sulit tercapai jika kebakaran hutan dan lahan terus terjadi setiap tahun tanpa dapat dikendalikan. Demikian juga dengan komitmen Presiden Joko Widodo kepada masyarakat internasional yang diucapkannya dalam Pertemuan COP 21 di Paris Desember 2015 bahwa Indonesia akan menjadi bagian dari solusi perubahan iklim dengan menurunkan emisi karbon Indonesia sampai tingkat 29 persen pada tahun 2030, menjadi pertanyaan.

Tulisan ini secara ringkas akan menganalisis penyelesaian seperti apa yang bisa mencegah dan menanggulangi kebakaran hutan dan lahan di Indonesia.

Dampak Kebakaran Hutan

Sudah banyak diketahui orang bahwa kebakaran hutan dan lahan akan sangat merugikan, bukan hanya bagi masyarakat di lokasi kebakaran tetapi juga masyarakat lintas batas bahkan lintas negara.

Kerugian yang paling nyata adalah hilangnya habitat flora dan fauna yang hidup di dalamnya yang selama ini menjadi ikon keekaragaman hayati Indonesia. Sejumlah spesies yang

dilindungi seperti orangutan, harimau, beruang madu, bekantan dan owa-owa terancam punah karena hutan dan gambut yang sudah terbakar tidak mungkin dapat dipulihkan kembali seperti semula.

Kerugian lainnya adalah meningkatkan emisi karbon dioksida Indonesia. Hutan tropis basah seperti di Indonesia merupakan tempat yang ideal untuk menyerap dan menyimpan gas CO₂. Apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan, maka CO₂ yang tersimpan di dalamnya akan terlepas ke udara dan menyumbang terjadinya perubahan iklim. Kebakaran hutan dan lahan bukan hanya menyebabkan terjadinya perubahan iklim tetapi juga menyebarkan penyakit infeksi saluran pernapasan (ISPA) yang dapat mengakibatkan kematian. Kebakaran hutan juga sangat merugikan negara secara ekonomi karena banyak aktifitas yang terhenti seperti penerbangan, sekolah dan perdagangan.

Kebakaran hutan dan lahan juga berpengaruh terhadap hubungan baik Indonesia dengan Malaysia dan Singapura. Pada bulan Juli 2016, kedua negara tetangga ini sudah mengeluarkan ancaman jika Indonesia tidak mampu menanggulangi kabut asap maka mereka akan membawa Indonesia ke pengadilan internasional. Padahal kebakaran hutan seringkali melibatkan perusahaan dari negara

itu yang membuka usaha perkebunan di Indonesia.

Pelibatan Masyarakat, pemerintah kabupaten dan korporasi

Kebakaran hutan dan lahan terjadi karena dua hal yaitu karena alam dan manusia. Siapapun penyebabnya, kebakaran hutan terbukti sangat merugikan. Kebakaran hutan yang terjadi tahun 2015 telah merugikan Indonesia hampir 200 trilyun rupiah. Karena itu yang perlu dilakukan saat ini adalah bagaimana mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Pencegahan kebakaran hutan dengan melibatkan masyarakat sebenarnya bukanlah suatu hal yang rumit. Pada dasarnya masyarakat membakar hutan untuk kesejahteraan. Masyarakat membakar hutan untuk mendapatkan lahan pertanian dan sebagian hasil pembakaran digunakan untuk pupuk. Untuk melibatkan masyarakat ini maka posisi kepala desa menjadi penting karena kepala desa adalah orang yang paling tahu siapa warganya yang biasa membakar hutan dan lahan.

Pelibatan kepala desa ini dimulai sejak dari perencanaan pengelolaan lahan. Membersihkan lahan dengan cara membakar sudah menjadi budaya masyarakat. Masyarakat tidak mempunyai cukup uang untuk membersihkan lahan tanpa membakar mengingat biaya yang diperlukan tidak kecil. Biaya untuk *land clearing* sebenarnya tidak terlalu besar dan tidak harus dilakukan dengan membakar. Kepala desa diberikan dana yang nanti dibagikan ke masyarakat untuk membersihkan lahan tetapi tanpa dibakar. Seandainya harus membakar, maka hal itu dapat dilakukan pada musim hujan. Kalau masyarakat memerlukan bibit dan pupuk maka

tugas pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk memenuhinya.

Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan, apalagi untuk kepentingan pengurangan emisi karbon, sangat dipengaruhi oleh komitmen pemerintah pusat. Pemerintah kabupaten hanya mengikuti apa yang diinginkan oleh pemerintah pusat. Karena itu komitmen harus dijalankan oleh pemerintah pusat dengan didukung



Masyarakat tidak mempunyai cukup uang untuk membersihkan lahan tanpa membakar mengingat biaya yang diperlukan tidak kecil. Biaya untuk *land clearing* sebenarnya tidak terlalu besar dan tidak harus dilakukan dengan membakar. Kepala desa diberikan dana yang nanti dibagikan ke masyarakat untuk membersihkan lahan tetapi tanpa dibakar.



oleh pemerintah daerah. Sedangkan pengawasannya oleh DPR RI.

Komitmen masyarakat untuk mencegah terjadinya kebakaran hutan dapat dibuktikan lebih jauh dengan melibatkan mereka dalam masyarakat siaga api, masyarakat peduli api atau masyarakat brigade api. Namun pembentukan kesatuan ini memerlukan dukungan pemerintah daerah dan korporasi terutama untuk sisi pendanaan dan teknis pelaksanaan. Dengan demikian baik masyarakat, korporasi dan pemerintah kabupaten sama-sama mempunyai komitmen untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan dan lahan.

Kesimpulan

Baik pemerintah pusat, kabupaten, masyarakat, korporasi dan LSM mempunyai tanggungjawab untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kebakaran hutan. Sinergi diantara para stakeholder ini dimulai sejak dari tingkat perencanaan agar mampu mencegah terjadinya kebakaran hutan. Untuk tingkat masyarakat, peran kepala desa menjadi penentu keberhasilan karena sangat mengetahui siapa anggota masyarakatnya yang mempunyai kebiasaan membakar lahan. Sementara pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dengan memberikan bukti-bukti yang dibutuhkan untuk penuntutan terhadap korporasi yang melakukan pelanggaran. Untuk ini, kebijakan pemerintah pusat harus mampu mereduksi kecerobohan para *stakeholder* seperti pemerintah kabupaten, LSM, perusahaan, dan masyarakat agar kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi.

Humphery Wangke, Peneliti pada Pusat Penelitian BKD DPRRI

Penyelenggaraan Ibadah Haji Lebih Baik dan Perlu Terus Ditingkatkan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) sebagai wakil rakyat memiliki tanggung jawab memastikan pelaksanaan pelayanan publik oleh pemerintah terhadap jamaah haji Indonesia. DPR RI melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan ibadah haji hingga Mekkah dan Madinah.



foto : dokpri

Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Komisi VIII DPR RI melakukan pemantauan fasilitas pada pelaksanaan Ibadah Haji 2016

Ketua DPR RI Ade Komarudin meminta Pemerintah memperbaiki fasilitas Jemaah haji reguler. Tenda jemaah haji reguler dinilai kurang layak dan jarak maktab jemaah juga terlalu jauh. Inilah salah satu yang dipantau Akom saat meninjau pelaksanaan haji di Arab Saudi.

Akom berada di Arab Saudi bersama Pimpinan Komisi VIII DPR RI untuk melakukan pengawasan atas pelaksanaan haji tahun ini. Pertemuan juga secara intens dilakukan dengan seluruh anggota tim pengawas haji. Namun, secara umum Akom menilai, pelaksanaan haji tahun 2016 ini ada peningkatan dibanding tahun sebelumnya.

“Jarak maktab jemaah reguler

terlalu jauh, lebih dari 10 km untuk pulang pergi, juga tanpa persediaan air minum yang cukup,” kata Akom saat berada di Mina, Selasa malam (13/9/2016). Kesehatan Jemaah haji Indonesia juga perlu mendapat perhatian serius pemerintah. Apalagi, rasio dokter yang ada tidak memadai untuk menangani seluruh jemaah yang terganggu kesehatannya.

Catatan penting lainnya dari pelaksanaan haji adalah perlu sinergitas antara Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, TNI/Polri, dan instansi terkait lainnya untuk bekerja bersama dalam meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji Indonesia. “Yang terpenting lagi, perlu adanya peningkatan peran diplomatis kita dengan Pemerintah Kerajaan Arab

Saudi,” harap Akom.

Pada bagian lain, Akom juga mengapresiasi usaha Presiden Joko Widodo untuk meminta tambahan kuota haji kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dengan memanfaatkan kuota tak terpakai dari negara tetangga untuk diberikan kepada Indonesia. Ini suatu terobosan yang tepat untuk keluar dari dilema daftar tunggu calon haji yang sangat panjang di Indonesia.

“Saya mengapresiasi usaha Presiden Jokowi yang telah berhasil memperjuangkan penambahan kuota haji Indonesia di tahun berikutnya. Ini patut dihargai,” puji Akom.

Panjar Sewa Gedung

Hal senada disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI Firmandez,

Pemerintah melalui Kementerian Agama diminta untuk mengalokasikan anggaran panjar sewa gedung untuk memaksimalkan pelayanan jamaah haji di Arab Saudi. Selama ini jamaah Indonesia terpencah di beberapa lokasi, tenda pemondokan yang digunakan juga ada yang kurang representatif alias di bawah standar.

“Sangat disayangkan ada tenda untuk jamaah yang kurang layak. Pemerintah harus memikirkan sewa gedung dalam jangka panjang. Pemerintah harus mengusulkan anggaran itu untuk haji tahun depan, agar jamaah tidak terpencah dan bisa terkonsentrasi di satu wilayah,” harap Firmandez, usai melakukan kunjungan kerja pengawasan penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi.

Politisi Golkar asal Aceh ini mengingatkan, sewa gedung juga harus diupayakan lebih awal, karena dikhawatirkan kalau lambat bergerak maka akan disewa oleh negara lain. “Makanya saya katakan sewa gedung harus dalam jangka waktu lama, ikat kontrak setiap tahun haji, jangan hanya jangka pendek,” lanjut Firmandez.

Bila pemerintah melalui panitia penyelenggaraan ibadah haji bisa melakukan hal itu, maka persoalan pemondokan bagi jamaah bisa diatasi. “Jadi, jangan setiap tahun haji penyelenggaraan haji untuk jamaah Indonesia selalu berkutat pada masalah yang itu-itu saja,” harapnya.

CSR untuk Layanan Haji

Bank penerima setoran pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) diharapkan bisa menyalurkan dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) untuk peningkatan pelayanan haji.

Firmandez menilai, bank penerima setoran BPIH mendapat banyak keuntungan dari pelunasan ibadah haji oleh calon jamaah di seluruh Indonesia, karena itu sudah sepatutnya dana CSR bank-bank tersebut diarahkan ke sektor perbaikan layanan haji.

“Perbankan harus lebih berkontribusi, katakanlah nanti misalnya bank penerima setoran pelunasan



Ketua DPR RI Ade Komarudin bersama Komisi VIII DPR RI meninjau tenda wukuf di Arafah

foto : dokpri

BPIH membantu melalui dana CSR biaya manasik haji, konsumsi jamaah di Arab Saudi, transportasi layanan jamaah dan lain sebagainya. Ini akan sangat membantu, malah dengan demikian BPIH akan lebih murah, karena ada biaya-biaya tertentu yang tidak lagi ditanggung jamaah karena sudah ditanggulangi dengan CSR itu,” jelas Firmandez.

Firmandez melanjutkan, pelayanan jamaah haji tahun ini memang sudah lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu tampak pada sudah adanya koordinasi antara kedutaan besar Indonesia di Saudi Arabia dengan Kementerian Agama dan penyelenggara ibadah haji.

Kinerja Kedutaan dan PPIH

Firmandez, mengapresiasi kinerja Kedutaan Indonesia dan Panitia Penyelenggaraan Ibadah Haji (PPIH) di Arab Saudi. Politisi Golkar ini menilai koordinasi sudah berjalan meski belum optimal.

“Tahun-tahun sebelumnya terpisah, tidak ada koordinasi, namun setelah musibah jatuhnya crane pada masa haji tahun lalu, kini Dubes dan PPIH sudah bekerja sama dalam menangani pelayanan jamaah haji Indonesia,” jelas Firmandez.

Komisi VIII telah menanggil pihak Kedubes Indonesia di Arab Saudi dan

mempertemukan dengan pihak Kementerian Agama, PPIH dan Irjen Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PHU). “Setelah kita pertemuan sudah ada koordinasi, meski belum optimal, jika ada masalah langsung diselesaikan,” ungkap Firmandez.

Firmandez mencontohkan, ada jamaah yang ditahan selama 15 hari karena kedatangan membawa jimat dan dianggap mengandung opium, jamaah asal Indonesia itu ditahan oleh Pemerintah Arab Saudi, namun berkat diplomasi dan koordinasi yang baik, akhirnya bisa dibebaskan.

“Begitu juga terhadap jamaah yang dideportasi karena kesalahan administrasi, seperti kesalahan pasport, nama lain orangnya lain. Setelah diperbaiki Alhamdulillah bisa berangkat lagi,” lanjut Firmandez.

Firmandez berharap, ke depan lembaga-lembaga terkait tersebut bisa terus memperkuat koordinasi untuk memberikan pelayanan dan perlindungan yang maksimal kepada jamaah haji Indonesia.

“Ya, koordinasi harus diperkuat, semua jamaah haji wajib dilindungi, begitu juga dengan penyelenggara seperti tenaga medis dan pendamping juga harus dilindungi. Lebih dari itu masalah perlindungan juga harus diberikan kepada pekerja asal Indonesia di Arab Saudi,” harapnya. ■ (as)

Keselamatan Penumpang Tidak Boleh Main-main



foto: Rumi/w

Ketua DPR RI Ade Komarudin didampingi Anggota Komisi VI DPR RI meninjau Terminal 3 Bandara Soetta.

Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta mulai beroperasi pada 9 Agustus 2016 pukul 00.01 WIB. Dengan biaya pembangunan yang mencapai angka Rp 7 triliun, Terminal 3 Ultimate merupakan investasi terbesar proyek perluasan bandara yang ada di Indonesia. Dengan hadirnya Terminal 3 Ultimate ini, diproyeksi menjadikan Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai bandara transit guna mendukung perekonomian dan meningkatkan pariwisata Indonesia, serta bersaing dengan bandara-bandara berkelas dunia lainnya khususnya di kawasan regional ASEAN.

Dibukanya Terminal 3 Ultimate ini pun sejalan dengan dikeluarkannya surat Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan Nomor AU.508/1/1/DRJU.DBU-2016, tanggal 2 Agustus 2016, perihal Pengoperasian Terminal 3. Dalam surat tersebut dinyatakan bahwa setelah melalui proses verifikasi

administrasi dan teknis serta evaluasi simulasi operasi pelayanan dan kesisteman, maka Terminal 3 dinyatakan dapat dioperasikan.

Walaupun digadang-gadang menjadi bandara termegah di Tanah Air, dan sekelas dengan Bandara Changi, Singapura, namun tak luput dari keluhan penumpang. Sekitar 12 jam setelah beroperasi, terjadi

gangguan listrik. Permasalahan sulitnya pengambilan bagasi hingga kemacetan di depan area terminal pun dikeluhkan penumpang. Problem khas Jakarta, pun tak luput 'mampir' ke Terminal 3 Ultimate ini. Jebolnya plafon akibat derasnya hujan pun tambah memperparah keadaan.

Untuk membahas mengenai Terminal 3 Ultimate ini, Parlementaria pun berkesempatan mewawancarai Anggota Komisi VI DPR RI Bambang Haryo Soekartono di ruang kerjanya, beberapa waktu yang lalu. Politisi F-Gerindra dan asal dapil Jawa Timur itu mengemukakan berbagai permasalahan, termasuk hasil pengamatannya melalui peninjauan langsung di Terminal 3 Ultimate. Berikut kutipan wawancaranya;

Bagaimana Anda melihat Terminal 3 Ultimate?

Terminal 3 Ultimate ini diklaim

sebagai terminal bandara paling sempurna di Indonesia. Kita harapkan Bandara Soetta melalui Terminal 3 ini pun bisa menjadi bandara transit di antara Asia Timur dan Australia. Termasuk kita harapkan juga bandara ini dapat menjadi pintu gerbang pariwisata Indonesia. Tapi ternyata tidak bisa.

Karena ternyata bandara yang dibangun oleh Angkasa Pura II, dengan biaya yang cukup mahal, mencapai Rp 7 triliun ini, sebenarnya merupakan terminal bandara yang kurang layak dijadikan sebagai bandara internasional, termasuk bandara yang dikategorikan nyaman, bahkan berpredikat ultimate. Ini tidak bisa disebut sebagai terminal bandara dengan predikat ultimate, karena fasilitas kurang memadai.

Apa catatan Anda terhadap Terminal 3 Ultimate ini?

Menurut saya, bandara harus memberikan fasilitas keselamatan, keamanan, hingga kenyamanan kepada pelanggan terlebih dahulu. Namun, keselamatan dan keamanan itu seperti diabaikan, karena ukuran gedung yang terlalu besar, sehingga menutupi tower ATC untuk mengontrol kegiatan pesawat. Ini menunjukkan sisi keselamatan masih kurang diperhatikan.



Perencanaan sudah tidak benar. Seharusnya diberikan fasilitas anti kebakaran, seperti fire sprinkler yang berfungsi, namun saya melihat ini tidak ada.



Kemudian dari sisi aksesibilitas. Saya melihat, hanya ada satu pintu keluar yang ada di area keberangkatan maupun area kedatangan. Hal ini akan sangat berbahaya jika sampai terjadi insiden, misalnya kebakaran yang akan menyulitkan untuk menyelamatkan diri. Perencanaan sudah tidak benar. Seharusnya diberikan fasilitas anti kebakaran, seperti *fire sprinkler* yang berfungsi, namun saya melihat ini tidak ada.

Kemudian dari sisi keamanan, mungkin di sudut-sudut terminal bandara perlu dilengkapi CCTV. Posisi-posisi strategis masih kurang dilengkapi keamanan, karena terlalu luasnya terminal bandara itu, sehingga untuk keamanan itu tidak bisa menjangkau semua tempat.

Dari sisi kenyamanan, masih banyak sekali keluhan dari penumpang. Mulai dari papan informasi yang kurang, papan petunjuk keberangkatan dan kedatangan serta posisi juga masih minim. Padahal penumpang maskapai membutuhkan informasi yang akurat. Masih sangat minim.

Suasana terminal bandara itu sendiri pun mempengaruhi kenyamanan penumpang. Dari konter *check-in* dengan ruang tunggu yang jaraknya sangat jauh. Jumlah kursi di ruang tunggu masih minim, sehingga terjadi *overload* penumpang yang menunggu keberangkatan. Masalah pendingin ruangan yang kurang terasa, penerangan yang minim, hingga letak toilet dan mushola yang kurang strategis juga dikeluhkan penumpang.

Apakah Terminal 3 Ultimate ini terkesan buru-buru diresmikan?

Saya pikir karena mungkin karena terminal 1 dan 2 yang sudah *overload*, sehingga Angkasa Pura II



foto : Kresno/iw

Anggota Komisi VI DPR RI
Bambang Haryo Soekartono

terburu-buru mengoperasikan terminal. Seharusnya ini tidak boleh. Masalah *overload* di terminal bandara yang lain, tidak boleh dijadikan alasan untuk terburu-buru mengoperasikan Terminal 3 Ultimate. Karena keselamatan dan keamanan penumpang harus menjadi prioritas.

Sebelum sebuah terminal bandara dioperasikan, seharusnya melalui proses sosialisasi dan simulasi terlebih dahulu. Kondisi terminal bandara harus benar-benar sempurna. Setelah sempurna, baru kemudian disimulasikan. Simulasi ini sekaligus proses sosialisasi. Jadi proses simulasi itu seolah-olah sudah mengoperasikan, sehingga seluruh petugas sudah mengetahui posisi penempatannya dan melibatkan penumpang. Petugas maskapai pun sudah tahu posisinya, penumpang sudah tahu dia harus kemana.

Ini yang tidak dilakukan di Terminal 3 Ultimate ini. Bandara yang masih jauh dari sempurna, sudah dioperasikan. Ini berbahaya kepada keselamatan, keamanan, dan kenyamanan publik. Keselamatan publik tidak boleh untuk main-main. Seharusnya, Terminal 3 Ultimate ini ditutup dahulu, disempurnakan, baru kemudian bisa dioperasikan kembali. Saya melihat Terminal 3 Ultimate ini seperti terminal bus kota.

PENGAWASAN

Bagaimana jika dibandingkan dengan bandara lain?

Jika melihat bandara lain di Indonesia, desain dari bandara Ngurah Rai di Bali jauh lebih baik, dari sisi kapasitas pun jauh lebih banyak. Dengan biaya tidak sampai setengahnya Terminal 3 Ultimate, namun jauh lebih baik Bandara Ngurah Rai.

Ada ketidakefisienan dalam pembangunan Terminal 3 Ultimate ini, tidak ekonomis dalam pembangunannya dibanding Bandara Ngurah Rai. Karena biaya mencapai Rp 7 triliun, padahal Bandara Ngurah Rai hanya menghabiskan Rp 2,8 triliun. Terlalu mahal. Bahkan Bandara Ngurah Rai mampu menampung kapasitas hingga 40 juta penumpang per tahun, tapi Terminal 3 Ultimate hanya 25 juta penumpang per tahun.

Jika kita ingin mengoperasikan bandara, kapasitas angkut harus efisien dan maksimal. Kapasitas muat Terminal 3 Ultimate hanya 25 juta, dengan anggaran Rp 7 triliun, ini menunjukkan tidak efisien. Padahal seharusnya bisa memuat 2-3 kali dibanding Bandara Ngurah Rai. Ini ada sesuatu yang tidak benar.

Lalu, bagaimana kedepannya?

Kita harus kembalikan dulu, untuk bandara ini disempurnakan. Kita tidak bisa mengoperasikan terminal



foto : Jaka/iv

Jadwal pernebangan di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta



Ada ketidakefisienan dalam pembangunan Terminal 3 Ultimate ini, tidak ekonomis dalam pembangunannya dibanding Bandara Ngurah Rai. Karena biaya mencapai Rp 7 triliun.



bandara, namun harus mengorbankan keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang. Penumpang harus mendapatkan perlindungan. Pemerintah sudah menyalahi daripada kepentingan yang harus diutamakan kepada penumpang.

Ini perlu dilakukan analisis ulang dan evaluasi, apa yang menjadi kekurangan. Untuk sementara, tidak dioperasikan terlebih dulu. Apalagi kalau bandara ini juga akan digunakan untuk terminal internasional, dikhawatirkan juga akan dikeluhkan oleh masyarakat internasional, karena yang didapatkan kalah jauh dengan terminal sebelumnya.

Bagaimana sikap dari Komisi VI DPR RI?

Beberapa Anggota Komisi VI DPR RI mengusulkan agar dibuat Panja, bahkan bila diperlukan, dibuat Pansus. Terminal 3 Ultimate ini perlu dicek kembali, apa yang menjadi kekurangan bandara itu, dari sisi keamanan, kenyamanan, dan keselamatan. Masyarakat tidak akan merasa nyaman, jika ini tidak dibenahi.

Terminal 3 Ultimate belum dalam kondisi sempurna, namun sudah dioperasikan. Bandara ini menurut saya tidak layak, dari sisi keamanan, keselamatan, dan kenyamanan. Tidak boleh dioperasikan, harus melalui proses simulasi dan sosialisasi. ■

(sf)



foto : Jaka/iv

Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta

Pengoperasian Dipaksakan

Kemegahan Terminal 3 Ultimate telah menyihir pandangan Anggota Komisi VI DPR RI Sartono. Ia pun mengapresiasi terminal bandara yang merupakan hasil karya anak bangsa ini. Namun dibalik apresiasinya, ia memberikan sejumlah catatan, agar mendapat perhatian dari Pemerintah. Apalagi, ia pun sudah melakukan peninjauan langsung ke Terminal 3 Ultimate.

“Pemandangan pertama begitu kita masuk di Terminal 3 ini adalah kesan sentuhan akhir yang masih kurang rapih. Mulai dari lantai, dinding dan langit-langit terminal. Lalu kita mendapati masih banyaknya pengerjaan-pengerjaan tenan atau kedai-kedai yang masih dalam proses pengerjaan dan cenderung tidak ditata dengan baik, aktivitas pengerjaannya ini sangat-sangat mengganggu kenyamanan para penumpang,” jelas Sartono.

Politisi F-PD itu pun mendapati jauhnya jarak antara ruang check-in dan ruang tunggu penumpang. Menurutnya, hal ini sangat

mengganggu kenyamanan penumpang. Fasilitas toilet pun tidak menunjukkan fasilitas sebagai terminal bandara internasional. Terminal bandara yang sedemikian besarnya pun seharusnya dibuat ramah terhadap lansia dan kaum disabilitas.

“Karena pengoperasian yang begitu dipaksakan tidak hanya merugikan penumpang akan tetapi juga BUMN Penerbangan kita yaitu Garuda Indonesia Airlines itu sangat-sangat dirugikan. Karena beberapa kali harus mengalami *delay* dan lain sebagainya. Fasilitas garbarata yang belum siap untuk dioperasikan. Kesemuanya ini menjadi point kunci karena bukan saja persoalan kenyamanan akan tetapi persoalan nyawa orang,” jelas Sartono.

Padahal, tambah politisi asal dapil Jawa Timur itu, terminal yang telah menelan biaya hingga Rp 7 triliun itu seharusnya bisa menjadi kebanggaan Bangsa Indonesia. Karena bagaimanapun, bandara adalah gerbang utama Indonesia, karena orang-orang dari



foto : Jaka/iw

Anggota Komisi VI DPR RI Sartono



Karena pengoperasian yang begitu dipaksakan tidak hanya merugikan penumpang akan tetapi BUMN Penerbangan kita yaitu Garuda Indonesia Airlines itu sangat-sangat dirugikan.



berbagai negara ketika berkunjung ke Indonesia maka yang menjadi tolak ukur peniliannya yang pertama adalah bandara.

“Pembangunan Terminal 3 Ultimate ini seharusnya mampu menjawab kebutuhan kita akan Bandara Internasional itu sekitar 30 tahun ke depan, ini belum 5 tahun sudah sangat memprihatinkan,” kecewa Sartono, sembari menutup perbincangan. ■

(sf)



foto : Jaka/iw

Petugas bandara menjelaskan fasilitas di Terminal 3 Ultimate Bandara Soekarno Hatta kepada Komisi VI DPR RI

Soal Pemotongan Anggaran: Salah Prosedur vs Domain Pemerintah



Wakil Ketua DPR RI **Fadli Zon**

Selain fungsi legislasi, pengawasan, dan penyerapan aspirasi, tugas dan wewenang DPR RI yang tak kalah penting adalah fungsi penetapan anggaran. DPR RI memiliki kewenangan memberikan persetujuan atas RUU tentang APBN yang diajukan Presiden. Pada Selasa 28 Juni 2016 APBN-P 2016 disahkan oleh DPR RI dalam sidang paripurna. Namun seiring berjalannya waktu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati yang baru saja dilantik setelah *reshuffle* kabinet mengeluarkan kebijakan pemotongan anggaran.

Pemotongan anggaran tersebut berdasar pada Intruksi Presiden RI No 8 tahun 2016 tentang Langkah-langkah Penghematan dan Pemotongan Belanja K/L dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016. Dalam keterangannya kepada para awak media, Sri mengungkapkan, anggaran belanja K/L dikurangi sebesar Rp65 triliun, serta transfer ke daerah sebesar Rp68,8 triliun.

Dia memprediksi, pemotongan kas keuangan negara sebesar Rp137,6 triliun tersebut, sama sekali tidak akan memengaruhi fungsi maupun rencana kerja para kementerian/lembaga pada tahun ini.

Menanggapi kebijakan pemerintah tersebut Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengkritisi keputusan tersebut. Menurutnya dalam pemotongan anggaran seharusnya pemerintah meminta persetujuan DPR RI kembali. "Pemotongan anggaran menyalahi prosedur, karena sudah diketuk palu. Harusnya ada pengajuan APBNP jilid dua ke DPR RI," seru Fadli saat dimintai pendapat oleh Parlemenaria.

Lebih tegas lagi, bahkan Fadli mengatakan keputusan tersebut merupakan pelanggaran terhadap undang-undang. Dia pun berencana akan mengkaji pasal-pasal yang telah dilanggar oleh pemerintah. "Harus diingatkan karena kalau tidak, ini pelanggaran terhadap undang-undang. Karena sudah diketuk dan angka-angkanya sudah pasti. Kalau mau penghematan tidak apa-apa, tapi ini kan revisi. Untuk pasal-pasal yang dilanggar nanti kita kaji," jelas Fadli.

Di sisi lain Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Said Abdullah berargumen bahwa penggunaan anggaran negara merupakan wewenang eksekutif, pemerintah sebagai pelaksana ketatanegaraan. "Dari sisi kacamata Banggar, itu adalah domain pemerintah. Bukan domain banggar lagi. Tanpa pertimbangan badan anggaran itu adalah kewenangan pemerintah," ungkapnyanya kepada Parlemenaria.

Bahkan dia berpendapat pemotongan anggaran bisa menajamkan program prioritas kementerian dan lembaga negara. "Bagi saya kalau pemotongan anggaran itu bagian dari efisiensi dan penghematan



Wakil Ketua Banggar DPR RI **Said Abdullah**

terhadap belanja dinas, rapat, pembelian mobil, itu akan lebih baik. Karena pemotongan itu akan lebih menajamkan program prioritas pemerintah," paparnya.

Di lain pihak Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan, yang memiliki ruang lingkup kerja di bidang keuangan dan perbankan menilai, Inpres penghematan tidak kredibel. Menurutnya inpres tersebut tak menyebutkan alasan rasional mengapa harus dilakukan penghematan. "Tiba-tiba saja langsung perintah melakukan penghematan. Padahal, struktur ekonomi nasional butuh stimulus. Dan itu berarti butuh modal besar," jelasnya.

Heri berpandangan, penghematan ini tidak berpengaruh signifikan untuk menghadirkan postur APBN yang kredibel. Sebaliknya, APBN yang kredibel harusnya lahir dari proses perencanaan yang kredibel pula. Jadi, bila hulunya salah, ujungnya pun pasti salah. "Saya berharap pemerintah fokus pada rencana-rencana yang

kredibel dan sehat. Pemerintah harus menggenjot sumber-sumber penerimaan baru secara kreatif dan maksimal.”

Langkah-langkah penghematan termasuk *self blocking*, sambung mantan Wakil Ketua Komisi VI ini, oleh semua K/L hanya akan menghambat target-target pembangunan yang sudah dipatok dalam APBN-P 2016.



Ketua Bangkar DPR RI **Kahar Muzakir**

signifikan terhadap perekonomian dalam negeri. Pendapatan migas Indonesia serta menurunnya permintaan terhadap minyak dunia. “Kalau rencana pendapatan kita tidak terpenuhi, otomatis pengeluaran pun dikurangi. Apalagi dalam koridor yang tidak dibelanjakan,” kata Kahar saat diwawancarai Parlemenaria.

Bahkan Menkeu mengklaim,



Wakil Ketua DPR RI **Fahri Hamzah**

Tak Banyak Pengaruh

Namun, Ketua Badan Anggaran DPR RI Kahar Muzakir berpendapat beda, menurutnya pemotongan anggaran tidak akan berpengaruh banyak, karena anggaran yang sudah disetujui pun tidak akan diserap seratus persen. “Enggak pernah seratus persen anggaran terserap. Terserapnya itu 92 persen paling tinggi, kadang-kadang cuma 88, ada yang 81. Kalau dipotong hanya lima persen saja, berarti tidak terlalu berpengaruh,” ungkapnya beralasan.

Dia juga menguatkan argumennya, bahwa penghematan terjadi karena target pendapatan negara yang tidak tercapai, lantaran kondisi keuangan negara yang tidak teroptimisasi, dari sisi penerimaan juga cenderung melesu. Dari sektor penerimaan pajak saja diperkirakan melenceng Rp 219 triliun dari target Rp 1.355 triliun dalam APBN-P 2016.

Selain itu yang menjadi alasan juga pelemahan perekonomian global hingga triwulan I tahun 2016 berpengaruh

pemotongan anggaran tersebut tidak akan mengurangi kemampuan APBN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi karena pos yang dipotong adalah belanja-belanja yang tidak produktif. Seperti belanja pegawai, biaya perjalanan dinas, biaya konsinyering, dan pembangunan gedung-gedung pemerintah.

Meskipun dianggap tidak terlalu mempengaruhi kemampuan APBN untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi, namun Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah menegaskan penghematan anggaran seharusnya tidak dilakukan melalui Inpres, melainkan melalui APBN Perubahan tahap kedua. Karena itu, Fahri menilai langkah Presiden Joko Widodo mengeluarkan Inpres tersebut telah salah dan berpotensi rawan gugatan hukum, lantaran menggunakan instrumen di bawah undang-undang.

“Pemotongan anggaran itu hak DPR RI, kuasa pembuat UU itu adalah DPR RI,” kata Fahri. Tapi Wakil Ketua DPR RI Bidang Ekonomi Taufik Kurniawan

menegaskan hal tersebut merupakan domain Pemerintah, “terkait dengan Inpres pemotongan anggaran, itu merupakan domain pemerintah” ungkapnya.

Sebagai acuan, problem yang cukup mengkhawatirkan di bidang keuangan negara hari ini adalah daya serap pemerintah dalam pelaksanaan anggaran. Berdasarkan data Humas Kemenkeu RI (dalam www.setkab.go.id) yang terkodefikasi dalam buku Laporan Pemerintah Tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2016 yang diserahkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya, Bambang Brodjonegoro kepada pimpinan Badan Anggaran DPR-RI, pada 20 Juli 2016 mengkalkulasikan sebanyak 41 K/L masuk kelompok penyerapan anggaran tinggi, yaitu 34,2% ke atas, 16 K/L memiliki daya serap sedang (27,5%-34,2%), dan 30 K/L memiliki daya serap rendah (kurang dari 27,5%).

Penyerapan anggaran paling rendah tersebut di antaranya Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (11,5%), Dewan Ketahanan Nasional (13,4%), Kemenko Kemaritiman (14,4%), Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (16,5%), dan Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (17,8%).

Sementara itu yang juga menjadi penyebab daya serap anggaran rendah adalah ketakutan aparat dalam menggunakan anggaran. Faktanya memang banyak pimpinan K/L, kepala daerah, dan bendahara yang berurusan langsung dengan aparat penegak hukum karena ditemukan adanya dugaan penyimpangan pengelolaan keuangan negara dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini menimbulkan stigma ketakutan dalam merealisasikan anggaran.

Ini sebetulnya persoalan serius yang harus menjadi perhatian pemerintah. Walau sudah ada aturan hukum diskresi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, aturan pasal tersebut masih bias dalam penerapannya. Ukuran dan batasan pemerintah dapat melakukan diskresi belum diatur secara konkret dalam UU, yang menimbulkan multitafsir. Hal ini mengakibatkan pelaksanaan anggaran untuk pembangunan pun terganggu. ■

(eko.mp)

Membantu Pedagang Keliling dengan Payung Jumbo

Kuswiyanto politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini begitu peduli membantu para pedagang keliling di dapilnya. Kuswiyanto ingin para pedagang keliling tersebut berdaya secara ekonomi. Saat mengunjungi para pedagang di Kuotorejo, Tuban, Kuswiyanto sempat membagikan payung jumbo sebagai alat pelindung bagi para pedagang keliling.

Begitulah satu dari sekian banyak aktivitasnya di dapil. Kuswiyanto sendiri berasal dari dapil Jatim IX yang meliputi Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Pemberdayaan para pedagang jadi salah satu perhatiannya. Pedagang yang mendapat payung sangat bahagia menerima bantuan payung tersebut. Mereka tak akan kepanasan lagi saat berdagang.

Para pedagang keliling ini mungkin menjadi entitas yang terlupakan. Mereka adalah kelompok pedagang kecil yang modalnya sangat pas-pasan dan penghasilannya pun tak terlalu banyak. Setidaknya dengan bantuan ini, bisa menumbuhkan semangat berusaha. Inilah gagasan memberi bantuan kepada komunitas pedagang yang hampir tak terpikirkan.



foto : dokpri/iw

Anggota DPR RI Kuswiyanto memberi sumbangan payung jumbo kepada para pedagang keliling.

“Semangat untuk menciptakan usaha mandiri dengan keterampilan dan modal yang terbatas, menjadikan pedagang makanan keliling, pilihan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Keterbatasan lahan berdagang tidak sebanding dengan pertumbuhan usaha di sektor informal ini. Dan kebijakan pemerintah juga masih belum berpihak pada mereka,” ungkap

Kuswiyanto.

Pedagang keliling, sambung Kuswiyanto, bisa lebih *fleksibel*, karena tidak menetap di satu tempat. Entitas pedagang ini bisa melayani konsumen lebih luas. Menurut Anggota Komisi VIII itu, “Usaha yang dikelola secara mandiri dengan modal kecil, terbukti selama ini mampu bertahan di tengah persaingan pasar yang ketat.” ■

(mh)

Anak Muda Tegal Diminta Kembangkan Startup Berbasis Industri Kreatif



foto : dokpri/iw

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih berdiskusi dengan pelaku kreatif di Tegal

Tiga belas dari 16 sektor industri kreatif masih belum tersentuh. Tiga sektor ekonomi kreatif, yang dianggap sudah tergarap secara maksimal yaitu kuliner, *fashion*, dan *handycraft*. Selain tiga sektor itu, bidang musik, sinematografi, pembuatan aplikasi, desain komunikasi visual merupakan salah satu sektor menjanjikan yang bisa turut serta

mengangkat kearifan lokal untuk *go international*.

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih mendorong kalangan muda untuk bisa mengembangkan *startup* berbasis industri Kreatif yang belum tersentuh secara maksimal tersebut. Dalam diskusi dengan anak muda kreatif Tegal, Jawa Tengah, baru-baru ini, ia menekankan pengembangan *startup* berbasis industri kreatif dapat membantu menaikkan taraf ekonomi masyarakat karena membuka kesempatan kerja untuk masyarakat.

“Kita lihat semua serba cepat. Kalau kita mau kembangkan *startup*, juga harus cepat. Cepat dalam inovasi, cepat dalam bergerak. Dari 16 sektor masih didominasi tiga sektor. Jadi, peluangnya masih besar,” kata politisi F-PKS itu.

Fikri berharap *startup* bisa memasukkan budaya khas daerah dengan keinginan pasar dalam balutan kreativitas anak muda sehingga tidak hanya sebagai ajang bisnis, tetapi juga melestarikan kearifan lokal.

“Seperti Tegal ini, bagaimana kita mengembalikan nama daerah ini menjadi “Jepangnya” nya Indonesia. Banyak industri besi yang sudah mendunia, buatlah videonya, misalnya kriya dari besi,” harap politisi asal dapil Jawa Tengah itu. ■

(sf)

Miris ada Guru Agama Honorer 18 Bulan Belum Terima Honor

Anggota FPP DPR RI Achmad Mustaqim dari Dapil Jateng VIII meliputi Kabupaten Cilacap dan Banyumas cukup aktif mendatangi konstituen saat reses maupun kunjungan kerja serta kunjungan spesifik. Anggota Komisi VIII yang bermitra kerja dengan Kemenag, Kemensos, Kemen PP dan PA dan BNPB.

Menurutnya ada beberapa agenda saat kunjungan Dapil, antara lain mengumpulkan berbagai elemen masyarakat termasuk kalangan pendidik (guru) keagamaan. Sungguh miris saat sesi tanya jawab ada salah satu Kepsek MTs bahwa selama ini terlambat pembayaran honor maupun sertifikasi khususnya guru sekolah agama. Bahkan ada yang hingga 18 bulan belum terima honor.

Mereka juga merasa lembaga pendidikan agama dimana siswanya mencapai 11 juta, tetapi di lapangan sedang terjadi anomali mereka susah mendapatkan bantuan baik melalui APBN maupun APBD.

Contohnya, pada pemerintah lalu mereka begitu mudah dapat bantuan bangunan fisik atau operasional, namun kini susah lantaran banyaknya aturan persyaratan yang harus dipenuhi. Pencairan juga susah karena diatur adcost sehingga fleksibilitas menjadi hilang. Dibanding pemerintah lalu, dengan mudah mendapatkan bantuan ruang kelas baru senilai Rp 200 juta, bisa memanfaatkan membangun beberapa ruang.

Atas kasus-kasus tersebut, Mustaqim memperjuangkan di



Anggota FPP Achmad Mustaqim saat berdialog dengan para pendidik di Dapilnya

tingkat pusat, khususnya Kemenag. Dia menegaskan, kenapa negara sampai berhutang kepada guru-guru baik guru honorer agama maupun sertifikasi. Hal ini diakui Kemenag bahwa hingga kini masih mempunyai hutang tertunggak untuk honor para guru Rp 1,7 triliun. Kalau kondisi bisa ditangani mungkin baru lunas tahun 2018-2019, karena kemampuan Kemenag menyelesaikan hutang ini berkisar antara Rp 400-450 miliar pertahunnya. ■ (mp)

Program Tenaga Kerja Mandiri Kurangi Pengangguran



Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf saat berdialog dengan TKM (Tenaga Kerja Mandiri) Petani Jahe Merah di Kabupaten Bandung.

Di negara berkembang, pengangguran masih menjadi masalah serius. Di Indonesia, angka pengangguran relatif masih tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), angka pengangguran usia 15-19 tahun 2010 sebanyak 23,23 persen dan meningkat pada tahun 2015 menjadi 31,12 persen.

Menanggapi pengangguran yang terus meningkat, Ketua Komisi IX DPR RI Dede Yusuf mendorong program perluasan kesempatan kerja yang diluncurkan Kementerian Tenaga Kerja yaitu program Tenaga Kerja Mandiri (TKM).

Program TKM itu pun dijalankan Dede di Daerah Pemilihannya, Jawa

Barat II. Hal ini terbukti saat reses, politisi fraksi Partai Demokrat ini menyerahkan bantuan program TKM di Bidang Ternak Domba dan Budidaya Tani Jahe Merah kepada Kelompok TKM di dapilnya.

“Hal ini sebagai upaya untuk memperluas kesempatan kerja dan mengurangi pengangguran, serta membantu program pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan sesuai dengan karakter sumber daya lokal dan program menciptakan 10 juta lapangan kerja baru,”kata Dede.

Dede berharap program TKM bermanfaat untuk memberdayakan masyarakat pengangguran, mempercepat perekonomian, memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya lokal.

“Mudah-mudahan program ini bisa terserap dengan baik oleh masyarakat dan mengurangi angka pengangguran. Saya juga berharap di masa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) ini, orang pribumi harus menjadi pemimpin di daerahnya. Semoga apa yang diperjuangkan kan ini bermanfaat untuk rakyat,”tuturnya. ■ (mm)

Terima Aspirasi Masyarakat Lampung



Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri menyerap aspirasi terkait Alokasi Dana Desa di Lampung. foto : dokpri/iw

Anggota Komisi II DPR RI Tamanuri dalam kunjungan kerjanya ke Lampung pada (30/06/2016) menemukan beberapa persoalan di bidang otonomi daerah yakni Alokasi Dana Desa (ADD) setiap tahunnya, seperti tertuang dalam UU Desa dan aspirasi pemekaran daerah.

Ia mendorong agar diselenggarakan semacam pelatihan atau Bimtek khusus untuk para Aparat Desa serta Pendamping Desa/Pendamping Lokal Desa. “Bimtek

benar-benar difokuskan kepada peningkatan kompetensi dan kemampuan Aparat Desa dan PD/PLD dalam mendistribusikan Alokasi Dana Desa secara benar, dalam arti tidak melanggar aturan pelaksanaannya. Sehingga mekanisme penggunaan dana tersebut sungguh dipahami oleh Aparat Desa,” urainya.

Selain itu, ia juga menemukan aspirasi agar dilakukan pemekaran kecamatan Abung Selatan, Lampung. “Pada reses ini, kembali muncul aspirasi pemekaran kecamatan dan kabupaten. Perlu kajian khusus tentang kelayakan Kecamatan Abung Selatan dimekarkan menjadi dua kecamatan. Baik dari sisi penduduk, wilayah dan biaya yang akan menjadi beban Pemkab Kabupaten Lampung Utara,” ujarnya

Menanggapi aspirasi itu, Politisi Nasdem ini pun menjelaskan bahwa pihaknya siap melakukan mediasi, namun perlu juga dilakukan keseriusan dari DPRD Lampung Utara agar bersinergi dengan Bupati Lampung Utara.

“Komisi II, khususnya Anggota DPR RI Dapil Lampung II siap memediasi. Namun perlu ada keseriusan terlebih dahulu dari Anggota DPRD Kabupaten Lampung Utara, bersinergi dengan Bupati Lampung Utara, baru kemudian diteruskan ke Gubernur Lampung untuk dibahas di DPRD Provinsi Lampung. Kemudian diteruskan kembali pada Menteri Dalam Negeri,” pungkas Tamanuri. ■ (ns)

Butuh Terobosan Manajemen Guna Tingkatkan Kesejahteraan Petani

Sebagai negara berpenduduk terbesar keempat di dunia, sudah seharusnya pemerintah mengarahkan kebijakannya untuk memperkuat kedaulatan pangan. Indonesia adalah negara yang subur, tidak semestinya bergantung kepada impor bahan pangan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya berkesinambungan, guna membangun swasembada di bidang pertanian.

Demikian hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Titiek Hediati Soeharto dalam kunjungan kerja di Kantor Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Dusun Barongan, Jetis, Bantul, Yogyakarta, Jawa Tengah.

“Pemerintah terus melakukan upaya pengembangan di bidang pertanian, dengan melakukan berbagai langkah dan program-program pertanian,” ujar Titiek dihadapan puluhan petani yang hadir.

Ia juga mengatakan, guna memberikan kesejahteraan kepada para petani, perlu upaya untuk meningkatkan produktifitas per petani, bukan hanya meningkatkan produktifitas pertaniannya saja. Untuk itu, harus ada suatu terobosan manajemen usaha tani yang bisa memberikan efisiensi produksi usaha tani.

“Peningkatan produktifitas petani antara lain bisa dilakukan dengan memberikan perlindungan kepada petani dengan



Kunjungan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Titiek Hediati Soeharto di Kantor Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Dusun Barongan, Jetis, Bantul, Jateng. foto : dokpri/iw

menyediakan dan menyederhanakan penyaluran subsidi, memperkuat kelembagaan para petani, dan memberikan kesempatan kepada para petani untuk mengembangkan usaha pengolahan hasil pertaniannya, sehingga bisa menambah penghasilan para petani,” jelas Politisi Golkar tersebut.

Titiek mengingatkan kepada para petani untuk memaksimalkan penggunaan berbagai bantuan alat dan mesin pertanian yang telah diterima. Selain agar tidak sia-sia, juga agar target swasembada pangan yang telah dicanangkan oleh pemerintah bisa tercapai. ■ (dep)

LSN Wadah Gali Potensi Santri

Liga Santri Nusantara (LSN) merupakan entitas yang tak dapat dipisahkan antara sepak bola dan pesantren. LSN dibentuk sebagai wadah untuk menggali dan mengembangkan potensi 3,65 juta santri yang tersebar di 34 provinsi di seluruh Indonesia.

Melihat ajang pengembangan bakat tersebut sebagai hal yang positif, Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa (F-PKB) memberikan dukungan kepada Pondok Pesantren (PP) Al Huda Cianjur yang berhasil menjuarai LSN tingkat Region Jawa Barat IV dalam pertandingan terakhir Pelaksanaan LSN 2016 di GOR Pajajaran, Bogor, baru-baru ini.

“Saya dukung dan ucapkan selamat kepada tim sepakbola PP Al Huda Cianjur untuk bertanding di tingkat Nasional ke D.I.Yogyakarta, bersama dengan para pemenang region lainnya,” ujar politisi dari dapil Jabar III itu.

Ia berharap, tim PP Al Huda bisa melaju terus menjadi juara Grup dan masuk delapan besar hingga menjuarai LSN 2016. “Mudah-mudahan seluruh anggota tim bisa menjaga stamina dan performanya sehingga bisa mendapatkan kemenangan-kemenangan lainnya,” paparnya.

Dalam kunjungan kerjanya ke dapil, Ia juga melakukan berbagai kegiatan sosial lainnya. Diantaranya, Neng Eem membangun rumah swadaya serta mendorong masyarakat setempat agar mandiri secara ekonomi dengan membuat



Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfa saat melakukan kunjungan kerja di Dapilnya.

koperasi disertai pemberian modal usaha bersinergi dengan Kementerian terkait.

Ia juga menyoroti masalah kurangnya jembatan sebagai sarana penyebrangan sungai bagi warga di perbatasan Kabupaten Cianjur dan Kabupaten Bogor. Ia mengatakan jembatan di wilayah Selatan dapilnya banyak yang sudah roboh dan tidak layak digunakan, sehingga mengharuskan masyarakat setempat menggunakan rakit. ■

foto : dokpri/iw

(ann)

Dorong Pemerintah Revitalisasi Tingkatkan Kualitas Bangsa



Itet Tridjajati Sumarijanto membagikan 1000 bibit pohon Jambu Jamaika di Desa Rejo Asri, Kecamatan Seputih Raman, Kabupaten Lampung.

Itet Tridjajati Sumarijanto, Anggota DPR RI FPD-Perjuangan, Dapil Lampung II (Kab. Lampung Tengah, Lampung Timur, Lampung Utara, Mesuji, Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat, dan Way Kanan, berkomitmen mendorong pemerintah melakukan revitalisasi meningkatkan kualitas bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila, serta fokus pembangunan berkesinambungan untuk meningkatkan taraf perekonomian masyarakat secara mandiri.

Dalam rangka memberikan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat, berencana membangun Perpustakaan dengan metode membaca dan praktek. Yang nantinya menjadi pusat belajar dari berbagai basic ilmu. Perpustakaan ini tidak saja menyediakan bahan baca, tetapi juga menyiapkan fasilitator yang akan mendampingi dalam mengaplikasi potensi anak-anak berdasarkan basic ilmu.

Wujud kepedulian terhadap kondisi kesehatan masyarakat, ditunjukkan Itet Tridjajati dengan mengadakan kegiatan Pengobatan Gratis, mengajak masyarakat hidup sehat dengan cara membersihkan lingkungan tempat tinggal, dan menanamkan halaman rumah sayur-sayuran, tomat, cabe dan sejenisnya, sehingga keluarga dapat asupan vitamin yang sehat, dari lingkungan rumahnya.

Selain itu, di dapil, dirinya juga membagikan 1.000 bibit pohon jambu Jamaika dan Lemon. Tak berhenti sampai disitu, Itet pun berkesempatan melihat produksi penggilingan padi dan beberapa potensi lingkungan pertanian yang akan digarap menjadi desa wisata buah dan pangan.

“Ini juga merupakan implementasi dari sila Pancasila nomor 5 yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mari bahu membahu gotong-royong bersama masyarakat menjadikan desa yang bersih, indah, asri, dan mewujudkan masyarakat yang sejahtera memiliki pangan melimpah serta mandiri berkelanjutan,” tegasnya. ■

(as)

Pesantren di Madura Membutuhkan *Support* Pemerintah



foto: dokpri/iw

Farid Al Fauzi berdiskusi dengan pengasuh Ponpes

Sebagian orang yang kenal dengan Madura memberikan julukan kepada pulau ini sebagai pulau seribu pesantren. Masyarakat Madura dianggap memiliki komitmen dengan nilai-nilai keislaman yang khas pada norma-norma sosial. Beberapa sosiologi menilai masyarakat Madura menjunjung kultur Islam. Berkembang pesat pesantren di Madura hingga saat ini sebagai bukti bahwa tingkat religiusitas masyarakat Madura cukup tinggi.

Maka tak ayal, sampai setaraf Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Jawa Timur XI, Farid Al Fauzi, juga merupakan jebolan dari pesantren. Dia sudah kenyang dengan pendidikan kultur pesantren ala Madura. Selama menjadi Anggota Dewan Farid mengatakan sering berkunjung ke pesantren-pesantren yang ada di daerahnya.

Dapilnya meliputi, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sampang, dan Kabupaten Sumenep. Kedekatannya dengan kiyai pesantren dan tokoh masyarakat semata-mata karena kultur yang ada di daerah penghasil garam ini. Dalam kunjungannya ke pesantren-



Secara umum pesantren tetap membutuhkan support dari negara. Support fisik, support pembiayaan. Terutama kemarin, banyak kiyai yang menelpon saya, ketika kurikulum full day diberlakukan di sekolah-sekolah membuat keresahan luar biasa.



pesantren yang ada di Madura dia mendapat keluhan-keluhan dari para pengasuh pesantren.

Menurut pengaduan dari pengasuh-pengasuh pesantren yang ada di dapilnya, saat ini pesantren sebagai lembaga pendidikan

yang banyak berkontribusi dalam mencetak generasi bangsa masih tetap membutuhkan dukungan dari pemerintah. Baik dukungan dari segi infrastruktur maupun pembiayaan.

Keluhan lain yang juga disampaikan kepada anak kiyai asal Bangkalan ini, yakni tentang wacana pemerintah tentang kurikulum *full day school*, menurutnya usulan tersebut membuat resah pengasuh pesantren, karena tidak sesuai dengan kultur lokal.

“Secara umum pesantren tetap membutuhkan *support* dari negara. *Support* fisik, *support* pembiayaan. Terutama kemarin, banyak kiyai yang menelpon saya, ketika kurikulum *full day* diberlakukan di sekolah-sekolah membuat keresahan luar biasa,” jelas Farid di sela waktu luang rapat di Komisi VI DPR RI, baru-baru ini.

Dia menjabarkan, pola pendidikan pesantren yang ada di Madura terpisah dengan sekolah umum, di pagi hari murid belajar di sekolah umum, selapas itu sore harinya, santri memulai pendidikan pesantren.

“*Madrosah-madrosah* itu kan ngalah pada posisi waktu sore, sekolah Islam, diniyah maupun ibtidaiyah. Itu kan ngambil posisi sore, kalau dibuat *full day* akan ada dua kemungkinan yang bubar itu *madrosahnya* atau sekolah umum yang bubar. Jadi gak sesuai dengan kultur. Itu yang kemarin sempat membuat keresahan. Saya ke lapangan selalu itu yang dikeluhkan,” terangnya.

Berkenaan dengan infrastruktur pesantren, Farid mengatakan, “Terkait fisik pesantren, ada yang santrinya banyak tapi fasilitasnya kurang, kelas-kelas tidak cukup, asrama tidak cukup,” ujarnya.

Sumbangan pesantren kepada negara dalam mencetak generasi-generasi unggul tak bisa diremehkan. Maka sudah sewajarnya negara memberikan perhatian kepada lembaga pendidikan semacam ini. ■

(eko)

“Dari Bimbingan Haji, Air Bersih, Hingga Masalah Kebakaran”



foto : dokpri/iw

Wakil Ketua Komisi VIII Sodik Mujahid saat memberi pembinaan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji

Dalam masa resesnya kali ini, Sodik Mujahid dari Fraksi Partai Gerindra meninjau beberapa area di Dapilnya, Jawa Barat I yang meliputi Kota Bandung dan Kota Cimahi. Hari pertama reses, Sodik mendatangi Jemaah dari KBIH Qiblat Darul Hikam, yang disusul dengan pemberian bimbingan manasik haji untuk majelis taklim se Kecamatan Ujung Berung, Bandung Jawa Barat. Ia juga memberikan bimbingan manasik haji untuk pengurus KBIH dan pembimbing haji seJawa Barat. Pada kesempatan ini, Sodik memberikan arahan dan penjelasan terkait hak calon Jemaah haji di tanah suci yang wajib diberikan oleh mitra kerja Komisi VIII DPR RI yakni Kementerian Agama.

Hak tersebut berupa bimbingan ibadah selama menjalankan ibadah haji di tanah suci, hak berupa pemenuhan berbagai fasilitas-fasilitas dasar yang harus diberikan negara, serta hak perlindungan dan keamanan bagi para jemaah haji. Disini Sodik ingin memastikan bahwa calon Jemaah haji yang akan berangkat tahu dan menyadari akan hak-hak yang harus mereka terima itu ketika di tanah suci. Dan jikapun Kementerian agama sebagai penyelenggara ibadah haji dari



Sodik memberikan arahan dan penjelasan terkait hak calon Jemaah haji di tanah suci yang wajib diberikan oleh mitra kerja Komisi VIII DPR RI yakni Kementerian Agama.



negara sendiri ini lalai memberikan hak Jemaah tersebut, maka Jemaah calon haji tahu harus berbuat apa setelah itu.

Hari kedua Sodik menggunakan waktu resesnya untuk meninjau instalasi mini air bersih di Kiara Condong, Bandung. Hal ini terkait dengan aspirasi yang masuk kepadanya berupa keluhan akan minimnya air bersih di daerah tersebut. Meski tidak berkaitan dengan mitra kerjanya di Komisi VIII, namun ia

berkewajiban untuk menindaklanjuti pengaduan tersebut. Pasalnya, setiap Anggota DPR RI diberikan mandat untuk mewakili daerahnya masing-masing tidak terbatas pada bidang kerjanya. Oleh karena itu ia langsung menghubungi walikota Bandung untuk meningkatkan akses ke PDAM Bandung.

Sodik pun bersyukur karena sang Walikota langsung tergerak hatinya dan membuka akses PDAM untuk masuk ke daerah tersebut. Dari walikota Sodikpun juga menghubungi kementerian Pekerjaan umum. Sayangnya hingga saat ini Kementerian PU belum terlihat tindak lanjutnya. Namun Sodik pun tak putus harapan, ia mencoba menghubungi BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana) yang notabene merupakan salah satu mitra kerjanya di Komisi VIII DPR RI. Oleh BNPB Sodik berhasil mendapatkan pompa air bersih.

Wakil Ketua Komisi VIII ini pun terlihat mengunjungi beberapa masjid, dan madrasah. Ia meninjau berbagai fasilitas di kedua tempat itu. Dan atas perjuangannya juga, Sodik ikut merehabilitasi MCK (Mandi Cuci Kakus) umum yang sudah tidak layak. Padahal MCK itu selain diperuntukkan Jemaah Masjid tersebut, juga dipergunakan untuk masyarakat luas di daerah tersebut. Sementara untuk madrasah, Sodik pun tengah berjuang melakukan advokasi untuk merenovasi beberapa ruang kelas.

Tak hanya hal yang bersifat umum, tak jarang saat reses Sodik mengunjungi anggota masyarakat yang tengah tertimpa musibah. Sebut saja ketika ia mendengar musibah kebakaran yang menimpa salah satu warga di Cicadas. Pada kesempatan itu Sodik selain mengucapkan rasa duka yang mendalam juga memberikan sejumlah bantuan seperti makanan, pakaian dan sejumlah dana untuk membangun kembali rumahnya yang terbakar. ■

(ayu)



foto : Andri/iw

Forum Legislasi membahas RUU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat di Gedung DPR RI.

Melalui RUU Larangan Monopoli, DPR RI Dorong KPPU Diperkuat

Anggota Komisi VI DPR RI Eka Sastra mendorong diperkuatnya kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) melalui RUU tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang sedang dibahas DPR RI. Diperkuat baik secara kelembagaan, kewenangan, maupun anggaran, agar terjadi harmoni harga-harga barang kebutuhan pokok dan tidak membebani masyarakat.

“Ketidakseimbangan harga selama ini karena ada kartel, mafia, sehingga terjadi monopoli, dan mereka ini yang menentukan harga, yang jauh lebih mahal dari harga seharusnya. Misalnya daging sapi yang seharusnya Rp70 ribu dijual sampai Rp120 ribu/Kg, minyak goreng Rp6.000,- dijual

Rp9.000, juga gula Rp6.000 dijual Rp 14.000,-,” tegas Eka Sastra dalam forum legislasi “RUU Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” bersama Komisioner KPPU Hj. Saidah Sakwan dan pengamat ekonomi INDEF Sugiono di Gedung DPR RI Jakarta, baru-baru ini.

Karena itu, kata Eka, KPPU harus diperkuat. Sebab, kalau untungnya @ Rp4.000,- untuk kebutuhan 5 juta Kg gula/tahun, maka akan beruntung sampai Rp20 triliun. KPPU Amerika Serikat posisinya terhormat karena memiliki kewenangan untuk melakukan harmonisasi harga.



Celaknya di akhir tahun 2009, ada amandemen UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, justru memperbolehkan kartel bermain di hilir. Akibatnya sebanyak 20% kompetitor lokal habis, gulung tikar, dan 80% inti plasma terintegrasi dengan integrator, yang menentukan harga di pasar.



Selain itu kalau terjadi praktek tidak sehat menurut Eka, dalam UU juga denda harus diperberat bukan saja Rp 25 miliar, melainkan harus lebih berat lagi. Saat ini justru ada upaya untuk memperlemah KPPU, karena KPPU sudah bisa masuk komoditi nasional. Seperti gula, terigu, beras, daging, dan lain-lain. “Kalau KPPU kuat, maka akan menjadi inovatif, kreatif, dan masyarakat akan menikmati harga murah. Terlebih pendapatan masyarakat sebanyak 80 % adalah untuk kebutuhan pangan,” tambah politisi Golkar ini.

Menurut Saidah Sakwan, UU ini lahir pasca reformasi 1998, yang mandatnya hanya dua, yaitu terwujudnya demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. “Demokrasi politik sudah kita nikmati dengan adanya Pemilu secara langsung, tapi untuk menciptakan ekonomi masih angan-angan atau mimpi,” ungkapnya.

Karena itu kata mantan politisi

PKB ini, UU ini harus mereformasi dan konsentrasi pada semua basis industri, yang terstruktur, oligopoly, dan terintegrasi. Mengingat untung dari ayam potong saja bisa mencapai Rp 450 triliun/tahun. Padahal, kartel besarnya hanya dua, yaitu Thailand dan Singapura.

Di Indonesia ada 20 market, dan direbut oleh 60 pengusaha lokal. Hanya saja sementara ini dari hulu ke hilir masih dikuasai kartel tersebut. “Celaknya di akhir tahun 2009, ada amandemen UU Peternakan dan Kesehatan Hewan, justru memperbolehkan kartel bermain di hilir. Akibatnya sebanyak 20% kompetitor lokal habis, gulung tikar, dan 80% inti plasma terintegrasi dengan integrator, yang menentukan harga di pasar,” jelas Saidah.

Artinya kata Saidah, struktur pasar yang ingin kita rubah karena hal ini sudah termasuk *extra ordinary crime*. Sama halnya dengan pasar sepeda motor matic. Honda menguasai 70%, dan Yamaha 20%, dan sisanya yang lain. “Jadi, Honda dan Yamaha lah yang menentukan sepeda motor di Indonesia ini,” tuturnya.

Harga kartel selalu mahal. Honda yang seharusnya Rp 9,5 juta dijual Rp 14 juta. Kondisi ini menunjukkan bahwa struktur dan strategi pasar kita belum selesai. “Bahkan banyak kebijakan kita justru memfasilitasi suburnya kartel. Untuk itu, KPPU dan DPR RI terkait masalah daging ini sepakat tidak menggunakan istilah kuota, tapi tarif, karena kartel ini medistorsi pasar rakyat,” tegas Saidah.

Apalagi kini sudah terjadi jaringan kartel lintas negara (*cross order cartel*). Seperti di Batam dengan Singapura dalam hal angkutan peti kemas, yang harganya sangat mahal dan implikasinya rakyat akan membeli dengan harga yang juga mahal. “Jadi, jangan sampai kita gagap regulasi, dan UU No.55 tahun 1999 itu sudah tidak

relevan lagi karena hanya berlaku untuk NKRI. Sedangkan pasar kita sudah masuk MEA dan pasar bebas,” tambahnya.

Hal itu bisa dibayangkan di dunia elektronik. SMS saja kata Saidah, yang harganya Rp78 plus biaya operator dan lain-lain hanya menghabiskan Rp120,- tapi dijual per sms ke konsumen Rp350,-. Alhasil, selama dua tahun itu 8 jaringan telekomunikasi mengantongi Rp2,9 triliun. “Itu hanya dari sms. Demikian bandwith soal Mukidi,” katanya.

Karena itu, pemerintah sesungguhnya tidak perlu dengan UU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), karena dari efisiensi APBN Rp 2.000 triliun dan Rp800 triliun untuk belanja barang, ternyata bocornya 30% atau setara Rp250 triliun. “Sebaiknya pemerintah tak usah repot-repot dengan *Tax Amnesty*, tapi mengefisienkan APBN sudah cukup,” pungkasnya.

Sugiono meminta DPR RI hati-hati dalam membahas RUU ini dengan langkah-langkah cerdas, karena sering kalah di pengadilan. “Basisnya harus kuat mengingat banyak perusahaan besar tidak menginginkan KPPU kuat. Sebab, kalau KPPU kuat, maka untung mereka akan kecil,” ujarnya singkat. ■



Pemerintah sesungguhnya tidak perlu dengan UU Pengampunan Pajak (*Tax Amnesty*), karena dari efisiensi APBN Rp 2.000 triliun dan Rp800 triliun untuk belanja barang, ternyata bocornya 30% atau setara Rp250 triliun.



Intelektual Muda di Panggung Politik

Ramah menyapa saat Parlementaria berkunjung ke ruang kerjanya yang tertata rapi. Ia politisi muda yang cerdas dan optimistis. Tuturnya jelas penuh wawasan. Inilah Dodi Reza Alex Noerdin Wakil Ketua Komisi VI DPR RI. Pria berdarah Palembang ini sangat senang berbagi cerita tentang romantisme masa kecilnya di Kota Palembang. Selalu ada jejak kenangan tak terlupakan dari masa kecilnya dahulu.

Saat ini, Dodi sudah memasuki periode keduanya sebagai Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar. Berbicara tentang dunia usaha dan perekonomian nasional, Dodi orang yang tepat untuk diajak bertukar pikiran. Berlatar pendidikan ekonomi dan pengusaha, dia memang sangat mumpuni di bidang ekonomi.

Masa Kecil di Palembang

Mentari pagi belum terlalu tinggi menyinari Kota

Palembang, Sumatera Selatan. Hari itu Minggu, sepasang insan sedang menanti kelahiran buah hati pertamanya. Tangis bayi seketika memecah kesunyian. Bayi mungil laki-laki terlahir. Adalah Alex Noerdin dan Eliza Alex sepasang insan yang sedang berbahagia. Kalender yang tergantung di dinding menunjukkan 1 November 1970. Tahmid sebagai ungkapan syukur tiada henti terucap.

Kini, di kediaman Alex Noerdin dan Eliza ada jagoan kecil yang membahagiakan seisi rumah.

Bayi kecil itu kemudian diberi nama Dodi Reza Alex Noerdin. Dodi kecil tumbuh di lingkungan keluarga religius dan penuh disiplin. Ayahnya ketika itu masih membuka usaha kecil-kecilan sambil menempuh studi sebagai mahasiswa. Setelah kelahiran Dodi, masih ada dua adiknya yang lahir kemudian. Jadi Dodi adalah sulung dari tiga bersaudara.

Daerah kelahiran Dodi

adalah Talang Semut di Palembang, sebuah kawasan perumahan elit peninggalan kolonial. Arsitektur rumahnya sarat dengan sentuhan desain Hindia Belanda. Waktu itu, mayoritas penduduk di kota ini berprofesi sebagai pedagang dan pegawai. Masa kecil Dodi dihabiskan di Palembang dan beberapa tahun di Jakarta.

Bersama sahabat-sahabat kecil, ia suka sekali bermain sepeda hingga ke batas kota. Dodi kecil mudah berbaur dan disenangi teman-temannya. Karena banyak pohon karet, Dodi suka mencari biji karet atau disebut juga buah para. Buah ini sangat keras dan biasanya oleh anak-anak dipakai untuk diadu kekerasannya dengan cara saling ditumbuk. Adu buah para sudah menjadi permainan rakyat.

Sebagai anak laki-laki, Dodi kecil juga sangat menyukai sepak bola. Hampir setiap hari, bila ada kesempatan, dia dan teman-temannya selalu menyempatkan diri bermain bola. Tidak saja di sekolah, di lingkungan rumah pun, ia tak melupakan bermain bola bersama sahabat-sahabat kecilnya. Posisinya selalu menjadi kiper. *Wah, pokoknya dia gila bola.*

foto : Rumi/hw



Dodi Reza Alex Noerdin

Karena kegemarannya pada sepak bola, hingga dewasa pun ia begitu peduli pada olahraga ini terutama di daerahnya sendiri. Dia ikut membesarkan Sriwijaya FC sebagai Presiden SFC, klub sepakbola asal Palembang yang menjuarai Piala Indonesia tiga kali berturut-turut (2007, 2008, 2009). Laskar Wong Kito ini juga pernah juara Liga Indonesia dua kali.

Sementara itu, mengawali pendidikan formalnya, Dodi kecil pernah sekolah di SDN 01 Menteng, Jakarta. Keberadaannya di Jakarta, karena waktu itu, ayahandanya bekerja dan kuliah di Ibu Kota. Di Jakarta hanya sampai kelas lima. Naik ke kelas enam, Dodi kembali tinggal di Palembang dan melanjutkan di SD PPKP. Ayahandanya pindah kerja kembali ke Palembang dan meniti karir sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) hingga menjadi seorang Bupati dan kini sebagai Gubernur.

Lulus tahun 1982, Dodi lalu melanjutkan ke SMP Xaverius II Palembang, sekolah Katolik yang menerapkan disiplin Belanda. Selepas SMP, Dodi melanjutkan ke SMAN 1 Palembang. Ia siswa teladan yang selalu menempati ranking teratas di sekolahnya. Karena prestasinya itulah, ia terpilih dalam pertukaran pelajar internasional saat masih duduk di kelas dua SMA.

Dodi mewakili Provinsi Sumatera Selatan ke pertukaran pelajar di Kanada dengan beasiswa dari Depdikbud. Kelas tiga SMA, dia selesaikan di sana selama setahun. Usai menamatkan pendidikan menengah, tahun 1990, Dodi mendapat PMDK dari Fakultas Teknik, UGM Yogyakarta. Tapi, ia tak mau mengambalnya, karena lebih tertarik pada ilmu ekonomi.

Menuntut Ilmu ke Luar Negeri

Masa muda Dodi dihabiskan untuk menuntut ilmu di tiga negara, Kanada, Belgia, dan Amerika. Di

Kanada untuk SMA dan perguruan tinggi di Belgia dan Amerika. Dia tumbuh menjadi pemuda produktif dan cerdas. Prestasi akademiknya juga sangat mentereng. Setamat SMA di Kanada, pemuda Dodi memulai studi ilmu ekonomi di *University of Leuven*, Belgia pada 1991. Tesisnya ditulis dengan bahasa Prancis dan mendapat penghargaan *BBL Prize Award*, sebuah penghargaan bergengsi yang memilih tesis terbaik dari seluruh universitas di Belgia.

Dodi lulus dengan predikat *Grande Distinction (High Honour)* pada 1996. Setahun kemudian, meneruskan pendidikan magisternya di negara yang sama, tepatnya di *Solvay Business School, Université Libre de Bruxelles, Brussels*. Ia lulus tahun 1997 dengan predikat *Magna Cum Laude* dan berhak atas gelar *Master of Business Administration (MBA)*.

Masa-masa menuntut ilmu di luar negeri, selalu dibumbui rasa rindu pada Tanah Air dan kampung halaman. Masakan khas dan teman-teman di Indonesia selalu membawa romantisme kerinduan. Yang paling menyenangkan saat lebaran atau momen 17 Agustus tiba. Semua pelajar dan mahasiswa Indonesia biasanya berkumpul di KBRI. Di sinilah tempat melepas rasa rindu, bertemu dengan orang-orang Indonesia dari berbagai daerah.

Di Belgia, Dodi pernah menjadi Ketua Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan membentuk *group band* PPI. "Saya pegang *keyboard*. Sekarang pun kalau ada waktu luang, sesekali ingin menggebuk drum," ungkapnya, tersenyum.

Selepas menempuh pendidikan magister dan magang di perusahaan multinasional di Eropa, pemuda Dodi pulang ke Tanah Air untuk bekerja di Jakarta dan merintis menjadi pengusaha. Tahun 1997, setelah magang di Citibank London, Dodi sempat bekerja sebagai *Tresury*

Department Manager di PT. Bakrie and Brothers. Setahun kemudian menjadi Senior Manager di PT. Citra Marga Nusaphala Persada.

Karir wirausahanya sudah dimulai ketika tahun 1990 menjadi Komisaris di PT. Grita Artha Kreamindo (5a Sec Indonesia), Jakarta. Setelah itu, ia menjadi Direktur PT. Mitra Pratama Khatulistiwa tahun 2000 hingga sekarang. Lalu menjadi Presiden Direktur di sejumlah perusahaan di Palembang dan Jakarta. Misalnya, ia pernah menjadi Presdir di PT. Radio Trijaya FM dan Radio TPI.

Dodi juga menjadi Presdir di PT. Pandji Media Gemilang dan PT. Pandji Media Network, keduanya di Palembang. Dan berbagai macam perusahaan yang bergerak di perkebunan, pertambangan, dan energi. Pada tahun 2010 ia kembali ke dunia akademik untuk memperdalam keilmuannya dalam bidang ekonomi. Dodi mengikuti *Fellowship on IDEAS 2.0, Massachusetts Institute of Technology (MIT), Sloan School of Management, Cambridge MA*, di Boston, Amerika Serikat.

Kecintaannya pada ilmu pengetahuan sangat terjaga. Kapasitas intelektualnya sangat terlihat. Ketua Umum KADIN Sumatera Selatan ini, mampu menerapkan keilmuannya untuk menunjang profesinya. Di mana pun ia berada, selalu tampil profesional. Saat ini pun ia masih menyempatkan diri mengikuti kuliah program Doktorat di UNPAD, Bandung.

Panggung Politik

Sebagai profesional muda, Dodi juga aktif berorganisasi. Organisasi kepemudaan dan profesi pernah digelutinya. Dodi sudah aktif berorganisasi pada tahun 1986. Ketika itu, ia menjadi Anggota Majelis Sabuk Hitam, Institut Karate-do Indonesia. Bahkan, ketika masih menjadi pelajar dan mahasiswa, dia juga aktif berorganisasi.

Saat masih di Kanada, Dodi sudah menjadi *Member of The Canadian Red Cross Society, British Columbia, Canada*. Lalu, saat menjadi mahasiswa di Belgia, Dodi menjadi Sekretaris Jenderal Asosiasi Sarjana ekonomi Leuven (ADEL). Di bidang olahraga, Dodi juga turut aktif. Misalnya, menjadi Anggota Perbakin pusat, Pembina *Skyland Motor Sport Sumsel*, dan Ketua Umum Perbasi Sumsel.

Tidak hanya itu, Dodi pernah menukangi Institut Karate-do Indonesia (INKAI) Sumsel dengan menjadi Ketua Umum. Bahkan, sejak 2007 hingga sekarang menjadi Pembina Muba Hangtuh *Indonesian Basketball League (IBL) Sumsel*. Di dunia sepakbola, Dodi adalah Presiden *Sriwijaya Football Club* dan Anggota Komite Ad-Hoc Klub Profesional *Asian Football Confederation (AFC)* di Kuala Lumpur, Malaysia, dan anggota *Executive Committee (Exco) PSSI* hingga kini.

Sementara untuk organisasi profesi, Dodi pernah dipercaya menjadi Ketua Umum HIPMI Sumsel tahun 2007-2010. Ia juga aktif di Majelis Penasihat Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) periode 2015-2020. Sebelumnya, pernah pula didaulat sebagai Ketua Komite Tetap Perdagangan Dalam Negeri KADIN Indonesia pada 2010-2015.

Pergaulannya yang sangat luas mengantarnya pada aktivitas politik. Dodi mengikuti jejak sang ayah menjadi politisi dan masuk Partai Golkar. Pada Pemilu 2009, Ketua DPP Partai Golkar bidang Pemenangan Pemilu Sumatera ini mencalonkan diri menjadi anggota parlemen dari Dapil Sumsel I meliputi Kab. Banyuasin, Kab. Musi Banyuasin, Kab. Musi Rawas, Kab. Musi Rawas Utara, Kab. Lubuk Linggau, dan Kota Palembang. Dodi pun terpilih dengan suara terbanyak nasional untuk Partai Golkar dan melenggang ke Senayan.

Pada periode pertamanya



Saat memimpin rapat di Komisi VI.

foto: Jaka/iw

(2009-2014) di DPR RI, Dodi langsung berkiprah di Komisi III yang membidangi masalah hukum. Dengan menjadi anggota dewan, ia masuk ke jantung kebijakan dan ikut merumuskan berbagai kebijakan publik. Memasuki Pemilu 2014, pria yang pernah menjadi Ketua Delegasi RI ke Sidang Umum PBB ini, kembali menjadi caleg dari dapil yang sama. Setelah terpilih lagi dengan suara terbanyak, Dodi kemudian dipercaya menduduki kursi Wakil Ketua Komisi VI.

Komisi ini membidangi perdagangan, perindustrian, BUMN, dan koperasi. Di Komisi tersebut, Dodi dipercaya menjadi Ketua Panja PMN dan Ketua Panja RUU BUMN. Menurut Ketua DPP MKGR Bidang Hubungan Luar Negeri tersebut, BUMN di Indonesia harus mengubah *mindset*. BUMN bukan perusahaan yang terus disuapi pemerintah, juga bukan sapi perah pemerintah. "BUMN adalah korporasi yang harus bersaing dengan perusahaan multinasional maupun di dalam negeri."

Bahagia Bersama Keluarga

Di tengah kesibukannya sebagai wakil rakyat, Dodi tetap memberi perhatian lebih pada keluarga. Di

rumah ia tetaplah seorang ayah dan suami yang bersahaja. Ada Thia Yufada istri tercinta yang dinikahinya pada 2003. Kali pertama mengenal Thia, saat Dodi masih menjadi profesional di sebuah perusahaan. Thia adalah mantan *news anchor* di Metro TV. Wajahnya selalu muncul di layar kaca lewat program *Prime Time News*.

Dari pernikahannya itu, Dodi dikaruniai si kembar Alleta Khayyara Alex dan Atalie Mazzaya Alex. Saat punya waktu luang, Dodi kerap menyempatkan waktu berwisata bersama keluarga tercinta ke objek yang memiliki wahana atraksi untuk anak. "Tidak harus ke luar negeri. Bali dan Bandung pun bisa jadi destinasi favorit keluarga. Yang penting ada yang menarik untuk anak-anak," ujar pria yang menguasai tiga bahasa asing ini, Inggris, Prancis, dan Belanda.

Di waktu senggang, Dodi juga kerap menjalani hobinya pada musik dan *travelling*. Hobi lainnya adalah olahraga dirgantara dan menembak. Dodi pernah mengikuti pendidikan penerbang *Private Pilot Licence* dari *Deraya Flying School* di Halim Perdana Kusuma. Sementara untuk menembak, Dodi pun pernah meraih sertifikat penembak kelas A dari Perbakin Pusat.

Sementara bila ditanya soal lagu kesukaannya, hampir semua genre lagu dia sukai, termasuk lagu klasik. "Semua lagu saya sukai. Dan sekarang grup kesukaan saya adalah Il Volo dari Italia," tutur peraih *Democracy Award* dari Rakyat Merdeka Group sebagai politisi muda yang berprestasi di Senayan.

Tapi bila didaulat untuk menyanyi, Dodi mengaku kurang percaya diri. Lagu yang didendangkannya pun bergantung suasana acara. "Kalau ada *backing vocal* yang mengiringi lebih bagus dan saya lebih pede, karena suara saya pas-pasan," kilahnya, tertawa. ■



Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemi Francis meninjau langsung Bandara Bajawa, Kampung Adat Bena dan Pelabuhan Aimere Provinsi Nusa Tenggara Timur. Foto: Husen/iw





Komisi I DPR RI melakukan fit and proper test terhadap calon tunggal Kepala BIN Budi Gunawan dan dilanjutkan Sidang Paripurna DPR RI yang mengesahkannya menjadi Kepala BIN. Foto: Jaka, Andri /iw





Tim Kunker BURT DPR RI dipimpin Wakil Ketua Elva Hartati meninjau Semen Padang Hospital, di Sumatera Barat. Foto: Husen/iw





*Tim Kunspek Komisi IV DPR RI dipimpin Ketua Komisi Edhy Prabowo meninjau Perum Bulog Subdivre Ciamis dan berdialog dengan Wakil Bupati serta petani di Bandung Barat.
Foto: Jaka/iw*





Tim Kunspek Komisi VI DPR RI dipimpin Wakil Ketua Farid Al-Fauzi meninjau IKM Ragenda Mop Perhiasan di Kota Mataram, dan IKM Produk Tenun di Sukarara, Lombok Tengah. Foto: Iwan Armanias/iw





*Tim Kunspek Komisi III DPR RI dipimpin Wakil Ketua Benny K Harman meninjau Padepokan Dimas Kanjeng Taat Pribadi di Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur.
Foto: Iwan Armanias/iw*





Tim Kunspek Komisi V DPR RI dipimpin Ketua Komisi Fary Djemi Francis meninjau perbatasan Kaltara dan meninjau pembangunan infrastruktur di Minahasa Utara dipimpin Wakil Ketua Lasarus.

Foto: Singgih, Mastur /iw





Tim Kunspek Komisi VIII DPR RI dipimpin Ketua Ali Taher meninjau Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Naketi 3 Desa Kolhua, Kota Kupang, NTT.
Foto: Suci/iw





Pimpinan DPR RI didampingi sejumlah Anggota DPR RI, Sekjen DPR RI dan Kepala BKD menghadiri acara press gathering Wartawan Koordinatoriat DPR RI dengan tema "Melindungi Bali, Sebagai Destinasi Wisata Berkearifan Lokal" di Hotel Ramada Bintang, Bali. Foto: Jaka, Arief/iw





Persaudaraan Istri Anggota (PIA) DPR RI memberi bantuan kepada para pengungsi korban Banjir Bandang, Garut, Jawa Barat. Foto: Rizka/iw





Tim Kunspek Komisi X DPR RI dipimpin Wakil Ketua Abdul Fikri Faqih meninjau pelaksanaan PON XIX di Kawasan Jalak Harupat, Jawa Barat. Foto: Runi/iw



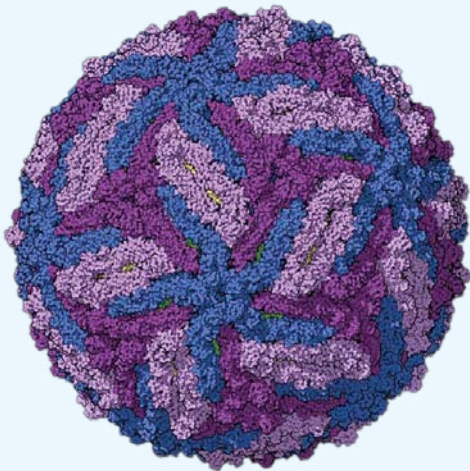


Ada Apa dengan Zika?

Zika merajalela. Dunia berduka. Indonesia waspada.

Virus Zika (ZIKV) merupakan arbovirus dari genus *Flavivirus/Alphavirus*, keluarga *Flaviviridae/Togaviridae* dari kelompok *Spondweni*. Virion Zika berbentuk ikosahedral, berdiameter 18-45 nanometer. RNA mengandung 10.794 nukleotida yang mengkode 3419 asam-asam amino. Virus diinaktivasi oleh ether, sodium dextroxycholate, dan kloroform.

ZIKV dapat bereplikasi di sitoplasma seluler atau di sel-sel dendritik di dekat tempat inokulasi lalu menyebar ke kelenjar limfe dan aliran darah. Antigen ZIKV dapat dijumpai di sel nukleus yang terinfeksi.



Gambar: Selubung virus Zika (diwarnai), sumber: Sirohi D, dkk (2016)

Vektor utama adalah nyamuk *Aedes*, dengan vektor potensialnya dari *Aedes spesies africanus, albopictus, polynesiensis, unilineatus, vittatus, dan hensilli*.

ZIKV pertama kali diisolasi dari

darah Rhesus kera (*Macaca mulatta*) di hutan Zika, Uganda, tahun 1947. Kemudian diisolasi dari nyamuk *Aedes africanus* di hutan yang sama tahun 1948, dan manusia di Nigeria tahun 1952. Pola transmisi melalui tusuk-isap nyamuk genus *Aedes* yang terinfeksi ZIKV. Transmisi perinatal dapat terjadi tersering melewati ari-ari selama proses persalinan saat ibu terinfeksi. Transmisi seksual dan melalui transfusi juga berpotensi

di sampel darah 24 pasien di Bahia, Brazil. Transmisi ZIKV menyebar ke seluruh dunia hingga menjadi kewaspadaan global. Epidemik di Brazil diperkirakan 440 ribu hingga 1,3 juta kasus. Di bulan Mei 2015, *Pan American Health Organization (PAHO)* menerbitkan surat peringatan terkait adanya konfirmasi kasus infeksi ZIKV pertama di Brazil. Serangan ZIKV telah merajalela hingga ke 30 negara di Amerika (termasuk Brazil dan

Tabel 1. Tahun Penting Kejadian Zika di Dunia

1952	Di Uganda pertama kali kasus ZIKV di manusia.
2007	Di Pulau Yap (Micronesia), 108 kasuster konfirmasi.
2008	Di Colorado (USA), pertama kali kasus transmisi seksual ZIKV.
2013	Di Tahiti (French Polynesia), 8510 kasusklinis ZIKV.
2014	Di Kaledonia Baru, 40 kasus ZIKV. Di Pulau Cook, 40 kasus ZIKV.
2015	Di Brazil, 440.000 hingga 1,3 juta kasus suspek ZIKV menurut Kementerian Kesehatan Brazil. Di Indonesia, ZIKV terdeteksi di Jambi.
2016	28 Agustus 2016, 41 kasusterkonfirmasi ZIKV dijumpai di Singapura. 25 Agustus 2016, 70 negara dilaporkan positif terjangkit ZIKV sejak 2007. 53 dari negara ini positif sejak tahun 2015. Juni 2016, transmisi ZIKV dijumpai di provinsi Beung Kandan Phetchabun, Thailand.

Data primer, diolah dari berbagai sumber

menularkan ZIKV. *Timeline* wabah ZIKV global dapat dilihat pada tabel 1.

Berdasarkan distribusi geografis, ZIKV telah merajalela di banyak negara. Studi virologis, survei *seroprevalence*, diagnosis kasus-kasus sporadis dan epidemis berhasil mengidentifikasi ZIKV di Afrika (Senegal, Uganda, Nigeria, Pantai Gading, Gabon, Tanzania, Mesir, SierraLeone, dsb), di Asia (Kamboja, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam), di Oceania, Pasifik (Micronesia/Yap, FP, Kaledonia baru, dan pulau Cook).

Pada 26 Maret 2015, *outbreak* Zika Virus (ZIKV) yang ditransmisikan melalui nyamuk *Aedes*, terdeteksi

Columbia), kepulauan Pasifik/Oseania, dan Afrika. Di Indonesia, ZIKV diduga ada di Sulawesi. Tampaknya, mata rantai ZIKV sulit diputus mengingat ada kemungkinan telah terjadi mutasi.

Potret Klinis

ZIKV terkait erat dengan *dengue*, demam kuning, ensefalitis Jepang, dan *West Nile virus*.

Umumnya, 60-80% infeksi ZIKV asimtomatis (tidak bergejala). Bila ada, maka gejala-gejala penyakit Zika serupa dengue dan chikungunya, seperti: demam ringan, ruam kemerahan kulit (*maculopapular rashes*) yang seringkali muncul di wajah dan kemudian menyebar, dari wajah turun ke lengan

dan tungkai, seringkali terasa gatal, nyeri sendi, nyeri otot, bengkak di anggota gerak (tangan dan kaki), mata merah (konjungtivitis atau konjungtiva hiperemia), nyeri otot (*myalgia*), sakit kepala atau vertigo, flu yang berlangsung selama 2-7 hari. Nyeri mata atau disekitarnya (retro-orbital) dan gangguan organ di perut (usus dan saluran pencernaan) meskipun dapat dijumpai, jarang terjadi. Periode inkubasi berlangsung selama 3-12 hari.

Kalangan medis terkadang kesulitan membedakan demam dengue, Chikungunya, dan Zika. Penderita dengue sering ditandai demam tinggi, nyeri otot berat, sering terjadi komplikasi saat demam mereda dan tanda-tanda perdarahan. Penderita Chikungunya dikenali dari demam tinggi dan nyeri hebat di persendian (tangan, lutut, kaki, punggung). Penderita ZIKV tidak memiliki karakteristik yang jelas, selain ruam kulit dan konjungtivitis. Lebih jelasnya silakan memahami Tabel 2.

neurologis-otoimun seperti: sindrom Guillain-Barré dari ibu yang mungkin terpapar ZIKV di dua trimester pertama kehamilan. Meskipun demikian, kasus ZIKV berat sampai dirawat di rumah sakit, hingga kematian akibat ZIKV jarang dijumpai.

Diagnosis

Penegakan diagnosis utama melalui deteksi RNA ZIKV dari spesimen darah penderita. Virus terdeteksi melalui tes PCR (*polymerase chain reaction*). Tes PCR memberikan hasil positif dalam 3-5 hari setelah onset gejala. Periode viremia singkat, memungkinkan deteksi virus secara langsung selama 3-5 hari pertama setelah onset gejala. RNA ZIKV terdeteksi di urin hingga sepuluh hari setelah onset penyakit.

Di hari kelima setelah onset demam, uji serologis dapat dilakukan dengan deteksi antibodi IgM spesifik Zika dan konfirmasi dengan netralisasi, serokonversi atau peningkatan titer

paparan terhadap infeksi flavivirus sebelumnya.

Solusi

Terapi bersifat simtomatis, maksudnya hanya bertujuan meredakan gejala (demam) dan menghilangkan nyeri. Dokter akan merekomendasikan acetaminophen atau terapi lain sesuai indikasi. Antihistamin dapat direkomendasikan untuk mengatasi kulit gatal dan kasus alergi. Hindari pemberian aspirin dan golongan anti-inflamasi non-steroid. Hendaknya tidak membeli obat sendiri, mengingat efek samping yang berpotensi terjadi.

Hingga kini memang belum ada vaksin atau terapi khusus untuk mengatasi infeksi ZIKV. Manajemen ZIKV difokuskan pada upaya preventif (pencegahan infeksi). Misalnya, larangan bepergian ke daerah endemis ZIKV, terutama bagi ibu hamil. Hindari gigitan nyamuk dengan memakai kelambu, losion antinyamuk, baju lengan panjang, serta celana panjang. Sarung tangan, kaus kaki, topi, masker boleh digunakan sepanjang nyaman. Bila memiliki bayi atau anak, maka jangan menggunakan penolak serangga untuk bayi berusia kurang dari dua bulan. Kenakanlah pakaian panjang dan berwarna terang. Hindari memakai penolak serangga untuk tangan, mata, mulut, kulit yang iritasi atau terluka pada anak kecil. Hindari menggunakan produk *permethrin* langsung ke kulit. Insektisida untuk eliminasi nyamuk dapat dilakukan secara periodik. Memakai kelambu, terutama untuk bayi, saat tidur untuk menghindari nyamuk.

Untuk mencegah dehidrasi, direkomendasikan untuk mengendalikan demam, beristirahat, dan konsumsi (air, buah, sayur, serat, multivitamin, mineral) sesuai kebutuhan. Intinya, berpola hidup sehat dan seimbang, fisik-mental, jasmani-rohani. ■ (Dito Anurogo, dokter digital, penulis 18 buku. email: dito.anurogo@mail.ugm.ac.id)

Tabel 2. Perbandingan Gejala Dengue, Chikungunya, Zika

Gejala	Dengue	Chikungunya	Zika
Demam	++++	+++	+++
Nyeri sendi/otot	+++	++++	++
Bengkak di tangan dan/atau kaki	0	0	++
Ruam kemerahan	++	++	+++
Nyeri di sekitar mata	++	+	++
Konjungtivitis	0	+	+++
Limfa denopati	++	++	+
Hati membesar	0	+++	0
Leukopenia/trombopenia	+++	+++	0
Perdarahan	+	0	0

Sumber: loos S, dkk (2014)

Efek ZIKV benar-benar mengkhawatirkan. Pada bayi baru lahir, ZIKV menyebabkan mikrosefali (kepala kecil) dan malformasi, kondisi

antibodi spesifik Zika empat kali lipat di pasangan sampel serum. Hasil uji serologis sebaiknya diinterpretasikan berdasarkan status vaksinasi dan



foto : Husen/iw

Delegasi BURT DPR RI mengunjungi Semen Padang Hospital di Kota Padang

BURT Kunjungi RS di Padang dan Semarang

Belajar dari SPH, Mengubah *Mainstream*

Melihat bentuk bangunannya seperti bukan Rumah Sakit (RS). Saat memasuki lobinya, yang tersuguh justru cafe, pertokoan, dan tempat bermain anak. Inilah Semen Padang Hospital (SPH) di Kota Padang, Sumatera Barat. Desain SPH tidak melulu menampilkan ruang-ruang pemeriksaan, rawat inap, atau bangsal yang kerap menakutkan para pasien. Kesan pertama yang coba dirubah dari *mainstream* sebuah RS.

Para dokter dan pelayan di sini tak mengenakan baju putih. Ini memberi kesan lain yang menyenangkan bagi para pasien yang datang. Dengan atmosfer ini, tingkat stres para pasien menurun dan diupayakan bisa sembuh

lebih cepat. Bahkan, diharapkan pasien sehat kembali sebelum diperiksa dokter.

Delegasi Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua BURT Elva Hartati mengunjungi SPH untuk melihat dari dekat layanan kesehatan yang diberikan. Semen Padang Hospital (SPH) adalah salah satu RS provider dari PT. Jasindo yang mengeluarkan produk Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi para Anggota DPR RI dan keluarganya. Di SPH ini, para Anggota DPR RI mendapat layanan VVIP.

Berbagai layanan dan fasilitas kesehatan VVIP ditinjau langsung oleh BURT. Semua Anggota dan Pimpinan BURT mengapresiasi layanan dan fasilitas VVIP yang tersedia di

SPH. “Layanannya saya lihat sudah sangat baik,” nilai Elva saat ditemui usai meninjau SPH di Padang, awal September lalu.

Tak hanya layanan VVIP, layanan bagi masyarakat umum juga dilihat. SPH tak hanya melayani karyawan Semen Padang, masyarakat umum pun bisa berobat di sini. Bahkan, peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan terlayani pula dengan sangat baik. Wakil Ketua BURT lainnya, Novita Wijayanti juga mengapresiasi SPH dan Jasindo. BURT, katanya, berkepentingan meninjau SPH untuk mengetahui sejauh mana layanan kesehatan yang diberikan.

“Kita ingin melihat bagaimana kerja sama, koordinasi, dan sosialisasi yang

dilakukan Jasindo dengan rumah sakit provider, di antaranya adalah rumah sakit Semen Padang ini,” ungkap Novi.

Anggota F-Gerindra ini, juga mengapresiasi manajemen SPH yang mendesain bangunannya tidak seperti rumah sakit, tapi seperti mal. Dengan desain ini, pasien tak perlu takut ke RS dan tak perlu takut pula bila ingin dioperasi, karena suasananya seperti di mal.

RS lainnya di seluruh Indonesia

para pasien juga sangat diapresiasi. Semua pelayan RS mengenakan busana warna hijau atau biru, bukan putih yang kerap menakutkan pasien. Ichi sangat setuju dengan pola layanan dan desain seperti ini. “Dulu saya juga menyarankan agar RS didesain senyaman mungkin dan pelayan RS tidak mengenakan busana putih. Pasien biasanya merasa takut kalau sudah bertemu pelayan berbaju putih,” ungkap Ichi.

Delegasi BURT ini meninjau setiap ruang VVIP dan ruang perawatan bagi masyarakat umum. Di ruang perawatan umum, ada pasien cuci darah yang menggunakan fasilitas JKN dari BPJS Kesehatan. Semua terlayani dengan sangat baik. Yusri, pasien cuci darah tersebut, setiap dua minggu harus cuci darah dan ini sudah lima tahun berjalan. Sebelum menggunakan JKN, ia harus membayar Rp 800 ribu sekali cuci darah.

Sebelumnya, di waktu dan tempat yang berbeda, delegasi BURT juga meninjau Rumah Sakit Karyadi Semarang, Jateng. Rumah Sakit ini juga bekerja sama dengan Jasindo untuk membuka layanan Jamkestama

bagi pasien VVIP para anggota dewan dan keluarganya. Hanya saja, Rumah Sakit besar di Jateng ini baru membuka kerja sama dengan Jasindo pada 2016. Wakil Ketua BURT Agung Budi Santoso menilai, Jasindo kurang cepat menjalin kerja sama dengan RS Karyadi tersebut.

“Ini harus mendapatkan perhatian direksi Jasindo untuk segera memperbaiki temuan ini, sehingga pelayanan kesehatan bagi anggota dewan dan keluarganya dapat lebih baik dari rumah sakit provider,” komentar Agung. Temuan baru seperti ini, akan menjadi bahan evaluasi di internal BURT. Mestinya, lanjut Agung, beberapa RS besar di setiap provinsi sudah menggelar layanan Jamkestama.

Politisi Partai Demokrat ini, mengungkapkan bahwa dalam kunjungan kali ini ada beberapa temuan yang didapat. Pertama, belum semua RS mengetahui SOP dari Jasindo, sehingga ada standar yang berbeda di setiap RS. Kedua, BURT belum mengetahui harga standar kamar yang menjadi hak peserta Jamkestama VVIP. Selanjutnya, masih ada RS yang belum paham dengan program Jamkestama VVIP. ■

(mh/as)

Ini harus mendapatkan perhatian direksi Jasindo untuk segera memperbaiki temuan ini, sehingga pelayanan kesehatan bagi anggota dewan dan keluarganya dapat lebih baik dari rumah sakit provider.

mungkin harus memulai mendesain bangunan dan pelayanannya seperti di SPH. Semua Anggota BURT memuji SPH. Tak ketinggalan Anggota BURT Andi Fauziah Pujiwatie Hatta mengapresiasi fasilitas dan layanan kesehatan di SPH. Layanan kesehatan VVIP untuk Anggota DPR RI juga sangat baik. “Hanya saja belum ada loket khusus untuk Anggota DPR RI di rumah sakit ini,” ujar Ichi, sapaan akrabnya.

Desain Rumah Sakit (RS) yang menghilangkan kesan “angker” bagi



Delegasi BURT DPR RI mengunjungi Rumah Sakit Karyadi Semarang

foto : Agung/iw

DPR RI Nilai Angkasa Pura I Lalai Kelola Asset

Tanggal 15 Agustus 2015 dinihari sekitar pukul 00.30 WITA bandara lama di Maros, Makassar terbakar. Pada peristiwa kebakaran tersebut, api menghancurkan seluruh bangunan terminal mulai dari barat hingga timur terminal bandara lama. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian material mencapai miliaran rupiah. Gedung yang terbakar diasuransikan dan beberapa asset penting berhasil diselamatkan, seperti Gedung VIP, Gedung arsip dan tiga unit pesawat.

Penyebab kebakaran, dapat dipastikan bukan karena arus pendek listrik, mengingat sambungan listrik pada gedung tersebut sudah diputus selama delapan tahun sejak tahun 2008. Sempat beredar dugaan ada sabotase dalam kebakaran tersebut, karena selama ini gedung kosong dan di dalamnya hanya ada barang-barang bekas pakai.

PT. Angkasa Pura I selaku otoritas pengelola Bandara Internasional



Anggota Komisi V DPR RI mengunjungi bandara lama Maros, Makassar yang terbakar

foto : Suci/iw

Sultan Hasanuddin Makasar di Mandai, Maros telah membentuk Tim Investigasi untuk mengetahui penyebab terbakarnya terminal lama kedatangan penumpang tersebut.

Pasca kebakaran tersebut, Jumat (26/08/2016) Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Lapangan ke Bandara lama di Makassar tersebut. Tim Komisi V, dipimpin Wakil Ketua Komisi V Yudi Widiana Adia didampingi Ketua Komisi V Fary Djemy Francis, Anggota Komisi V antara lain Rendy M. Affandy Lamadjido, Capt. Anthon Sihombing, Hamka B. Kady, Ade Rezki Pratama, Rita Zahara, Agung Budi Santoso, Bahrum Daido, Fatmawati Rusdi, Sahat Silaban, dan Capt. Djoni Rolindrawan.

Komisi V DPR RI menilai musibah kebakaran di Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makasar sebagai akibat lalainya PT. Angkasa Pura I (Persero) dalam mengelola asset. Pasalnya, Angkasa Pura I membiarkan bandara lama ini dalam keadaan kosong dan tidak berfungsi.

Penilaian tersebut disampaikan Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi



foto : Suci/iw

Bagian bandara lama Maros, Makassar yang terbakar

Francis usai pertemuan dengan Presiden Direktur Angkasa Pura I (Persero) Sulityo Wimbo Hardjito dan jajarannya di Bandara Sultan Hasanuddin, Maros, Makassar.

Menurut Djemi, salah satu alasan yang mendorong Komisi V DPR RI melakukan kunjungan lapangan ini adalah untuk memantau asset Angkasa Pura I di Bandara Lama Sultan Hasanuddin Makassar di Maros, pasca kebakaran yang terjadi di sana.

“Kami minta PT. Angkasa Pura I melakukan pengelolaan asset dengan baik dan tidak membiarkannya terbengkalai” tegas politisi Gerindra itu.

Selanjutnya, Fary juga menegaskan, bahwa carut marut kendaraan di kawasan bandara dan kebersihannya, merupakan salah satu point penting yang juga harus dibenahi manajemen PT. Angkasa Pura I.

“Keluhan masyarakat terkait kebersihan di kawasan dan dalam lokasi Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar di Maros hingga pengaturan carut marut kendaraan harus segera dibenahi, sehingga hak seharusnya didapat para pengguna jasa bandara di Makassar bisa terealisasi,” pungkasnya.

Selain membicarakan masalah kebakaran bandara, Komisi V DPR RI dalam pertemuan tersebut juga membicarakan masalah pembebasan lahan bandara yang dianggap Komisi V DPR RI masih bermasalah. Terkait masalah pembebasan lahan ini, Legislator Senayan ini mendesak pihak Angkasa Pura I untuk segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

“Masalah pembebasan lahan merupakan salah satu point dari beberap point yang menjadi permasalahan yang harus segera diselesaikan Angkasa Pura I”, tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, selain menurunkan timnya ke Makassar, Komisi V juga menurunkan dua Tim Komisi V lainnya ke Purworejo, Jawa Tengah dan ke Palu, Sulawesi Tengah.

Komisi V Dorong Pembangunan Waduk Bener, Purworejo

Di Purworejo, Tim Komisi V dipimpin Wakil Ketua Komisi V Michael Waitimenna setelah meninjau Waduk Bener, tim melakukan pertemuan dengan Bupati Purworejo Agus Bastian dan jajarannya. Dalam pertemuan tersebut, Michael Waitimenna mendorong pembangunan waduk bener, Kabupaten Purworejo Jawa Tengah.

“Tadi kami sempat mendapat masukan dari bupati agar komisi V memperjuangkan pembangunan waduk Bener di Purworejo. Dan melihat manfaat waduk kami dari Komisi V tidak hanya mendukung tapi juga mendorong percepatan pembangunan waduk tersebut,” ujar Michael.

Politisi dari Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa waduk tersebut sangat bermanfaat untuk berbagai keperluan masyarakat Purworejo dan sekitarnya, seperti irigasi yang akan mengairi sawah-sawah di Kabupaten Purworejo dan sekitarnya. Selain itu waduk juga dapat berfungsi sebagai suplai air baku untuk keperluan rumah tangga. Waduk Bener juga akan digunakan untuk PLTA (Pembangkit

Listrik Tenaga Air).

Namun karena proyek tersebut merupakan pembangunan *multiyears*, maka hal tersebut dilakukan secara bertahap. Meski demikian Michael berharap agar pembangunan waduk ini dapat segera diselesaikan, tentunya dengan dukungan pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum, khususnya Ditjen Sumber Daya Air.

Selain mendorong pembangunan waduk, Anggota Komisi V yang turut serta ke Purworejo, Novita Wijayanti mendorong pemerintah daerah Purworejo, Jawa Tengah untuk membangun kembali rumah warga korban longsor, bahkan jika memungkinkan juga bisa dilakukan relokasi.

“Kedatangan kami (Komisi V DPR RI) ke Purworejo, Jawa Tengah ini secara khusus memang untuk meninjau rencana pembangunan waduk Bener di Purworejo Jawa Tengah. Namun selain itu kami juga mendorong Pemerintah Kabupaten Purworejo untuk membangun kembali rumah warga yang beberapa waktu lalu terkena bencana tanah longsor dan banjir. Bahkan jika memang area rumah warga tersebut sangat beresiko terjadinya bencana di



Anggota Komisi V DPR RI mengunjungi Waduk Bener, Purworejo

foto : Ayu/tw

kemudian hari, maka kami mendorong Pemerintah Kabupaten Purworejo dan Kementerian Pekerjaan umum dan perumahan rakyat untuk merelokasi warga yang kerap menjadi korban bencana,” jelas Novita.

Sebagaimana diketahui beberapa waktu lalu Purworejo dan daerah sekitarnya telah menjadi korban bencana longsor. Salah satu solusinya adalah dengan membangun waduk Bener. Waduk ini berasal dari aliran sungai Bener, Bogowonto, dan sungai Butuh serta berbagai sungai di daerah lainnya di sekitar Purworejo. Selain itu juga akan dilakukan normalisasi beberapa sungai tersebut.

“Selain program bantuan dari pemerintah pusat, secara pribadi Komisi V juga sudah memberikan bantuan untuk membangun kembali rumah mereka. Seperti bantuan semen, pasir dan lain sebagainya. Lebih dari itu, dengan adanya beberapa solusi yang sudah diprogramkan oleh pemerintah Kabupaten Purworejo. Saya berharap program tersebut dapat segera terlaksana dengan baik, sehingga paling tidak tahun-tahun ke depan sudah tidak ada lagi korban banjir dan tanah longsor,” pungkas Politisi dari Fraksi Partai Gerinda.



foto : Iwan Armanias/iw

Wakil Ketua Komisi V DPR RI bersama rombongan berdialog dengan warga

Komisi V Dukung Pembangunan Bendungan Pasilaga, Sulteng

Krisis air bersih masih terjadi problem penting di sejumlah daerah di Indonesia khususnya di Provinsi Sulawesi Tengah apabila musim kemarau tiba. Dampak dari krisis air juga dirasakan para petani setempat, dan untuk sementara mereka belum dapat menggarap lahan pertanian karena kesulitan air. Oleh karena itu Kementerian PU-PR berencana membangun sejumlah bendungan maupun pemasangan pipanisasi di wilayah Kabupaten Sigi untuk mengatasi krisis air bersih tersebut.

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M. Said yang memimpin Tim Komisi V ke Palu, Sulawesi Tengah mendukung proyek pembangunan bendungan air bersih dari Kementerian PU-PR tersebut. Hal tersebut disampaikan Muhidin di sela-sela meninjau proyek pembangunan bendungan Pasilaga (Palu-Sigi-Donggala) di Desa Saluki Kabupaten Sigi.

“Komisi V DPR RI mendukung sepenuhnya proyek pembangunan bendungan air bersih demi kepentingan masyarakat yang nantinya akan dialiri air bersih,” katanya.

Menurut politisi Partai Golkar, ini suatu proyek raksasa yang begitu

besar dengan kapasitas yang sangat luar biasa dan bendungan Pasilaga diperkirakan untuk membawa debit air bersih sebesar 600-700 liter/detik yang dimanfaatkan untuk disuplai ketiga kabupaten (Sigi-Kota Palu-Donggala).

Proyek ini tahap I memakan biaya kurang lebih Rp 200 Miliar, dan untuk tahap II nanti diperkirakan kurang lebih Rp 400 Miliar. “Jadi ini suatu proyek raksasa yang begitu besar yang penyelesaiannya sampai 2019,” tegas Muhidin.

Politisi asal Dapil Sulteng menegaskan bahwa Komisi V memberikan dukungan untuk membantu Pemda merealisasikan seluruh program-program yang telah dicanangkan secara nasional, baik yang menyangkut masalah air baku dan air bersih sampai dengan bagaimana menormalisasikan sungai yang ada itu.

Kepala Pusat Air Tanah dan Air Baku Kementerian PU-PR, Dwi Sugianto, menjelaskan bendungan Pasilaga ini menampung debit air baku 600 liter/detik, untuk memenuhi kebutuhan air bersih di tiga wilayah yakni Kota Palu, Kabupaten Sigi, dan Kabupaten Donggala. Air dari bendungan Pasilaga ini kemudian akan melewati pipa dan ditampung dipenampungan air di Desa Oloboju untuk dikelola menjadi air bersih.

“Kapasitas bendungan Pasilaga



Komisi V DPR RI mendukung sepenuhnya proyek pembangunan bendungan air bersih demi kepentingan masyarakat yang nantinya akan dialiri air bersih.





foto : Iwan Armanias/iw

Dengan menggunakan sepeda motor Wakil Ketua Anggota Komisi V DPR RI Muhidin M Said meninjau pembangunan Bendungan Pasilaga, Sulteng

untuk memproduksi debit air baku sebanyak 600 liter/detik. Bendungan Pasilaga ini merupakan bendungan kedua dari *news script system* penyediaan air minum (*spam*) regional luar Jawa dan Banjar Bakula,” jelasnya.

Di tempat yang sama, Bupati Sigi, Mohamad Irwan Lapata berharap Kementerian PU-PR segera menyelesaikan pembangunan bendungan Pasigala ini agar masyarakat bisa lebih cepat menikmati air bersih. “Saya berharap proyek ini secepatnya selesai. Selain itu di daerah kami ada tiga daerah aliran sungai, sehingga itu bisa dikelola dan bisa dinikmati masyarakat untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk pertanian dan perkebunan,” pungkasnya.

Selain mengunjungi pembangunan bendungan Pasilaga, Tim Komisi V juga mengunjungi pembangunan

pengendali banjir Sungai Palu. Sungai Palu yang membelah lembah memisahkan daratan bagian timur dan barat Kota Palu, Sulawesi Tengah, dinilai berpotensi banjir dengan aliran air yang sangat deras, yang dapat merusak lingkungan dan bangunan serta menimbulkan longsor.

“Sungainya kalau kita daerah aliran sungai itu sangat luar biasa dan sudah terjadi abrasi sehingga perlu dilakukan suatu studi khusus sehingga bisa dikendalikan dengan baik,” ungkap Wakil Ketua Komisi V DPR RI Muhidin M Said kepada pers disela-sela peninjauan pembangunan pengendali banjir Sungai Palu.

Pihaknya sudah minta kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, supaya dilakukan studi khusus. Karena sungai ini sudah merembes kepemukiman penduduk lebih dari 200 meter, sudah sangat berbahaya.

Oleh karena itu, lanjutnya, itu perlu suatu studi khusus sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang bisa merugikan masyarakat.

Menurut politisi Golkar asal Dapil Sulteng, sekarang sudah merugikan masyarakat dan Dewan berusaha bagaimana mampu mengendalikan hal ini. “Kita sudah sampaikan semuanya kepada Kepala Balai Wilayah Sungai Sulawesi III, dan kita juga sudah melihat

secara langsung bahwa nantinya itu akan dilakukan studi khusus. Kemudian kita akan mendorong dengan anggaran yang cukup untuk menormalisasi sungai itu,” tegasnya.

Politisi asal Dapil Sulteng meminta kepada Pemda agar bisa mengendalikan meluapnya sungai Palu tersebut dan harus dicarikan solusi yaitu pengambilan galian C. “Ini yang harus dikendalikan,” kata politisi Golkar seraya menambahkan karena kalau tidak, apapun yang kita upayakan kalau tidak terkendali menyangkut masalah galian C ini juga sangat berbahaya.

Di tempat yang sama anggota Komisi V DPR RI, Sadarestuwati dari F-PDIP mengatakan akibat luapan airnya yang deras maka banjir akan terjadi dan tadi kita lihat erosi yang begitu besar sehingga sungai menjadi luas.

Menurutnya, hal itu dikarenakan belum adanya penanganan atas potensi banjir dan juga karena dana yang disiapkan oleh APBD Sulteng untuk hal ini masih relatif kecil. “Oleh karena itu, nanti Komisi V akan membicarakan masalah ini bersama dengan Pemerintah Pusat untuk menyelesaikan persoalan itu. Paling tidak meminimalisir akibat dari banjir Sungai Palu tersebut,” pungkasnya. ■

(sc/iw/ayu)



foto : Iwan Armanias/iw

Tim Komisi V DPR RI meninjau pembangunan Bendungan Pasilaga, Sulteng

Pemerintah Harus Tingkatkan Kualitas Perpustakaan Tanah Air

Survei *United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO)* pada 2011, menyebutkan indeks tingkat minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001 persen. Artinya, dari 1.000 penduduk, hanya ada 1 orang yang mau membaca buku dengan serius. Kondisi ini pula yang menempatkan Indonesia berada pada posisi 124 dari 187 negara dalam penilaian indeks pembangunan manusia (IPM).

Data *World's Most Literate Nations*, yang disusun oleh Central Connecticut State University tahun 2016 menyebutkan, peringkat literasi Indonesia berada di posisi kedua terbawah dari 61 negara yang diteliti. Indonesia hanya lebih baik dari Bostwana, negara di kawasan selatan Afrika. Sementara di antara negara-negara ASEAN, Indonesia menempati urutan ketiga terbawah bersama Kamboja dan Laos.

Hal itu diperkuat data survei tiga tahunan Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai minat membaca dan menonton anak-anak Indonesia, yang terakhir kali dilakukan pada tahun 2012, disebutkan hanya 17,66 persen anak-anak Indonesia yang memiliki minat baca. Sementara, yang memiliki minat menonton mencapai 91,67 persen. Bahkan data UNESCO menyebutkan pada tahun 2014, anak-anak Indonesia membaca hanya 27 halaman buku dalam satu tahun.

Komisi X DPR RI, sebagai mitra kerja dari Perpustakaan Nasional Republik Indonesia, tentu menyorot tajam peringkat literasi ini. Pasalnya, peringkat ini sangat mempengaruhi kualitas Bangsa Indonesia, baik

untuk saat ini maupun untuk di masa mendatang. Perpustakaan menempati posisi yang sangat strategis untuk membangun sumber daya manusia dan karakter bangsa melalui kebiasaan membaca.

Untuk mengetahui kondisi minat baca di Tanah Air, Komisi X DPR RI mengirimkan tiga tim kunjungan kerja spesifik ke tiga daerah pada akhir Agustus 2016 lalu. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Sutan Adil Hendra memimpin tim Komisi X DPR RI ke Provinsi DI Yogyakarta. Tim Komisi X DPR RI ke Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah, dan Anggota Komisi X DPR RI Bambang Sutrisno memimpin tim ke Provinsi Sulawesi Tenggara.

Saat meninjau Perpustakaan SMA Muhammadiyah I DI Yogyakarta, Sutan mengatakan minat baca harus terus didorong agar dapat ditingkatkan. Apalagi dengan

peringkat literasi Indonesia yang kurang menggembirakan, perlu adanya evaluasi. Pemerintah harus melakukan evaluasi untuk meningkatkan literasi perpustakaan yang ada pada sekolah-sekolah negeri agar bisa lebih baik dari sekolah swasta. Apalagi di sekolah-sekolah negeri, sudah ditunjang oleh APBD dan APBN. Oleh karena itu, pihaknya akan mengawasi agar sekolah-sekolah negeri mendapatkan perpustakaan yang berkualitas.

Politisi F-Gerindra itu menambahkan, kunjungan ke perpustakaan SMA Muhammadiyah I DIY itu telah melihat langkah maju dalam peningkatan perpustakaan, meski langkah maju itu didapat dari sekolah swasta seperti SMA Muhammadiyah I DIY yang telah mendapat akreditasi A dalam pengelolaan perpustakaan.

"Kita melihat disini memang ditata dengan baik, rak buku dan ruangnya



Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana berdialog dengan Petugas Perpustakaan SMA Muhammadiyah 1 Yogyakarta

foto : Nita/w

juga bagus. Ini kan sarana bagaimana meningkatkan daya serap dan daya tampung untuk buku, dan sekaligus buku ini kan juga gudang ilmu. Hal ini harusnya menjadi motivasi kepada perpustakaan-perpustakaan lain terutama perpustakaan yang dikelola di sekolah-sekolah negeri,” ujar politisi asal dapil Jambi itu.

Hal senada diungkapkan Anggota Komisi X DPR RI Laila Istiana. Politisi F-PAN itu menilai, Perpustakaan SMA Muhammadiyah I DIY bisa menjadi percontohan bahwa perpustakaan di daerah pun bisa sangat bagus.

“Nah saya berharap sekolah-sekolah yang disekitarnya bisa melakukan studi banding ke sekolah ini dengan berbagai macam kelebihan dan kendalanya dengan bagaimana cara pembiayaannya juga perawatannya, sehingga bisa paling tidak hampir sama dengan perpustakaan di SMA Muhammadiyah I DIY ini,” ujarnya.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu pun menambahkan, pihaknya mendorong agar anggaran Perpustakaan tahun 2017 bisa meningkat, sehingga bisa membuat perpustakaan nasional bisa lebih bersaing dengan negara-negara tetangga, dan meningkatkan perpustakaan di daerah-daerah.



foto: Nita/iw

Tim Kunspek Komisi X DPR RI berdialog mengenai perpustakaan desa di Kabupaten Kulon Progo

Masih terkait dengan peningkatan anggaran, Anggota Komisi X DPR RI Dadang Rusdiana pun sepakat dengan hal itu. Ia mengaku, dalam setiap Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Perpustakaan, ia terus mendorong bagaimana anggaran perpustakaan terus dinaikkan secara bertahap tiap tahunnya.

“Jadi ketika kita memberikan anggaran dari DPR RI khususnya dari Komisi X DPR RI, kita tentunya melihat ini sebagai sebuah keseriusan sebagai peta jalan untuk membangun perpustakaan sebagai pusat peradaban dan pusat kebudayaan. Namun pemerintah juga harus jelas konsepnya,” katanya.

Untuk mendorong majunya perpustakaan nasional, lanjut politisi F-Hanura itu, setidaknya ada dua yang harus menjadi perhatian serius, yakni sarana prasarana dan ketersediaan sumber daya manusia perpustakaan itu sendiri. Menurut Dadang, ketika berbicara sumber daya manusia perpustakaan, tentunya diperlukan peningkatan kompetensi serta pengakuan atas kompetensi itu dalam bentuk sertifikasi.

Dadang melihat di seluruh Indonesia sedikit sekali perpustakaan-perpustakaan terkemuka di daerah maupun di sekolah yang dikelola

oleh pustakawan yang benar-benar mendapatkan apresiasi dari pemerintah.

“Padahal, banyak negara-negara maju menempatkan perpustakaan sebagai jantung peradaban, dimana perpustakaan menjadi basis peneliti sebagai pusat aktifitas seluruh ilmuwan sekaligus menjadi tempat yang menarik bagi masyarakat untuk yang menarik bagi masyarakat untuk menimba ilmu untuk berdiskusi dalam mendalami sebuah masalah,” imbuh politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Apresiasi Perpustakaan di Tingkat Desa

Anggota Komisi X DPR RI My Esti Wijayati mengapresiasi keberadaan perpustakaan daerah di Desa Hargo Mulyo, Kulon Progo, Provinsi DIY. Walaupun perpustakaan ini masih setingkat desa, namun mampu meningkatkan kapasitas anak-anak yang berada disekitar untuk meningkatkan kecerdasan dan pendidikannya melalui perpustakaan.

“Meskipun jauh dari keramaian, jauh dari kota, ini adalah daerah perbatasan yang berada di sebuah perbukitan Bukit Menoreh. Ada semangat yang terbangun, semangat bagaimana untuk bisa meningkatkan kapasitas anak-anak yang berada di sekitar daerah



Banyak negara-negara maju menempatkan perpustakaan sebagai jantung peradaban, dimana perpustakaan menjadi basis peneliti sebagai pusat aktifitas seluruh ilmuwan.



perbukitan ini,” kata Esti.

Politisi F-PDI Perjuangan itu melihat adanya semangat yang tinggi untuk meningkatkan taraf pendidikan melalui perpustakaan di desa itu, meski berada di daerah perbukitan yang jauh dari segala fasilitas yang berbagai macam, apalagi perpustakaan ini juga pernah juara dua nasional tahun 2014.

“Nah saya kira PR kita adalah bagaimana kemudian kita membuat formulasi sekaligus sistematika supaya Perpustakaan Desa itu sungguh sungguh ada dan tidak sekedar ada,” saran Esti.

Perhatian pemerintah pun, masih kata Esti, diharapkan tidak hanya perhatian seadanya, namun harus menjadi salah satu skala prioritas bahwa desa inilah yang diharapkan menjadi tumbuh kembangnya perpustakaan dan kemudian mampu untuk menjadi pijakan bagaimana kesejahteraan yang ada di desa bisa meningkat.

“Ketika orang cerdas karena membaca tahu bagaimana melepaskan diri dari kemiskinan itu menjadi kuncinya dengan membaca. Jadi memang saya berharap betul perpustakaan yang ada disini bisa dikelola terus menjadi jauh lebih baik dan pemerintah kabupaten bisa terus memberikan perhatian lebih, alokasi anggaran juga harus jelas, bagaimana supaya Perpustakaan Desa bisa terus berjalan,” harap politisi asal dapil DI Yogyakarta itu.

Imbau Tempat Wisata Kuliner Jabar Sediakan Pojok Baca

Tim Komisi X DPR RI dalam kunjungannya ke Provinsi Jawa Barat, menyoroti soal digitalisasi perpustakaan dan sosialisasi gemar membaca berkaitan dengan budaya membaca. Dalam pertemuan dengan Wakil Gubernur Jabar Deddy Mizwar beserta jajaran di Gedung Sate Bandung, Komisi X mengajak pelaku industri menyediakan pojok baca.

“Kami mengimbau melalui Pemerintah Provinsi dan juga Pemerintah Daerah di seluruh Jawa



foto : Rizka/iw

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah bertemu Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar

Barat agar mengatur para pelaku industri kuliner atau pebisnis restoran untuk menyediakan pojok baca atau mengadakan rak-rak berisi buku demi ikut memasyarakatkan gemar membaca ini,” ujar Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ferdiansyah (F-PG).

Dalam kesempatan itu, lanjut Ferdiansyah, Komisi X mengajak Pemprov Jawa Barat melakukan koordinasi dan optimalisasi kerjasama dengan mitra-mitra kerja Komisi X DPR RI, seperti Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Pariwisata, Badan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

“Diharapkan melalui sinergi bersama Kementerian Pariwisata dengan Badan Ekonomi Kreatif-nya, Jawa Barat yang terkenal dengan wisata kuliner dengan beraneka tempat makannya, bisa memberikan peran besar dalam sosialisasi gemar membaca untuk semua kalangan,” harap politisi asal dapil Jawa Barat itu.

Permasalahan Perpustakaan Hampir Sama di Setiap Daerah

Pembangunan karakter bangsa melalui kebiasaan membaca, menemukan relevansinya untuk menjadi benteng terpeliharanya nilai-nilai luhur budaya bangsa, yang dihantam oleh arus ideologi global melalui ragam bentuknya. Perpustakaan menempati posisi yang sangat strategis untuk membangun



Diharapkan melalui sinergi bersama Kemenpar dengan Badan Ekonomi Kreatif-nya, Jawa Barat yang terkenal dengan wisata kuliner dengan beraneka tempat makannya, bisa memberikan peran besar dalam sosialisasi gemar membaca untuk semua kalangan.



sumber daya manusia dan karakter bangsa melalui kebiasaan membaca.

“Tradisi membaca dengan sendirinya akan melahirkan kecerdasan dan sensitivitas terhadap fenomena global dan nasional, sehingga tidak mudah dihantam oleh kolonialisme dan imperialisme baru dengan segala bentuknya. Namun jika tradisi membaca sangat rendah, maka yang terjadi adalah sebaliknya,” kata Anggota Komisi X DPR RI Bambang Sutrisno (F-PG, dapil Jawa Tengah saat memimpin Tim Komisi X ke Kendari, Sulawesi

mengembangkan nilai budaya jika kini mereka tergerus ideologi asing,” kata politisi F-PG itu.

Politisi asal dapil Jawa Tengah itu mengatakan, budaya minat membaca bisa dimulai dari keluarga. Mengingat keluarga merupakan orang terdekat buat si anak. Keluarga dinilai memiliki andil sangat besar agar anak-anak memiliki keinginan untuk meningkatkan minat baca.

Anggota Komisi X DPR RI Sri Meliyana menegaskan, anggaran dalam APBN harus berpihak pada peningkatan

terlaksana,” tegas Meli.

Untuk membantu program peningkatan minat baca, Politisi F-Gerindra itu mendukung penyaluran mobil perpustakaan keliling ke daerah-daerah, salah satunya ke Provinsi Sultra ini. Apalagi, dengan jumlah mencapai 17 kota dan kabupaten di Sultra. Ia mendukung satu kabupaten/kota minimal satu mobil perpustakaan keliling.

“Kita harapkan, walaupun jumlah mobil tidak banyak, turunnya merata. Apalagi dengan ciri khas kita yang daerahnya luas dan antar pemukiman yang jauh, sehingga perpustakaan keliling itu menjadi kebutuhan. Bantuan berupa mobil perpustakaan keliling itu yang paling diharapkan. Yang pertama mobilnya dulu, baru isi pustakanya,” jelas Meli.

Politisi asal dapil Sumsel itu menyarankan kepada Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Sultra untuk mengikutsertakan semua pihak dalam program peningkatan minat baca. Termasuk dengan perpustakaan komunitas, dan perusahaan di daerah dengan kerjasama tanggung jawab sosial (CSR) perusahaan.

Dalam kesempatan ini, Sekprov Sultra, Lukman Abunawas mengatakan, Sumber Daya Manusia (SDM) untuk perpustakaan masih minim. Jumlah staf perpustakaan masih minim untuk memenuhi kebutuhan. Diketahui, staf perpustakaan dari PNS sebanyak 70 orang, dan pegawai kontrak sebanyak 30 orang.

“Sarana prasarana kami juga masih minim. Koleksi buku kami juga sangat terbatas. Sehingga kami berharap ada penambahan koleksi buku,” harap Lukman. Ia juga berharap, anggaran untuk perpustakaan juga dapat ditingkatkan.

Saat pertemuan, sejumlah perwakilan perpustakaan komunitas dan perwakilan perpustakaan sekolah mengeluhkan hal yang sama. Sarana dan prasarana masih minim, belum adanya perpustakaan keliling dan pelatihan SDM perpustakaan. ■



foto: Sofyan/iw

Anggota Komisi X DPR RI Bambang Sutrisno menyerahkan cenderamata kepada Sekprov Sultra.

Tenggara, baru-baru ini

Sementara itu, Anggota Komisi X DPR RI Marlinda Irwanti menilai permasalahan perpustakaan seperti minimnya sarana prasarana dan koleksi buku di Provinsi Sulawesi Tenggara hampir sama terjadi di seluruh provinsi lain di Indonesia. Padahal, tantangan global menuntut Bangsa Indonesia membentuk dan membangun karakter generasi muda yang baik.

“Tentu ini menjadi keprihatinan dunia literasi Indonesia. Karena permasalahan kita sekarang adalah bagaimana kita melihat tantangan global yang luar biasa, yang menjadi sebuah tuntutan bagi Bangsa Indonesia, bagaimana generasi muda bisa mengangkat nilai-nilai luhur dan

minat baca masyarakat. Mengingat permasalahan perpustakaan di setiap daerah hampir sama, diantaranya sarana dan prasarana yang kurang, SDM yang tidak mumpuni, hingga manajemen yang lemah. Ia pun tak memungkiri, minimnya anggaran menjadi masalah terbesar dalam meningkatkan minat baca. Bahkan pagu anggaran Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (PNRI) dalam RAPBN 2017 hanya Rp 563 miliar.

“Kalau memang kita mau memperkuat literasi atau minat baca dan memajukan perpustakaan, anggaran harus berpihak. Tanpa keberpihakan anggaran, semua hanya tinggal cita-cita. Kalau begini, apa mau slogan-slogan perpustakaan tidak

Kewarganegaraan Ganda Perlu Kajian Mendalam

Status Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi kontroversial akhir-akhir ini, terutama terkait kewarganegaraan ganda yang masih terus menjadi perbincangan hangat karena diketahui di Indonesia sendiri masih menganut sistem satu kewarganegaraan.

Kasus dwikewarganegaraan yang menjadi sorotan ialah Gloria Natapradja Hamel (anak hasil perkawinan campur)- anggota Paskibraka dan mantan Menteri ESDM Archandra Tahar (WN Amerika Serikat)- karena pilihan. Kasus ini dinilai menjadi momentum tepat untuk pemerintah kaji dan mencari solusi bagi status kewarganegaraan ganda.

Hal ini pun memunculkan pemikiran bahwa Indonesia sebaiknya menganut saja kewarganegaraan ganda. Pemikiran ini sangat relevan mengingat dunia sekarang nyaris tanpa batas (*borderless*) karena kemajuan zaman lengkap dengan konektivitas transportasi udara maupun internet.

Memang kalau dwikewarganegaraan diberlakukan akan memudahkan mereka yang bermukim di negara lain untuk bisa keluar-masuk Indonesia. Mereka yang sudah WNA bisa berinvestasi di dalam negeri. Makin besar investasinya di Indonesia akan semakin besar pula kemungkinan mereka untuk kembali karena bagaimanapun investasi itu harus mereka amankan dengan tangan mereka sendiri, jadi dwikewarganegaraan juga punya dampak ekonomi.

Kasus dwikewarganegaraan ini pun membuat pemerintah akan mengajukan revisi Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang



Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid

foto: Jaka/iw

menghadapi masalah serupa.

Selain itu juga karena banyak WNI yang tersebar di seluruh dunia dan memiliki keahlian khusus, seperti Archandra, namun terbentur dwikewarganegaraan. Kendala itu mengakibatkan mereka kesulitan untuk berkontribusi bagi tanah air.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi I DPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan dirinya memahami tujuan pemerintah merevisi UU Kewarganegaraan, karena populasi diaspora di luar negeri memiliki potensi yang besar dalam mendukung pembangunan nasional.

“Mereka punya keahlian yang mereka rasakan penting untuk disumbangkan untuk Indonesia. Karenanya mereka berpikir penting untuk kembali ke Indonesia, namun ini perlu dikaji lebih dalam karena kalau dibuka sepenuhnya tentu juga merepotkan karena tidak semua berprestasi dan tidak semua diperlukan di Indonesia,”ujarnya kepada Parleментарia.

Menurutnya, memang banyak orang-orang Indonesia di luar negeri yang memiliki potensi dalam mendukung pembangunan nasional. Namun dalam konteks ini, negara harus memastikan agar kebijakan dwikewarganegaraan ini tidak akan disalahgunakan oleh oknum-oknum misalnya akan banyak WNA yang akan memanfaatkan status kewarganegaraan pasangannya untuk menjalankan kegiatan ekonominya dan tidak membayar pajak. Atau ada orang yang berganti-ganti kewarganegaraan karena tuntutan pekerjaan dan demi keuntungan pribadi.

“Sebaiknya ini dikaji terlebih dahulu apakah memberikan kemaslahatan bagi bangsa ini, apakah

Sebaiknya ini dikaji terlebih dahulu apakah memberikan kemaslahatan bagi bangsa ini, apakah akan banyak kontribusi positif bagi negara ini, bukan semata-mata menguntungkan sebagian kecil warga yang tinggal di luar negeri

Kewarganegaraan untuk memberikan payung hukum para diaspora Indonesia di luar negeri. Bukan sekadar soal Mantan Menteri ESDM Archandra yang kini berstatus tanpa kewarganegaraan tetapi ada Warga Negara Indonesia (WNI), mantan WNI dan keturunannya di luar negeri yang

akan banyak kontribusi positif bagi negara ini, bukan semata-mata akan menguntungkan sebagian kecil warga negara yang punya kesempatan tinggal di luar negeri. Keamanan juga perlu diperhatikan karena ditakutkan akan mendatangkan potensi bahaya



foto : Jaka/iw

Anggota Komisi III DPR RI **Dossy Iskandar**

dan mengganggu aspek keamanan serta menimbulkan polemik,” ujarnya.

Payungi Diaspora

Sementara itu pandangan berbeda disampaikan Anggota Komisi III DPR RI Dossy Iskandar yang mengatakan wacana terkait dwikewarganegaraan itu adalah langkah baik untuk Indonesia ke depan.

“UU Dwikewarganegaraan akan mampu memayungi WNI yang menikah dengan warga negara lain, dan membarikan jaminan formal atas anak yang mereka lahirkan,” katanya.

Jaminan itu, menurutnya akan memberikan kesempatan bagi anak yang lahir dari perkawinan antar bangsa untuk lebih dan mengenal tempat asalnya secara berimbang. Dossy tak menyanggah adanya aspek positif dan negatif atas penerapan RUU ini.

Lebih jauh, dirinya berharap, RUU Dwikewarganegaraan bisa memayungi diaspora Indonesia di seluruh dunia, sehingga bisa mendukung daya saing Indonesia dalam menyongsong globalisasi.

Sedangkan Anggota Komisi I, Dave Akbarshah Fikarno mengatakan terkait kewarganegaraan ganda yang dimiliki Archanda mengindikasikan kalau Istana untuk kesekian kalinya *off side* alias teledor dalam mengambil keputusan dan ini tidak boleh terulang lagi. “Presiden Jokowi harus mengevaluasi Kementerian Sekretariat Negara dan penasihatnya,” ujarnya.

Kewarganegaraan Arcandra memang menyedot perhatian publik hingga menarik perdebatan berbagai kalangan ikhwal terkait kelayakan Archandra menduduki jabatan menteri, hingga soal nasionalisme; keIndonesiaan sang menteri ikut dipertanyakan.

Menyusul kasus Archandra, muncul nama Gloria Natapradja Hamel (16), siswa calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perwakilan Jawa Barat. Di tengah semangat akan mengibarkan bendera pasukan di Hari Kemerdekaan, 17 Agustus 2016, Gloria harus menerima keputusan bahwa dirinya digugurkan dari tim Paskibraka, karena ia masih memegang paspor Prancis, jadi statusnya dianggap WNA. Galoria lahir dari ibu berkebangsaan Indonesia dan ayah berkebangsaan Prancis.

Status kewarganegaraan anak memang menjadi salah satu isu dalam perkawinan campur. Sayangnya, publik masih belum terlalu banyak memahami peraturan soal

kewarganegaraan ini. Dalam pasal 41 UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan disebutkan, anak-anak yang lahir dari perkawinan sah dengan salah satu orang tua berkewarganegaraan asing sebelum 1 Agustus 2006, bisa didaftarkan sebagai WNI hingga tahun 2010. Namun, banyak orang tua yang tidak mengetahui soal Pasal 41 tersebut.

Sebelum adanya UU Kewarganegaraan tahun 2006, salah satu konsekuensi yang harus diterima wanita yang menikah dengan WNA adalah status kewarganegaraan anak mengikuti status ayahnya. Jadi, anak akan dianggap WNA dan diperlakukan seperti WNA, misalnya, harus memiliki Kartu Ijin Tinggal Terbatas (KITAS) yang masa berlakunya 1 tahun, dan selanjutnya dapat diperpanjang dengan memiliki Kartu Ijin Tinggal Menetap (KITAP) yang berlaku selama 5 tahun.

Jadi, para orang tua yang menikah campur dan memiliki anak harus aktif mempelajari aturan untuk mendapatkan dokumen-dokumen keimigrasian yang dibutuhkan anak. Jika anak sudah hampir berusia 18 tahun dan jelang 21 tahun, segera komunikasikan bahwa ia sudah memilih dan menetapkan status kewarganegarannya. Jika ia tidak memilih menjadi WNI, maka setelah 21 tahun anak itu akan kehilangan haknya sebagai WNI. Jangan sampai hal itu menyulitkan anak di kemudian hari. ■ (rnm/mp)



foto : Arief/iw



foto: Dok

Delegasi Indonesia hadir pada Global Green Growth Week 2016 yang dihelat awal September lalu di Pulau Jeju, Korea Selatan

Pertemuan Tingkat Tinggi GGGI 2016

Ketika Ekonomi Hijau Jadi Kebutuhan

Butuh komitmen kuat untuk mengimplementasikan kebijakan ekonomi hijau. Ada kearifan yang hendak disosialisasikan oleh dunia internasional bagaimana suatu kebijakan negara tetap bisa mempertahankan kelestarian lingkungan.

Ruang pertemuan penuh dengan para delegasi dari berbagai negara. Tidak saja utusan pemerintah, ada pula utusan parlemen, LSM, lembaga donor, lembaga perbankan, organisasi internasional, kalangan swasta, hingga akademisi. Semua membincang perekonomian dunia dalam bingkai pelestarian lingkungan. Inilah pertemuan penting untuk menggugah perhatian dunia pada lingkungan hidup.

Delegasi DPR RI ikut hadir membincang isu penting ini pada pertemuan *Global Green Growth Week*

2016 yang dihelat awal September lalu di Pulau Jeju, Korea Selatan. Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto dan Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Nurhayati Ali Assegaf hadir di forum tersebut. Tema yang diusung *Maximizing Impact for Inclusive and Sustainable Green Growth* (Memaksimalkan dampak SDG's untuk pertumbuhan ekonomi hijau).

Pertemuan tingkat tinggi ini membagi empat prioritas tematik yang masih menjadi pekerjaan rumah bersama, yaitu energi, air, pemanfaatan lahan, dan *green cities*.

Penyelenggaranya adalah *Global Green Growth Institute (GGGI)*. Presiden GGGI adalah Susilo Bambang Yudhoyono. Organisasi ini ingin mengajak para delegasi yang hadir untuk ikut mengidentifikasi praktik-praktik cerdas, mencari solusi inovatif, dan memperkuat kemitraan, dalam menghadapi perubahan iklim dan pembiayaan pembangunan yang mengedepankan inklusivitas sosial.

Pertemuan yang dihelat selama seminggu ini dan di bawah agenda *Green Growth Knowledge Platform (GGKP)*, membahas riset-riset terbaru terkait *pro-poor growth* dan inklusi sosial. Sedangkan pembahasan mengenai energi batubara versus energi terbarukan yang selama ini menjadi dilema negara-negara di kawasan Asia jadi tema sentral *Asian Regional Policy Dialogue (ARPD)*.

Selanjutnya, kapasitas pembiayaan negara-negara berkembang dan isu-isu ketersediaan proyek pembangunan hijau yang *bankable* dan kerangka pembiayaan yang sesuai dengan kondisi negara-negara berkembang menjadi tema utama agenda *Global Green Growth Summit (GGGS)*. Agus Hermanto dan Nurhayati antusias mengikuti pertemuan ini. Butuh *political will* untuk menyukseskan pertumbuhan hijau dari semua pemangku kepentingan.

Para penyelenggara negara yang berada di jantung kebijakan sangat



Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto

foto: Jayadi/iw

menentukan kesuksesan agenda ini. Agus mengatakan, keberpihakan politis dan kepemimpinan di setiap tahapan siklus kebijakan sangat menentukan. Dan DPR RI mendukung penandatanganan MoU antara BUMN Indonesia, PT. Sarana Multi Infrastruktur dengan GGGI untuk pengembangan energi terbarukan di Indonesia.

“Indonesia dengan potensi *geothermal* mencapai 40 persen dari total cadangan energi *geothermal* dunia sudah selayaknya fokus pada pengembangan energi ini. Melalui revisi UU Panas Bumi di tahun 2014, DPR RI periode ini telah memberikan payung legislasi. Selanjutnya, DPR

RI akan terus mendukung sejalan dengan fungsi parlemen sesuai konstitusi,” jelas Agus.

Sementara itu, Nurhayati dalam kesempatan *brainstorming* selepas agenda pembukaan GGGI menyerukan keterlibatan parlemen dalam implementasi ekonomi dan pembangunan hijau. “Selain melalui fungsi legislasi dan anggaran, parlemen dapat menjembatani antara pemerintah di level elit dengan masyarakat, serta membantu mengkomunikasikan visi ekonomi hijau di konstituen masing-masing,” katanya.

Nurhayati juga melakukan beberapa pertemuan antara lain dengan Erick Soelheim, mantan Menteri Lingkungan Hidup Norwegia yang saat ini menjadi *Executive Director UNEP* dan Simon Upton, mantan Menteri Lingkungan Hidup dan Menteri Kesehatan Selandia Baru yang juga pernah menjadi anggota parlemen New Zealand. Kini Simon menjadi Direktur Lingkungan Hidup di OECD.

Nurhayati juga melakukan pertemuan dengan *Director General GGGI* yang baru, Frank Rijsberman. Dalam pertemuan tersebut Nurhayati mengungkapkan kesediaan GGGI mempertimbangkan usulan Indonesia untuk membentuk *parliamentary network of GGGI*. GGGI sendiri merupakan organisasi internasional yang mendedikasikan diri pada promosi pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan di negara-negara berkembang.

GGGI didirikan pada tahun 2012 di tengah pelaksanaan Rio+20 *United Nations Conference on Sustainable Development* guna mempercepat transisi menuju model baru pertumbuhan ekonomi hijau yang berdasarkan pada prinsip-prinsip inklusivitas sosial dan kelestarian lingkungan. Beginilah ketika ekonomi hijau menjadi kebutuhan bersama untuk menciptakan lingkungan hidup yang lestari dan hijau. ■

(mh)



Selain melalui fungsi legislasi dan anggaran, parlemen dapat menjembatani antara pemerintah di level elit dengan masyarakat, serta membantu mengkomunikasikan visi ekonomi hijau di konstituen masing-masing,





Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin delegasi DPR RI ke Norwegia membicarakan penghentian deforestasi atas hutan tropis Indonesia.

foto : dok

Menagih Komitmen Deforestasi Norwegia

Ada komitmen yang sejak 2008 sudah terbangun. Penghentian deforestasi atas hutan tropis Indonesia menjadi komitmen bersama. Norwegia sangat berkepentingan dengan kampanye anti-deforestasi, karena bila terjadi perubahan iklim yang ekstrim, negara di ujung kawasan Skandinavia ini bisa tenggelam oleh pencairan es di Kutub Utara.

Norwegia, negeri yang indah di utara Benua Eropa. Kotanya tertata rapi dengan manajemen transportasi massal yang apik. Semua bus umum dan kereta api di sini menggunakan energi listrik. Kelestarian lingkungan sangat terjaga di Norwegia. Hampir tak ditemukan kemacetan di jalan raya. Lanskap yang indah, membuat perjalanan darat dari Kota Oslo ibu kota Norwegia ke kota-kota lain sangat mengesankan.

Luas Norwegia 323.802 km² dengan jumlah penduduk hanya 5.223.256 jiwa. Artinya, dalam tiap 15 km, hanya dihuni satu orang penduduk. Tidak ada lonjakan penduduk dalam dua tahun.

Hanya satu persen penambahan penduduk dari setiap angka kelahiran. Negara ini memiliki tiga musim. Saat musim salju tiba, mayoritas penduduknya bermigrasi ke negara tetangga, karena musim salju biasanya sangat ekstrem, sehingga warganya tak bisa beraktivitas sama sekali.

Pada awal September lalu, Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon memimpin delegasi DPR RI ke Norwegia untuk membicarakan banyak isu penting dengan Kementerian Luar Negeri setempat. Fadli mengutarakan isu-isu penting antara kedua negara. Dari mulai terorisme, ISIS, imigran Timur Tengah, hingga ke isu lingkungan hidup jadi perbincangan hangat.

Saat ini, dunia internasional memang belum bisa keluar dari isu terorisme, apalagi muncul banyak kelompok radikal bersenjata di tengah konflik kawasan Timur Tengah. Negara-negara Eropa sangat berkepentingan dengan isu ini. Di tengah konflik Timur Tengah yang belum mereda, arus imigran terus mengalir ke Benua Eropa. Tukar pikiran dan informasi soal ini dikemukakan oleh delegasi DPR RI dengan otoritas Kementerian Luar Negeri Norwegia.

Turut dalam rombongan delegasi DPR RI ini Mukhtar Tompo (F-Hanura),

Tuti Roosdiono (F-PDI Perjuangan), Darori Wonodipura (F-Gerindra), Darizal Basir (F-PD), Yandri Susanto (F-PAN), Wakil Rektor Universitas Indonesia Bambang Wibawarta dan Duta Besar RI untuk Norwegia Yuwono A Putranto.

Mukhtar Tompo dalam pertemuan tersebut ikut membincang isu deforestasi Indonesia yang sangat penting bagi keselamatan ekosistem di Norwegia. Mukhtar mempertanyakan secara detail komitmen Norwegia membantu Indonesia yang sejak tahun 2008 sudah dikampanyekan dan hingga kini belum terealisasi.

Norwegia adalah salah satu penyandang dana terbesar untuk menghentikan deforestasi di kawasan hutan hujan tropis Indonesia.

Bersamaan dengan ancaman *global warming*, Norwegia tentu sangat berkepentingan dengan Indonesia pemilik hutan tropis sebagai paru-paru dunia. Menurut Mukhtar, 40% dari 110 Ha luas hutan Indonesia tidak bisa dikelola oleh masyarakat untuk mengembangkan areal pertanian dan perkebunan. Infrastruktur juga tidak bisa dibangun karena sudah ada pewilayahan hutan, seperti hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi terbatas, dan lain-lain.

“Anda tahu berapa besaran dana komitmen itu? 522 juta USD atau setara Rp 6,7 triliun per tahun. Angka ini cukup besar bagi Indonesia, tapi tidak ada artinya jika Norwegia tenggelam akibat *global warming*. Kesejahteraan petani pengguna hutan Indonesia dipertaruhkan dengan komitmen yang tak kunjung terealisasi. Ini sungguh tak adil bagi masyarakat kecil di Indonesia,” gugat Mukhtar yang juga Anggota Komisi VII DPR RI itu. ■

(mh)



Selain melalui fungsi legislasi dan anggaran, parlemen dapat menjembatani antara pemerintah di level elit dengan masyarakat, serta membantu mengkomunikasikan visi ekonomi hijau di konstituen masing-masing.



foto : dok

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama rombongan

Berharap DPR RI Dorong Pemerintah Tambah Relawan Petugas Hutan

Perlu sinergitas antara relawan hutan dan perangkat hukum, agar menimbulkan efek jera bagi pembakar hutan, dan akhirnya peristiwa serupa tidak akan terulang kembali. Hal itulah yang dikatakan artis penyanyi sekaligus pencinta lingkungan, Uly Sigar Rusady pada Parlementaria yang menemuinya di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Senin (19/9).



foto: Rumi/iw

Uly Sigar Rusady

Pemilik nama lengkap Rulany Indra Gartika Rusady Wirahaditenaya menyesalkan terbitnya SP3 (surat penghentian penyelidikan perkara) atas kelima belas perusahaan tersangka pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Meski demikian ia mengakui bahwa jumlah relawan hutan dengan luas area hutan di Indonesia masih belum seimbang. Hal inilah yang menurutnya membuat pengawasan terhadap hutan di Indonesia masih terbilang lemah.

Padahal jika para relawan petugas hutan diperbanyak, maka akan bisa melakukan pendampingan terhadap masyarakat. Sehingga jikapun ada pihak yang berusaha untuk mempengaruhi mereka untuk melakukan pembakaran hutan, maka masyarakat sudah cukup mengerti bahwa apa yang disuruhkan kepada mereka tidak baik.

Oleh karena itu Uly berharap agar DPR RI mendorong pemerintah untuk segera menambah jumlah relawan petugas hutan, serta meningkatkan taraf hidup mereka.



Film yang diproduksi bersama keluarga besar saya ini merupakan film keluarga yang dibalut cerita Drama Petualangan dengan tema konservasi alam dan lingkungan hidup. Ini ditujukan untuk seluruh anak dan rumah di Indonesia mengingat ketahanan keluarga dan ketahanan lingkungan adalah dasar dari ketahanan nasional



Hal itu semata untuk melestarikan bumi pertiwi ini agar bisa terus dinikmati oleh generasi mendatang.

Berbicara tentang alam dan lingkungan hidup, meski sudah lebih dari 36 tahun berkarya, namun baru di tahun ini lah ia berkesempatan untuk membuat film bertema lingkungan. Ya, film berjudul *My Journey Mencari Mata Air* ini bisa dikatakan film keluarga, artinya film yang diproduksi bersama keluarga besarnya. Tidak hanya sang adik yang notabene merupakan artis terkenal, Paramitha Rusady yang ikut berlakon di film ini. Namun juga anak-anak serta cucu dan keponakan Uly ikut terlibat dalam film tersebut.

“Film yang diproduksi bersama keluarga besar saya ini merupakan film keluarga yang dibalut cerita Drama Petualangan dengan tema konservasi alam dan lingkungan hidup. Ini ditujukan untuk seluruh anak dan rumah di Indonesia mengingat ketahanan keluarga dan ketahanan lingkungan adalah dasar dari ketahanan nasional,” papar wanita kelahiran Garut 4 Januari 1952 ini saat ditemui Parlemenaria di Gedung Manggalawanabhakti, Jakarta, Senin (19/9).

Peraih satyaencana pembangunan dari Presiden RI tahun 1996 ini juga menyadari bahwa sebagaimana film bergenre sosial lainnya, bisa dikatakan jarang diminati. Meski demikian mengingat manfaat yang cukup besar dari film

ini, salah satunya mengedukasi masyarakat untuk mencintai lingkungan, maka ia berharap seluruh masyarakat Indonesia dapat melihat dan menonton film ini. Rencananya film yang telah meraih 16 penghargaan dari luar negeri ini akan diputar di empat ribu desa di seluruh Indonesia, di mulai pada 24 september mendatang yang akan diputar berbarengan di Ambon dan pulau Seram. Awal tahun mendatang film ini akan tayang di bioskop-bioskop di kota besar.

Karir Musik

Karir music Uly didapat dari kedua orangtuanya, Raden Ayu Marry Zumarya dan Raden Mas Yus Rusady Wirahaditenaya yang mengajarkan pendidikan gitar dan seni sejak kanak-kanak. Memasuki usia remaja, Uly harus ikut sang ayah hijrah dari Bandung ke kota Makassar, Sulawesi Selatan. Ketika itu ia sempat membentuk grup band wanita bersama rekan-rekannya.

Tahun 1975 ia pindah ke Jakarta untuk memperdalam kemampuan bermusiknya dengan bergabung bersama Yayasan Musik Indonesia, sekaligus belajar dari komponis Kontemporer ternama, Slamet Abdul Syukur. Ia pun mulai memberanikan diri mengikuti sejumlah festival music di tanah air, seperti Festival Lagu Populer Tingkat Nasional, Lomba Karya Cipta Lagu ASEAN, Populer Song Festival. Uly pun

sempat tampil pada ajang *World Music Oriental Festival* di Sarajevo-Bosnia Hazergovina.

Namun sebelum itu ia pun merilis album perdananya bertajuk *Rimba Gelap*, yang disusul album-album berikutnya. Tidak sedikit lagu ciptaannya menjadi hits dan dibawakan penyanyi-penyanyi ternama tanah air seperti Nicky Astria, Anggun C Sasmi, Ita Purnamasari, Bangkit Sanjaya dan lainnya.

Dari kesertaannya di dunia seni sekaligus kecintaannya pada lingkungan, Kakak kandung artis Paramitha Rusady ini pun pernah meraih banyak penghargaan, diantaranya *Global 500 Award* dari PBB pada tahun 1887, *International woman of the year* dari *Internasional Biographical center of Cambridge England* pada tahun 1993. Satya Lencana Pembangunan dari Presiden RI pada tahun 1996, serta Satya Nugraha dari Menteri Kehutanan RI pada tahun 2000, serta sejumlah besar penghargaan lainnya.

Kini meski genre dan aliran music terus berganti, namun Uly tetap setia dan komitmen terhadap apa yang telah dilakukannya selama ini yakni bermusik sambil mencintai alam dan melestarikan lingkungan. Ia berharap ke depan akan muncul artis-artis lainnya yang peduli terhadap tanah air, sehingga dapat terus mensosialisasikan cinta lingkungan. ■

(ayu)



foto : Andri/iw

“Wayang Golek” Tutup Acara Pesta Rakyat

Ada yang berbeda dari perhelatan ulang tahun DPR RI kali ini, pada puncak acara yang biasanya diadakan pagelaran wayang kulit, namun, kali ini masyarakat disuguhkan pagelaran Wayang Golek Purwa. Antusiasme masyarakat tergambar dengan dipenuhinya lapangan sepakbola di Komplek DPR/MPR RI.



foto : Jayadi/iw

Foto Bersama Pimpinan DPR RI, Sekjen dan BKD bersama kedua dalang sebelum pementasan wayang golek

Pesta Rakyat yang digelar DPR RI memang selalu menjadi magnet bagi masyarakat untuk datang ke gedung parlemen untuk menyaksikan berbagai kegiatan perayaan HUT DPR RI. Berbeda dengan hari biasanya yang kerap dipenuhi dengan berbagai persidangan, pada hari istimewa ini, masyarakat tumpah ruah bergembira menyemarakkan perayaan tersebut.

Ditengah guyuran hujan dan hiruk pikuk masyarakat yang memadati lapangan bola parlemen, tampak kolaborasi dalang kondang Dadan Sunandar Sunarya dan Wawan Dede Among dalam lakon Dasamuka Pejah.

Kolaborasi apik tersebut menceritakan sosok Dasamuka atau nama lain Rahwana yang merupakan Raja negara Alengka. Alkisah, di Negara Alengka Prabu Dasamuka beserta anaknya yang bernama Narantaka sedang membicarakan strategi perang

melawan Batara Rama. Berangkatlah Narantaka menuju medan perang.

Sementara ditempat tawanan, anak Kumbakarna yang bernama Aswanikumba dan Kumbaaswani yang ditawan karena tidak mau berperang, mereka berdialog dan kemudian berpikir daripada mati didalam tawanan lebih baik mati dimedan perang demi bangsa dan negara. Bukan untuk membela Dasamuka, berangkatlah mereka menuju medan perang.

Digunung suwela, Batara Rama, Anoman dan yang lainnya sedang mempersiapkan diri untuk menghadapi serangan dari Alengka. Maka terjadilah peperangan dan Narantaka dapat dikalahkan oleh Anoman, begitu juga Aswanikumba dan Kumbaaswani mengalami nasib yang sama.

Datanglah Dasamuka untuk berperang melawan Batara Rama, dengan perjuangan yang gigih Batara Rama bisa melumpuhkan Dasamuka

dengan menggunakan panah Gua Wijaya dan Kyai Dangu. Pada akhirnya Dasamuka digencat oleh dua gunung kembar yaitu Sondara dan Sondari.

Dalam kisah tersebut, Rawana dilukiskan dengan sepuluh kepala, menunjukkan bahwa ia memiliki pengetahuan dalam Weda dan Sastra. Karena punya sepuluh kepala maka diberi nama “Dasamukha” atau bermuka sepuluh. Ia juga memiliki dua puluh tangan, menggambarkan kesombongan dan kemauan yang tak terbatas.

Sedangkan, dalam mitologi Hindu, Rahwana adalah sosok yang bertentangan terhadap Rama. Kematianya sebagai simbol kesirnaan angkara murka. Bercermin dari kisah tersebut, Anggota Komisi IV DPR RI Haerudin berharap agar sifat lalim yang ada dari sosok Rahwana tidak ada pada para penyelenggara negara. Tingkah laku Rahwana yang menuduh seseorang dan membenarkan diri sendiri harus dihindari.



foto : Azka/iw

Pembukaan pameran lukisan dalam rangka HUT DPR RI



foto : Azka/iw

Pimpinan DPR RI mengamati lukisan yang dipamerkan.

“Ini menjadi sebuah pelajaran agar tidak menuduh seseorang dan membenarkan diri sendiri, tapi untuk mengingatkan agar jangan sampai angkara murka tumbuh dan melenyapkan negeri itu sendiri,” ujar politisi dari Fraksi PAN itu.

Tak hanya itu, ia juga cerita wayang Dasamuka pejah dapat memberikan pelajaran yang terbaik bagi bangsa. Semoga dengan memasuki usia yang ke-71 tahun, DPR RI semakin produktif dan aspiratif. “Semoga Indonesia berjaya dan semakin baik. DPR RI semakin aspiratif, wayang golek berjaya, para dalang juga berjaya,” serunya.

Hal senada disampaikan oleh Ketua DPR RI Ade Komarudin, pada masa ini para pemimpin perlu keteladanan dan mengambil sifat positif dari budaya tradisional seperti wayang golek yang menggambarkan nilai kenegarawanan.

“Anggota parlemen, politisi pada umumnya, perlu meneladani nilai kenegarawanan itu,” ucap Akom sapaan akrabnya.



foto : Arief/iw

Pemotongan tumpeng saat HUT DPR RI di Gedung DPR RI

Melihat banyak pesan moral dari kisah pewayangan, Akom berkomitmen untuk melestarikan kesenian budaya nusantara. Wayang merupakan warisan luhur bangsa yang telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya nenek moyang yang mengandung nilai seni tinggi dan membawa pesan moral yang bijak.

“Kami komit memperjuangkan

dunia wayang Indonesia. Ini adalah warisan dari para leluhur kita yang perlu kita lestarikan,” jelas Akom, sapaan akrab Ketua DPR RI.

Ia juga meminta Komisi X yang membidangi urusan pendidikan dan kebudayaan untuk memperjuangkan aspirasi para dalang yang telah mendedikasikan dirinya dalam pelestarian seni budaya wayang.

“Juga nanti Komisi X yang membidangi pendidikan dan kebudayaan akan kami mintakan perjuangan dengan baik,” ungkapnya.

Selain menampilkan pagelaran wayang, kegiatan ini juga didahului dengan acara Tari Merak dari Sanggar Setjen DPR RI, Tari Topeng Klana dari Sanggar Hidayat Jati Cirebon dan Tari Jaipong dari Sanggar mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia, Bandung.

Dalam acara ini hadir Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon, Sekjen DPR RI Winantuningtyas Titi Swasanany, Duta Besar negara-negara sahabat. ■

(ann/mp)



foto : Naefurodij/iw

Pimpinan DPR RI, Anggota, Sekjen dan BKD serta wartawan bermain angklung.

Parlemen Uni Eropa dan Tantangan *Second Order Syndrome*

Salah satu organisasi supranasional yang dibentuk pasca Perang Dunia II adalah Uni Eropa. Uni Eropa sendiri awalnya didirikan oleh enam negara yaitu Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxemburg, dan Belanda pada tahun 1958 dengan tujuan mencegah konflik seperti Perang Dunia I dan II. Caranya adalah dengan mengelola bersama produksi batu bara dan baja, dua komoditas utama yang diperlukan untuk berperang. Kemudian dari tahun ke tahun anggota Uni Eropa semakin bertambah dan tidak lagi hanya mengurus soal batu bara dan baja saja, namun juga sampai urusan sosial-politik. Saat ini jumlah anggota Uni Eropa sebanyak 28 negara.

Uni Eropa bersifat unik karena para anggotanya tetap menjadi negara-negara berdaulat yang independen, namun di sisi lain mereka menggabungkan kedaulatan mereka – dan dengan demikian memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar. Dalam praktiknya, penggabungan kedaulatan berarti bahwa para anggota mendelegasikan sebagian kuasa mereka dalam hal pengambilan keputusan kepada lembaga-lembaga bersama yang telah didirikan sehingga keputusan untuk masalah-masalah tertentu yang melibatkan kepentingan bersama dapat diambil secara demokratis pada tingkat Eropa.

Parlemen Eropa merupakan salah

satu dari tiga lembaga utama (Parlemen Eropa, Dewan Uni Eropa dan Komisi Eropa) di dalam tubuh organisasi Uni Eropa yang menghasilkan undang-undang dan kebijakan yang berlaku di seluruh wilayah Uni Eropa. Saat ini Parlemen Eropa terdiri dari 751 anggota dari 28 negara yang duduk berdasarkan delapan Kelompok Politik Eropa bukan berdasarkan blok secara nasional. Sekretariat Umum Parlemen Eropa berkedudukan di Luxemburg. Semenjak tahun 1979, anggota Parlemen Eropa dipilih secara langsung oleh masyarakat Uni Eropa, setiap lima tahun sekali.

Tugas dan Fungsi Parlemen Uni Eropa

Tugas dan fungsi Parlemen Eropa meliputi tiga bidang yakni undang-undang, anggaran, dan pengawasan. Meski terlihat sama, fungsi Parlemen Eropa berbeda dengan parlemen biasanya. Meskipun bisa mengamandemen dan menolaksuatu undang-undang, Parlemen Eropa tidak memiliki wewenang untuk mengajukan undang-undang. Undang-undang yang dibuat berasal dari Komisi Eropa (eksekutif). Namun pasca Pakta Lisbon ditandatangani pada tahun 2007, Parlemen Eropa dapat memberikan usulan undang-undang kepada Komisi Eropa.

Parlemen Eropa juga memiliki wewenang untuk mengawasi penggunaan anggaran Uni Eropa. Selain pengawasan anggaran, Parlemen Eropa

juga berperan besar dalam penunjukan Presiden Komisi Eropa beserta timnya. Presiden Komisi Eropa diajukan oleh Dewan Eropa untuk kemudian diteruskan kepada Parlemen Eropa. Nantinya Parlemen Eropa akan membahas untuk kemudian menyetujui atau menolak calon yang diajukan oleh Dewan Eropa. Jika disetujui oleh dua pertiga anggotanya, Parlemen Eropa juga mengangkat anggota Ombudsman Eropa, yang menyelidiki keluhan warga negara mengenai keburukan administrasi lembaga-lembaga Uni Eropa.

Tantangan *Second order syndrome*

Satu fenomena yang dapat kita cermati adalah semakin menurunnya tingkat partisipasi pemilu (orang yang menggunakan hak pilihnya-voter turnout) di negara-negara anggota Uni Eropa, yang selengkapnya dapat dilihat pada pada grafik berikut:

Dari grafik tersebut dapat dilihat selama kurun waktu Pemilu Uni Eropa tahun 1979-2014, tingkat partisipasi pemilu keseluruhan penduduk Uni Eropa menurun dari 61,99% menjadi 42,61%.

Selanjutnya jika dilihat per negara anggota maka angka partisipasi pada Pemilu Uni Eropa adalah sebagai berikut:

Dari 28 negara anggota Uni Eropa, sebanyak 19 negara mengalami tren penurunan voter



Uni Eropa bersifat unik karena para anggotanya tetap menjadi negara-negara berdaulat yang independen, namun di sisi lain mereka menggabungkan kedaulatan mereka – dan dengan demikian memperoleh kekuatan dan pengaruh kolektif yang lebih besar.



turnout, diantaranya termasuk di Jerman, Italia, Perancis, Belanda, Yunani, Spanyol dan Portugal. Sementara di negara pasca komunis, angka *voter turnout* berada di bawah 50% seperti di Kroasia, Romania, Slovenia dan Slovakia.

Penyebab penurunan tersebut antara lain adalah *second order syndrome*, yaitu sebuah gejala dimana para para warga Uni Eropa mempersepsikan bahwa dampak dari Pemilu Uni Eropa kecil bagi kehidupan mereka. Mereka merasakan bahwa Pemilu Nasional di masing-masing negara anggota merupakan hal yang lebih penting karena hasilnya langsung dapat dirasakan melalui kinerja pemerintahan negara. Penyebab lainnya adalah para warga Uni Eropa terutama di negara-negara pasca komunis merasa bingung untuk memilih partai karena ada beberapa partai dari kelompok politik berbeda yang menawarkan program atau *benefit* yang hampir sama dan mereka belum mempunyai kesadaran berpolitik serta pengalaman mengikuti pemilu seperti warga di Jerman dan Inggris.

Dalam kondisi ini, anggota Parlemen Eropa perlu “mendekati” para warga Uni Eropa di negara pasca komunis agar kesadaran berpolitik dan tingkat partisipasi dapat meningkat pada pemilu mendatang. ■ (M. Adinda Rizki, S.I.P dan Prasetyo, ST, Peneliti CEPP FISIP UI)



foto : Hfz

Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon bersama Wakil Ketua Komisi IV Herman Khaeron dan para aktivis tani di Gedung Joeang 45.

ABS Telah Beranak-pinak

Istilah ‘Asal Bapak Senang’ atau disingkat ABS muncul pertama kali di masa Presiden Sukarno. Sebutan tersebut bermula dari Resimen Tjakrabirawa yang dibentuk untuk menjaga keamanan presiden dan keluarganya. Di luar itu, resimen ini bertugas untuk menghibur Sang Proklamator. Banyak yang menceritakan, Bung Karno tak suka basa basi dengan para pengawalnya.

Mengetahui atasannya doyan menari, Detasemen Kawal Pribadi (DKP) mendirikan grup band dengan nama ABS (Asal Bapak Senang) yang bertugas menyanyi dan mengiringi Soekarno menari lenso (tarian asal Minahasa dan Maluku) bersama isterinya. Cerita tersebut tertuang dalam buku ‘Maulwi Saelan Penjaga Terakhir Soekarno’ yang ditulis oleh Asvi Warman Adam dkk.

Band ini khusus menghibur Soekarno dalam acara santai usai acara resmi selesai. Menurut salah satu anggota Tjakrabirawa AKBP Mangil, ABS sama sekali tidak berkaitan dengan politik, tidak ada tujuan lain selain membuat Bung Besar senang. Mulai tahun 1966, kata-kata ABS banyak tertulis di surat kabar namun lain artinya dan berbau politik.

Sekarang grup band ABS sudah tidak ada, nama band ini pun sudah menjadi istilah yang berkonotasi politik, ada pergeseran maksud dan makna. Bahkan Wakil Ketua DPR RI Fadli Zon mengatakan, ABS zaman sekarang sudah beranak-pinak menjadi empat.

“Sekarang ini katanya, ada empat model kebijakan yang sedang bertarung di lingkaran istana, kalau di zaman Bung Karno dulu kita kenal ABS, ‘asal bapak senang,’” ujar Fadli saat berpidato di hadapan para aktivis tani di Gedung Joang 45, Cikini baru-baru ini.

Dia melanjutkan, sekarang ini juga ada perilaku di lingkaran kekuasaan, yang disebut ABT, ‘asal bapak tertawa’. “Jadi gak peduli apa substansinya, yang penting pembicaraannya unjungnya membuat bapak tertawa,” ungkap Fadli.

Model kedua adalah ABM, ‘Asal Bapak Mimpi’, menurutnya kategori ini tidak peduli rasional atau tidak, yang penting bapak bisa bermimpi. Yang ketiga masih ABT tapi dengan kepanjangan yang berbeda dari yang sebelumnya, ‘Asal Bapak Tersanjung’. “Ini yang penting selalu merasa disanjung. Dan yang keempat ‘Asal Bapak Pening’, ABP,” kata Fadli. ■

(eko/mp)

Wajah-wajah serius yang hadir pada saat berlangsungnya

Rapat Dengar Pendapat antara Komisi V DPR RI dengan Kepala BMKG, Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Kepala Bapel BPLS, dan Kepala Bapel BPWS yang digelar di Ruang Rapat Pansus B, seketika berubah ketika salah seorang Anggota Dewan dari Fraksi Golkar Capt. Anthon Sihombing menyampaikan tanggapan dan pernyataannya atas paparan yang diberikan oleh mitra kerja Komisi.

Anthon meminta kepada para Eselon I lembaga-lembaga tersebut, agar memiliki kemampuan yang baik dalam menggunakan anggaran yang diberikan negara. Mengingat kondisi perekonomian negara yang masih belum baik, karena belum tercapai hasil maksimal dari program *Tax Amnesty* yang digadag-gadang pemerintah.

“Harus pintar-pintar menggunakan anggaran, karena kondisi negara kita yang sekarang. Jangan sampai jadi ‘*jamila*’,” ucapnya.

Saat benak hadirin masih menerka-nerka maksud perkataan sang legislator itu, Anthon Sihombing sudah kembali bertanya.

“Tahu *jamila* gak?, *jamila* itu singkatan dari ‘*jatuh miskin lagi*’,” selorohnya.

Sontak suasana ruangan rapat menjadi riuh karena tawa Anggota Dewan dan para undangan yang hadir. ■ (dep/mp)

Ada ‘Jamila’ Dalam RDP Komisi V



foto : Naefurodji/iw

Anggota Komisi V DPR RI Anthon Sihombing tengah berbicara saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kepala BMKG



Harus pintar-pintar menggunakan anggaran, karena kondisi negara kita yang sekarang. Jangan sampai jadi ‘*jamila*’.



Bung PARLE

SP3 KEBAKARAN HUTAN
OLEH POLDA RIAU TELAH MENYULUT
KEMARAHAAN MASYARAKAT

INI TANDANYA
SINERGI ANTARA PEMERINTAH
PUSAT, DAERAH SERTA APARAT
PENEGAK HUKUM DALAM MENGATASI
KERUSAKAN LINGKUNGAN BELUM
MENUNJUKKAN TANDA-TANDA
YANG BERARTI

BAGAIMANA
UPAYA PENCEGAHAN
DAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN BISA BERHASIL,
JIKA PENEGAKAN HUKUMNYA
SEPERTI INI ?

PADAHAL
KITA SEMUA TAHU KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN SANGAT
MERUGIKAN, BUKAN HANYA BAGI
MASYARAKAT SETEMPAT, TAPI JUGA
LINTAS NEGARA

MAKANYA
DPR-RI
MEMBENTUK
PANJA
SP 3
INI

HARAPAN MASYARAKAT JIKA
MEMANG ADA PROSES YANG TIDAK
BENAR DENGAN TERBITNYA SP3, MAKA
REKOMENDASIKAN SP3 ITU DICABUT DAN
KASUSNYA DILANJUTKAN
KEMBALI,

WALAU DILAIN PIHAK
ISTANA KEPRESIDENAN PUN TELAH
MEMINTA KAPOLRI MENGEVALUASI
KEPUTUSAN POLDA RIAU
TERSEBUT.

YA...
MASYARAKAT KHAWATIR
APABILA PENEGAKAN HUKUM TIDAK
DILAKSANAKAN SECARA SERIUS,
PRAKTIK PEMBAKARAN HUTAN
SECARA SENGAJA AKAN TERUS
BERULANG YA BUNG !